



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KOMISI IV DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Hari, Tanggal	: Senin, 18 November 2019
Pukul	: 10.00 s.d Selesai WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI (F-PDIP)
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV) Gedung Nusantara Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober 2019; 3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2020; dan 4. Isu-isu aktual.

Anggota yang Hadir : 45 Anggota dari 52 Anggota

**F-PDIP**

1. SUDIN, S.E.
2. SUNARNA, S.E., M.Hum.
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. Ir. EFFENDI SIANIPAR
5. ONO SURONO, S.T.
6. H. YADI SRIMULYADI
7. Ir. MINDO SIANIPAR
8. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
9. VITA ERVINA, S.E.
10. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
11. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
12. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

**F-PG**

1. H. DEDI MULYADI, S.H.
2. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.H.
3. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
4. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.
5. Ir. ICHSAN FIRDAUS
6. BUDHY SETIAWAN
7. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
8. ALIEN MUS

**F-GERINDRA**

1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
2. Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.
3. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
4. Ir. SUMAIL ABDULLAH
5. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.
6. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.

**F-NASDEM**

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
2. Drs. FADHOLI
3. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
4. YESSY MELANIA, S.E.

**F-PKB**

1. DANIEL JOHAN, S.E.
2. H. MUHTAROM, S.Sos.

3. LULUK NURHAMIDAH, M.Si.
4. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.
5. EDWARD TANNUR, S.H.

**F-PD**

1. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.
2. Drs. GUNTUR SASONO, M.Si.
3. Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
4. MUSLIM, S.H.I., M.M.
5. BAMBANG PURWANTO, SST., M.H.

**F-PKS**

1. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.
2. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
3. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

**F-PAN**

1. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
2. HAERUDIN, S.Ag., M.H.
3. FACHRY PAHLEVI KANGGOASA, S.E.

**F-PPP**

1. K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL  
AFFANDY, M.Pd.I.
2. EMA UMIYYATUL CHUSNAH.

- Undangan :
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
  2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal);
  3. Justan Riduan Siahaan. AK. MACC. CA. (Inspektorat Jenderal);
  4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura);
  5. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan);
  6. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
  7. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);

8. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian);
9. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian);
10. Dr. Ir. Agung Hendriadi M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan);
11. Ir. Ali Jamil, M.P. Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian).
12. Aas Asikin Idat (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia);
13. Karyawan Gunarso (Direktur Utama PT Sang Hyang Seri);
14. Eko Taufik Wibowo (Direktur Utama PT Berdikari);
15. Febriyanto (Direktur Utama PT Pertani).

**KETUA RAPAT:**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***  
**Salam Sejahtera Untuk Kita Semua**

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi IV,  
Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia beserta jajaran,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Pertani,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Berdikari.**

Terima kasih Bapak atas kehadirannya.

Mengawali rapat hari ini, pertama-pertama marilah kita memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya kita dapat menghadiri Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 – 2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI, tanggal 18 Oktober 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV, pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada hari ini Senin

tanggal 18 November 2019, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam rangka membahas Evaluasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I tahun 2019, Evaluasi pelaksanaan per-Oktober tahun anggaran 2019, Rencana kerja dan kegiatan tahun 2020, serta isu-isu aktual lainnya.

**Bapak dan Ibu yang saya muliakan.**

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV saat ini rapat kerja Komisi IV telah dihadiri dan ditanda tangani 30 anggota dari 54 anggotan, dan 9 Fraksi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Rapat Kerja hari ini dimulai pukul 11:00 akan diakhir pada pukul 14:00, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut;

1. Pengantar Rapat,
2. Penjelasan Menteri Pertanian Republik Indonesia atas Evaluasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I tahun 2019 dan Evaluasi Pelaksanaan per-Oktober tahun Anggaran 2019, Rencanan Kerja dan Kegiatan anggaran tahun 2020, serta isu-isu aktual lainnya,
3. Jawaban Eselon I Kementerian Pertanian atas pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI pada rapat kerja yang lalu tanggal 5 Oktober. Karena waktu itu Pak Menteri waktunya tidak cukup, maka kami sudah membuat keputusan membuat laporan tertulis dan langsung dijawab oleh Eselon I,
4. Tanggapan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
5. Jawaban Menteri Pertanian Republik Indonesia,
6. Kesimpulan Rapat,
7. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

## **Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Republik Indonesia Semester I tahun 2019, terkait hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada tiga kuasa pengguna anggaran, Kementerian BPK telah melakukan pemeriksaan pada Kementerian Pertanian dimana terdapat pemasalah basis dan data perencanaan atau penganggaran alokasi volume pupuk bersubsidi yang belum dapat diidentifikasi secara terperinci. Sasaran penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dan mengakibatkan alokasi volume kebutuhan pupuk bersubsidi tidak dapat digunakan sebagai alat pengendali dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke Petani. Disamping itu, ditemukan pemasaran terkait pengelolaan irigasi pembangunannya belum evaktif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi guna mendukung peningkatan kedaulatan pangan.

Berdasarkan laporan tersebut, hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukan terdapat daerah irigasi dalam best line yang telah dibangun jaringan primer dan skunder, tetapi jaringan tersiernya belum tersedia sehingga layanan irigrasi belum berfungsi, selain itu korodinasi antara Kementerian Pembangunan Jaringan Irigrasi dan Kegiatan Cetak Sawah belum optimal.

Pak Menteri di Indonesia ini harga yang paling mahal adalah korodinasi antar Kementerian, jangan antar Kementerian, antara Anggota saja kadang-kadang susah.

Pada kesempatan hari ini pula Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia cukup memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang telah meroyalisasikan 60,01% atau 13,09 triliun dari pagu anggaran sebesar 21,82 triliun per-Oktober 2019. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang kami nilai masih menjadi permasalahan yang mendapat perhatian dan penyelesaian oleh Kementerian, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang sector pertanian Semester I 2019 hanya tumbuh sebesar 3,41% atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,8,8%. Bahkan khusus untuk sector tanaman pangan pertumbuhan PDB Semestes I 2009 tercatat negative 0,42%, kurangnya pertahatian Pemerintah terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian. Peran dan pertanggung jawab terhadap KARHUTLA yang terjadi di beberapa daerah yang kurang optimal dan penggunaan sarana prasarana pertanian.

Pak Menteri, kemarin Komisi IV mengadakan kunjungan ke 3 Provinsi Jambi, Kalteng, Riau dan Sumsel. Ini bersinggungan kebakaran hutan, bersinggungan dengan pemilik-pemilik kebun, terutama kebun sawit. Kondisi area lahan oleh karena itu Komisi IV DPR ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Pertanian terkait dengan permasalahan tersebut, serta rencana kerja program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2020 yang alokasi Pagu anggaran nya telah disetujui, Komisi IV

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 September 2019 senilai 21,0 triliun.

**Hadirin yang berbahagia,**

Pada tahun 2019 Ombudsman mengumumkan peringatan learning kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam tata kelola implementasi kebijakan pangan, khususnya terkait dengan importasi komoditi beras, gula, jagung. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah yang berkaitan dengan data produksi, data ketersediaan pangan. Temuan yang terkait gula import yang mengganggu stabilitas produksi gula petani akibat adanya rembesan gula import untuk industri yang beredar di pasar tradisional, serta berkaitan dengan import jagung dan gandum yang digunakan oleh pakan ternak.

Jadi Pak Menteri infonya, jagungnya berkurang pakannya bertambah. Jadi ini hanya untuk mengakal-akali saja.

Oleh karena itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ingin mendapat penjelasan sejauh mana tindak lanjut dari Kementerian Pertanian berkaitan dengan peringatan dini yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia tersebut, serta kesiapan Pemerintah dalam mengantisipasi El Nino tahun 2020 yang konon kami dapatkan info yang lebih dahsyat dari tahun 2015.

**Saudara Menteri dan Anggota DPR RI yang kami hormati.**

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan saudara Menteri menyampaikan penjelasan terkait dengan agenda diatas dan dilanjutkan para Pejabat Eselon I untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi IV pada rapat kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 5 November 2019 yang lalu.

Waktu kami persilahkan.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***  
**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.**

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, para jajaran Pemerintah lingkup Departemen Pertanian yang sama saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia.**

## ***Alhamdulillah Wa Syukurillah Wa Lahaula Wa Lakuwwata Illabillah.***

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali rapat kerja pada hari ini, perkenankan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh para Anggota DPR RI atas undangan rapat kerja pada pagi ini. Dengan agenda pembahasan;

1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per-Oktober Tahun Anggaran 2019;
3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
4. Isu-isu Aktual.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Sebagai agenda pertama, kami melaporkan evaluasi hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Semester I Tahun 2019 tersebut ditujukan kepada 5 objek pemeriksaan, yaitu:

1. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja bantuan pemerintah dan pinjaman IBRD;
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perijinan sertifikasi dan implementasi program perkebunan kelapa sawit;
3. laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
4. pengelolaan belanja subsidi pupuk;
5. LHP atas laporan keuangan pada *scuindel management of magical tools riset* dan teknologi atau SMARTD Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019, terdapat sebanyak 40 temuan dan 92 rekomendasi yang harus kami tindak lanjuti.

Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Posisi tindaklanjut sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, pada 5 objek pemeriksaan seperti tersebut di atas, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Dari 92 rekomendasi, Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti dan masuk dalam kategori sesuai sebanyak 5 rekomendasi.
2. Sebanyak 72 rekomendasi sudah ditindaklanjuti, namun masuk dalam kategori belum sesuai atau masih dalam prososes tindaklanjut.



3. Sebanyak 15 rekomendasi hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti, dikarenakan laporan hasil pemeriksaan dari BPK baru diperoleh pada akhir periode Juni 2019.

Setelah selesai masa pemeriksaan Semester I, tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terus dilakukan, hal itu terlihat dari laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 31 Oktober 2019, dimana pada akhir bulan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengusul tindaklanjut sebanyak 60 rekomendasi, termasuk di dalamnya adalah usulan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang pada Semester I masuk kategori belum ditindaklanjuti sebanyak 15 rekomendasi.

Dengan demikian sampai 31 Oktober 2019, Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi pemeriksaan BPK. Terkait dengan upaya Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, perlu kami sampaikan pula penjelasan hasil rekomendasi pemeriksaan yang masuk kategori yang belum sesuai atau belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini, hal ini dikarenakan.

1. Tindak lanjut rekomendasi memerlukan waktu yang cukup lama, seperti pembuatan sertifikat serta pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi aset tetap.
2. Perlu koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam rangka tindak lanjutnya.
3. Tindak lanjut yang berkaitan dengan penyetoran ke khas negara dilakukan secara bertahap.
4. Melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut
5. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan SMARTD Tahun 2018, baru diterima pada Bulan Juli 2019.

Dengan sisa waktu yang tidak banyak diakhir Tahun 2019 ini, Kementerian Pertanian melalui upaya yang sungguh-sungguh, akan mengakselerasi penyelesaian hasil pemeriksaan BPK tersebut, dengan harapan predikat pengelolaan laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang telah diperoleh selama ini tiga tahun berturut-turut, akan tetap dapat kami pertahankan untuk Tahun 2019.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Sebagai agenda kedua, kami akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran per Oktober Tahun Anggaran 2019. Realisasi anggaran Kementerian Pertanian 2019, sudah termasuk outstanding kontra sampai dengan 14 November 2019 Pukul 07.00 mencapai 16,25 triliun atau 74,47% dari pagu sebesar 21,83 triliun. Dari

sisi fisik, realisasi produk komoditi pertanian utama sampai dengan Bulan Oktober 2019, menunjukkan hasil yang mengembirakan.

Beberapa produk komoditi utama seperti Jagung, Tebuh, Kelapa, Kakao dan Karet telah mendekati target produksinya. Bahkan untuk komoditas Bawang Merah, Cabe dan Kopi telah melebihi target pencapaian produksi dan capaian produksi Bawang Merah sampai mencapai 102% atau sebesar 1,53 juta ton dari target 1,49 juta ton.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri maaf sebentar. Data ini data yang dikolek oleh Kementerian Pertanian atau data dari BPS.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Ini data dikolek dari BPS. Untuk yang lain dari Kementerian Pertanian, ada dua.

**KETUA RAPAT:**

Mana saya yang dikolek dari ini.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Padi dari BPS, Jagung.

**KETUA RAPAT:**

Padi dan Jagung dari BPS, yang lainnya dari internal.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Ia internal.

**KETUA RAPAT:**

Oke, terima kasih Pak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Kami lanjutkan.

Untuk Cabe dan Kopi bahkan capaiannya lebih tinggi lagi yaitu 112% dan 110% untuk Kopi. Namun demikian untuk komoditi Daging Sapi atau Kerbau dan Kedelai, masih diperlukan upaya lebih keras lagi, agar capaiannya bisa mendekati target. Rendah capaian produksi Kedelai sampai dengan Oktober 2019, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya.

1. Minta petani untuk menanam Kedelai cenderung rendah,
2. Terbatasnya ketersediaan benih Kedelai di lapangan,
3. Harga benih Kedelai yang belum menimbulkan daya tarik peningkatan kapasitas produksi bagi produsen benih,
4. Harga jual Kedelai rendah,
5. Belum ada regulasi yang mendukung tataniaga Kedelai itu.

Dari sisi capaian fisik kegiatan utama Tahun 2019, sampai dengan Bulan Oktober 2019, dapat kami laporkan perkembangan realisasinya sebagai berikut:

1. Pengembangan Padi mencapai 566,05 ribu hektar, Jagung mencapai 589,96 ribu hektar dan Kedelai mencapai 115,32 ribu hektar.
2. Pengembangan hortikultura, yaitu untuk komoditi Cabe, telah mencapai 5,17% ribu hektar dan Bawang Merah mencapai 2,40 ribu hektar.
3. Pengembangan komoditi perkebunan, yaitu Tebuh telah mencapai 13,69 ribu hektar, Karet mencapai 4004,63 ribu hektar, Kepala 11 ribu hektar dan Pala 13,8 ribu hektar.
4. Pengembangan komoditi peternakan melalui program siwab, sampai saat ini telah mencapai 3,16 juta sektor IBI atau 105,30% dari target. Dari jumlah sektor IBI tersebut, realisasi sampai booming mencapai 1,97 juta ekor dan lahir 1,71 juta ekor.
5. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi komoditas utama di atas, yaitu perbaikan irigasi, pembangunan sumber air, bantuan alsintan, penumbuhan koperasi, pengembangan toko tani Indonesia atau TTI, kawasan rumah pangan lestari atau KRPL dan lainnya. Realisasi fisik telah mencapai di atas 52%, kecuali kegiatan pendukung optimasi lahan rawa.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.**

Sebagai agenda ketiga, kami akan menyampaikan rencana kerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020. Pembangunan pertanian 2020 merupakan awal RPJMN 2020-2024. Landasan yang digunakan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2020 adalah rencana kerja pemerintah atau RKP dengan temah, peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.

Rencana kerja pemerintah Tahun 2020 tersebut, berisi 5 prioritas nasional, pembangunan pertanian Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, berkontribusi pada PN3 tentang nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja dan PN4 tentang ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup. Agar pembangunan pertanian kedepan berjalan lebih optimal, maka Kementerian Pertanian telah merancang dua tahap program.

1. Program jangka pendek yang dicapai dalam waktu tiga, enam bulan kedepan. Program jangka menengah Tahun 2020-2024, yaitu pertama, untuk program jangka pendek, Kementerian Pertanian fokus meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan program Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Fokus utama pada jangka pendek itu adalah merampungkan satu data pangan, pembentukan komando strategis pembangunan pertanian ada kostratani dan upaya mejamin ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis 3 bulan kedepan bagi 260 juta penduduk kurang lebih.
2. Yaitu program pembangunan jangka menengah, yang dibuatnya rencana kerja Tahun 2020. Rencana kerja pembangunan pertanian Tahun 2020, telah disesuaikan mengacu pada arahan Bapak Presiden RI, diantaranya telah memasukan program pengembangan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur pertanian dan transformasi ekonomi dari sebelumnya berbasis sumber daya alam SDA, menjadi berbasis manufaktur dan dibawah nilai ekonomi tinggi.

Agar program dan kegiatan pembangunan pertanian Tahun 2020 berjalan dengan baik, maka Kementerian Pertanian juga berkomitmen mendukung regulasi peraturan Perundang-undangan yang menghambat investasi dan meningkatkan reformasi-birokrasi. Beberapa program terobosan yang dilaksanakan di Tahun 2020 itu antaralain.

1. menjadi kecamatan sebagai sentra pembangunan pertanian melalui optimalisasi peran balai penyuluh atau BPP. Program terobosan ini kami istilahkan sebagai strategis pembangunan pertanian atau kostratani.
2. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi,
3. Pengentasan daerah rawan pangan melalui family farming dan pertanian masuk sekolah atau PMS,
4. Pengembangan AWR,

Kementerian Pertanian yang salah satu tugas utamanya adalah penyediaan pangan pindul telah merancang target produksi, beberapa komoditas pangan utama pada Tahun 2020, yaitu target produksi Padi ditetapkan sebesar 59,15 juta ton, Jagung 30,35 juta ton, Kedelai 1,12 juta ton, serta komoditas strategis lainnya yang ditargetkan pada Tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan pencapaian target tersebut, Kementerian Pertanian memperoleh anggaran Tahun 2020, sebesar 21,05 triliun

yang terdistribusi pada 11 Eselon I. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian 2020 dan dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern sebagaimana kami uraikan di atas, maka pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian di beberapa Eselon I. Untuk itu melalui kesempatan rapat kerja hari ini, ijinkan kami mengusulkan perubahan komposisi pagu, anggaran Tahun 2020, lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Badan Litbang kami usulkan mendapat tambahan anggaran sebesar 100 miliar, sehingga menjadi 1,90 triliun dari sebelumnya Rp.1,80 triliun. Penambahan anggaran tersebut diperuntukan bagi program terobosan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi, khususnya benih, hasil penelitian dan pengembangan.
2. Badan PPSDM Pertanian, kami usulkan naik menjadi Rp.2,04 triliun, dari sebelumnya Rp.1,70 triliun, yang dipergunakan untuk pengembangan SDM pertanian termasuk petani milenia melalui kostratani.
3. Badan ketahanan pangan kami usulkan mengalami penambahan sebesar Rp. 160 miliar menjadi 823,56 miliar, dari sebelumnya 663,56 miliar. Yang digunakan untuk mendukung program pengentasan daerah rentan pangan melalui family farming dan pertanian masuk sekolah.
4. Sekretariat Jenderal kami usulkan mengalami penambahan 50 miliar rupiah, yang digunakan untuk mengadakan infrastruktur dan operasionalisasi pengembangan AWR. Penambahan anggaran pada 4 Eselon I tersebut, diusulkan diambil dari anggaran Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP.

Walapun terjadi perubahan alokasi anggaran Tahun 2020 antara beberapa Eselon I seperti tersebut di atas, namun tidak merubah pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 sebesar 21,05 triliun. Besar harapan kami melalui rapat kerja hari ini, pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, dapat menyetujui dan memahami persis apa yang kami harapkan, agar perubahan pagu anggaran 2020 yang kami usulkan dapat diterima.

Pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari subsidi pupuk dan dana alokasi khusus pertanian. Untuk subsidi pupuk telah dialokasikan anggaran Tahun 2020 sebesar 26,63 triliun dengan volume pupuk 7,95 juta ton. Untuk DAK Pertanian, pagu anggaran alokasi anggaran sebesar Rp.1,5 triliun yang diperuntukan bagi DAK provinsi sebesar 384 miliar dan untuk DAK Kabupaten/kota sebesar Rp.1,12 triliun. Penggunaan DAK oleh daerah diarahkan guna mendukung pembangunan perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukung lainnya.

## **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Sebagai agenda keempat, kami menyampaikan dua isu aktual, yaitu perkembangan *world trade organization* atau WTO. Dan dua, persiapan Kementerian Pertanian menghadapi el nino 2020. Yang pertama terkait pengembangan kasus *world trade organization* WTO, perlu kami laporkan bahwa Indonesia sebagai anggota WTO memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang ada dalam WTO. Berdasarkan keputusan di WTO, Indonesia diharuskan merevisi Undang-Undang yang mengatur pemenuhan kecukupan pangan, dengan cara membatasi masuknya produk pangan Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Pertanian telah mengusulkan perubahan 4 Undang-Undang dan telah oleh Komisi IV DPR-RI melalui rapat dengar pendapat atau RDP, yang dilakukan pada tanggal 11 November 2019, yaitu meliputi:

1. Rencana Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura,
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2012, tentang Pangan,
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kedua, terkait dengan kesiapan Kementerian Pertanian menghadapi el nino Tahun 2020, maka telah dilakukan upaya mengantisipasi yaitu.

1. Inventarisasi daerah rawan kekeringan ketersediaan benih, alsintan saprodi lainnya.
2. Desiminasi, informasi, prakiraan iklim melalui pemerintah daerah dan instansi yang terkait dengan pertanian.
3. Percepatan tanam pada daerah irigasi teknis golongan I dan II, dengan memanfaatkan ketersediaan air yang ada secara efisien dan memobilisasi alsintan pengolahan lahan.
4. Menanam paritas tanaman yang memerlukan air relatif sedikit, sistem usaha tani hemat air, menanam Palawija yang hemat air, seperti Kacang Hijau, Sorgum dan pola tanam sesuai spesifikasi lokasi.
5. Menyiapkan bantuan benih dan benih tahan kekeringan dan benih Palawija untuk rotasi tanaman Padi alsintan serta saprodi lainnya.
6. Pengawasan dan monitoring pertanaman secara lebih intensif, pada daerah-daerah yang berpotensi terkena kekeringan dengan gerakan khusus sosialisasi menghadapi el nino.
7. Optimalisasi penyanga produksi lahan rawa atau lebak,

8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah dalam rangkaantisipasi maupun mitigasi dampak dari resiko.

Melalui upaya preventif tersebut, diharapkan produksi pangan utama Tahun 2020 tidak akan terganggu. Pada gilirannya kebutuhan pangan akan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja pada hari, apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, saya mohon berkenaan pimpinan agar para Pejabat Eselon I yang terkait yang bersangkutan, dapat diberi kesempatan memberikan penjelasan teknis tambahan.

Demikian atas segala perhatian dan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR-RI, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga Ridha Allah bersama kita.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.***

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikum salam.***

Terima kasih Saudara Menteri.

Tanggal 5 November yang lalu, hampir 38 penanya dari Komisi IV, waktu itu sudah disampaikan jawaban tertulis dan dijawab langsung oleh para Eselon I. Saya titip pertanyaan satu, tadi Saudara Menteri mengatakan realisasi Padi dan Jagung datanya dari BPS, setahu saya samapi hari ini saya baru suruh staf saya mengecek, BPS belum pernah, belum mengeluarkan data mengenai produksi Padi dan Jagung. Ini yang harus kita pertanyakan.

Terima kasih.

Silakan para Eselon I menjawab sesuai dengan pertanyaan anggota dan bidangnya masing-masing.

Terima kasih.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):**

Interupsi Pimpinan.

Haerudin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Interupsi apa mau bertanya.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):**

Interupsi.

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota yang terhormat,**

Pak Menteri Pertanian beserta seluruh para pejabat Kementerian Pertanian dan para stakeholder pertanian yang hadir hari ini, baik Pupuk maupun BUMN-BUMN Pertanian yang lain.

Pimpinan, waktu kita rapat kerja minggu yang lalu, ada kesepakatan tentang satuan kerja. Dalam Undang-Undang MD3 memang kita tidak punya kewenangan, tidak diberi kewenangan untuk membahas satuan tiga. Tapi logika kita adalah satuan tiga itu akses publik. Jangankan kita sebagai mitra kerjanya, masyarakat luas pun boleh tahu atas satuan tiga itu. Hari ini kita ingin tahu dan kita sudah kesepakatan kita butuh satuan tiga. Tadi apa yang disampaikan Pak Menteri, Pak Menteri ada realokasi di beberapa titik, di beberapa dirjen, kita tidak tahu alokasinya kemana dan dari mana. Kalau menurut saya bijaksana kalau kita hentikan rapat ini dulu sebelum kita pegang satuan tiga itu. Jadi nanti cocokan jawaban para Dirjen ini para Eselon ini dengan apa yang ada di satuan tiga tadi Pak.

Pak Pimpinan begitu.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Sudah Pak Haerudin, menanyakannya sudah?

Saya jelaskan, tadi sudah diserahkan dalam bentuk flash disk, kan harus diperbanyak dulu. Bapak kalau saya colokan flash disk disini Bapak juga tidak mungkin bisa baca, baru diterima, dengar dulu penjelasan saya.



**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):**

Sebentar. Kalau sudah hari ini mengasih flash disk hari ini, benar itu tidak logis, kan kita sudah berapa lama, 7 hari lebih.

**KETUA RAPAT:**

Waktu itu kesepakatannya, dalam rapat kerja yang akan datang dibawah satuan tiganya, bukan untuk dibahas, karena itu adalah transparansi, sambarlah Pak. Saya ingatkan Pak Haerudin ini orang baik ya, sabar ya.

Terima kasih.

Lanjutkan dengan Eselon I.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

**Pimpinan dan Anggota Komisi IV,**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Ijinkan saya nanti menugaskan masing-masing Eselon I, namun sebelumnya terkait dengan sekjen, ada dua poin, yang pertama banyak mempertanyakan terkait dengan data. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Pertanian mendukung satu data dan hanya menggunakan data-data produksi atau populasi yang dikeluarkan atau dirilis oleh BPS dan menggunakan data luas lahan baku sawah. Ini yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Sebagai contoh, satu-satunya data luas baku sawah yang akan digunakan depan adalah data luas lahan baku sawah yang ditetapkan, Insya Allah akan diumumkan oleh Kementerian ATR BPN pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi tim kami Kementerian Pertanian ATR BPS dan BIG sekarang sedang melakukan verifikasi agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Terkait data tadi memang belum dirilis Pak Pimpinan, tapi kami sudah rapat lima kali, jadi data yang kami disampaikan, khusus untuk Padi dan lain-lain itu sudah dikoordinasikan dengan teman-teman BPS.

Yang kedua, terkait dengan kriteria kesejahteraan tani. Bapak Pimpinan, bahwa kesejahteraan ini memiliki dimensi yang luas. Ukuran kesejahteraan dari aspek ekonomi, saat ini yang digunakan adalah nilai tukar rupiah petani dan nilai tukar usaha pertanian. Jadi saran-saran dari Komisi IV, agar NTP dan RTUP juga satu data dari BPS, Insya Allah akan kami tindaklanjuti. Jadi mudah-mudahan setelah 1 Desember, dengan keluarnya data luasnya baku lahan, turunannya bisa kita clearkan.

Barangkali dari Sekjen demikian.

Untuk selanjutnya saya minta Kepala Badan Ketahanan Tanah, saya persilakan.

## **KETUA RAPAT:**

Ijin Pak Sekjen.

Tadi masalah Padi, per Oktober 52,82 juta ton. Kira-kira penennya dari Januari sampai kapan. Setahu saya hampir 3 bulan, 4 bulan ini, kekeringan dimana-mana dan ini tidak mungkin tercapai, karena ini baru mau musim tanam, paling cepat awal tahun depan panennya. Berarti ini produksinya turun dibandingkan tahun lalu. Data BPS hasil produksi Padi tahun lalu 56.537.774 ton. Berarti turun ya. Karena ini pertanyaan saya. Kalau 52,82 jtua ton ini, itu kira-kira ini Bulan November, setahu saya tiga bulan terakhir tidak ada penen, hampir semua wilayah kekeringan. Berarti terakhir panen itu mungkin Bulan Agustus atau di bawah Bulan Agustus. Nanti saya minta tolong kalau tadi Pak Sekjen mengatakan, data ini dari BPS, saya ingin tahu per bulan, per provinsi data yang dari BPS. Kalau bisa besok-lusa dikirimkan ke Sekretariat Komisi IV, supaya clear. Jangan ada dusta diantara kita. Karena kalau datanya salah, obatnya juga salah. Ia Pak Sekjen.

Terima kasih.

Lanjutkan.

## **SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Siap Bapak, besok Insya Allah data kami siapkan.

Selanjutnya Badan Ketahanan Pangan.

## **KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,**

Mohon ijin Pak Menteri.

Yang pertama, menyampaikan mengenai kaitannya dengan ketersediaan. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan. Memang kami sudah melakukan pertemuan Pak dengan BPS. Jadi Kementerian Pertanian membentuk yang namanya tim proknosa, lintas kementerian Pak. Jadi termasuk di dalamnya adalah kawan-kawan dari BPS. Kalau tadi Pak Pimpinan menanyakan mengenai data sampai dengan Desember, ini juga ada data produksi yang dirilis oleh BPS Pak. berdasarkan KSA terbaru, untuk November, itu produksinya 1,2 juta ton, untuk Desember 1,02 juta ton Pak. Ini yang kemudian kita gunakan untuk kita menghitung memprediksi ketersediaan pangan kita.

## **KETUA RAPAT:**

Pak Agung, tadi saya minta data, kalau Bapak mengatakan 1,2 juta ton, kemudian November 1,2 juta ton, Desember satu koma sekian juta ton, tolong wilayah mana yang panen, karena setahu saya hampir seluruh Indonesia kekeringan dan banyak terjadi usul. Tolong kasih kami data. Jadi kalau hanya bicara toh satu koma sekian juta, satu koma sekian dua juta, sama juga produksi Jagung. Import Jagung, Bapak tahulah Pak Sekjen tahu berapa banyak Gandum tambahan import untuk pakan ternak, semua juga tahu anggota lama disini. Jadi kami minta tolong data yang lengkap, bukan apa, kita untuk mencari jalan keluar atau baik, agar bangsa ini menjadi produksi pangan nasional tersendiri, bukan dari import. Ya Pak.

Terima kasih.

## **KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

Siap. Nanti Pak Pimpinan.

Yang kedua, terkait dengan kemarin adalah saran mengenai pengembangan pangan lokal Pak. Kami Kementerian Pertanian masih terus kita mendorong pemanfaatan pangan lokal kita, kita punya program yang namanya pengembangan industri pangan lokal, sampai dengan tahun lalu masih kita laksanakan dan ini akan kita lanjutkan. Untuk tahun-tahun kedepan, bahkan Tahun 2020 sampai 2024, kami mencoba menyusun kebijakan strategis pangan dan visi. Disitu komposisi pangan kita termasuk pangan lokal kita masukan di dalam kebijakan tersebut.

Yang terakhir Pak, ini terkait dengan Pak Daniel kemarin ya menanyakan mengenai Badan Pangan Nasional Pak. Badan Pangan Nasional ini sebetulnya Menko Perekonomian setah membicarakan berkali-kali dengan kita juga, kawan-kawan kementerian perdagangan, kemudian kementerian-kementerian lain. Memang rancangan tersebut telah disusun, namun demikian masih banyak yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan harmonisasi mengenai terutama Pasal-pasal tentang Pendelegasian Kewenangan Pak, antara Kementerian dan Kelembagaan ini yang masih terus kita bahas.

Saya rasa itu Pak Ketua dan Pimpinan dan anggota yang dari kami, selebihnya mungkin nanti Dirjen teknis yang lain akan menyampaikan.

## **SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Ijin Pimpinan.

Untuk selanjutnya saya minta Dirjen Hortikultura.

## **KETUA RAPAT:**

Sebentar.

Pak Agung, Badan Ketahanan Pangan itu RUU nya dari tahun berapa. Saya rasa dari Menterinya Pak Suswono 2012, hampir 7 Tahun tidak ada laporan tahu-tahu tidak kurangnya sinkronisasi. Kerja apa selama 7 Tahun ini, ini bukan kepentingan Komisi IV, ini kepentingan nasional ya. Ini yang saya kadang-kadang bingung. Harusnya pada waktu raker disampaikan Pak, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Jadi jangan di cap nya karena masyarakat Indonesia mengecapnya, kalau DPR tidak buat Undang-Undang, berarti DPR nya tidak kerja, sedangkan ini membuat Undang-Undang adalah kesepakatan bersama. Ini lho Pak Agung, tolong kalau ada apa sekarang diinfokan segera kepada kami, agar cepat diselesaikan. 7 tahun membuat Undang-Undang, saya juga kaget, saya ingat 2012 jaman Pak Suswono mungkin itu ya, sampai hari ini sudah Pak Amran Sulaiman sudah lewat, kemudian ada Pak Syahrul Yasin Limpo belum juga selesai. Mungkin nantilah, Insya Allah 2030 selesai.

Saya lanjutkan.

## **DIRJEN HORTIKULTURA (PRIHASTO SETYANTO):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Mohon ijin Pak Menteri.

Jadi pertanyaan untuk hortikultura dari Ibu Rizky Aprilia, SH., M.H. pertanyaan nomor 14. Jadi mengenai importase Klengkeng. Jadi pada dasarnya pengeluaran re-PH ini ketentuan ini sama untuk semua pelaku usaha, importir selama memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Untuk importase Klengkeng kita sudah buka untuk Tahun 2019 sejak Bulan November dan kami tutup Bulan Februari Pak, karena sudah mencapai pengajuannya sudah mencapai 325.463 ton. SIP yang terbit itu 120.531 ton dan sampai tanggal 24 Oktober, realisasi impor Klengkeng itu baru mencapai 57.371 ton. Artinya masih sangat jauh dari SPI yang sudah diterbitkan. Jadi ini data dari Kementerian Perdagangan yang sudah kami terima Pak.

Jadi demikian sementara penjelasan dari kami.

## **F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Interupsi Pimpinan.

Riezky Aprilia, A-147.

Bapak Dirjen Hortikultura yang terhormat.

Masalah keluhan importir juga bahwa mereka ini berdasarkan global eksport hanya bisa berlaku untuk satu importir. Ini sama saja menambah permasalahan bagi yang ingin melakukan impor hortikultura dan bisa mengakibatkan Monopoli. Nah saya ingin bertanya, bertanya tololnya si sebenarnya. Latar belakang kebijakan Bapak, kebijakan kementerian, karena bila hal tersebut diberlakukan sama ke Indonesia.

**KETUA RAPAT:**

Mbak Riezky, anda tadi harusnya minta persetujuan Pimpinan dulu.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Oh, saya pikir tadi sudah oke.

**KETUA RAPAT:**

Ini momentnya ke Eselon I menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang lalu, nanti sudah selesai, ada waktunya untuk anggota. Saya seharusnya tidak membatasi, tetapi karena tatibnyak harus 3 menit ia silakan, kalau mau 5 menit tidak apa-apa. Itu tatibnya 3 menit, tapi kalau memang belum cukup bicara, boleh 5 menit. Dengarkan dulu penjelasannya Eselon I, baru nanti bertanya.

Jelas.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Ia saya ingin menambahkan saja Pimpinan. Masalah latar belakang kebijakan itu tadi sebenarnya.

**KETUA RAPAT:**

Nanti waktunya nanti.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Sekian saya Pimpinan.  
Oke, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Teman-teman harusnya kalau mau interupsi, harus melalui meja pimpinan. Ia kalau orang baru ia wajarlah.

Lanjutan Eselon I.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Selanjutnya Dirjen Perkebunan.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):**

Pimpinan, masih berkaitan dengan Horti Pimpinan, bukan pertanyaan, hanya mungkin tidak mencatat.

Ijin Pimpinan.

Untuk Dirjen Horti, diminggu lalu saya sampaikan tentang kita harus punya inventarisasi importasi pangan yang merugikan petani kita. Saya minta Dirjen Horti itu punya data dan saya yakin itu punya dan disampaikan. Apa import Bawang yang lain itu apa yang merugikan kita. Nah jadi mana yang merugikan petani kita. Nah disampaikan di kita agar kita lebih tahu tentang itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Haerudin sepertinya kemarin itu kalau tidak salah Dirjen Hortikultura datangnya terlambat ya, agak terlambat. Jadi nanti tanyakan minta datanya langsung ya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Interupsi Pimpinan.

Satu lagi Pimpinan, mumpung ingat pimpinan.

Interupsi-interupsi bukan tanya.

**KETUA RAPAT:**

Masalah pertanyaan lalu apa yang akan datang.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Bicara data tadi yang Pimpinan minta.

**KETUA RAPAT.**

Ya.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA):**

Oke.

Mumpung ingat Pimpinan dan Kementerian. Tadi bicara data BPS. Apabila memungkinkan, saya minta tolong ada Peta tidak, Peta data, Jawa Timur ini apa itu maksudnya, biar sekalian dikerjakan. Data BPS dengan Peta yang ada ini tersinkronisasi maksud saya nantinya, itu saja, biar tidak pakai Peta buta maksudnya. Peta Indonesia ini apa saja Indonesia ini Jawa Timur dan lain-lain apa.

Sekian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ia nanti Pak Sekjen akan menyiapkan tadi sudah janji, termasuk Petanya Pak Sekjen.

Ia terima kasih.

**DIRJEN PERKEBUNAN (KASDI SUBAGYONO):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Ijin Pak Menteri.

Menanggapi beberapa pertanyaan untuk Dirjen Perkebunan, yang pertama yang berkaitan dengan Kopra dari Ibu Alin. Kami sampai bu, bahwa untuk peningkatan dari pada harga, kita mengadakan bantuan untuk kita membina, sehingga ada hirilisasi. Jadi peningkatan nilai tambah sehingga harganya bisa dinaikan. Kalau menjual Kopranya memang harganya rendah.

Yang terkait dengan Sawit, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Firman kemarin berkaitan dengan Biodiesel, kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah telah meningkatkan dari b20 ke b30. Jadi pe 1 Januari 2020 besok, kita akan pada posisi b30. Kalau b30, itu artinya kebutuhan Sawit CPO kita sekitar 10 juta ton, saat ini baru 6 juta. Nah padahal produksi kita masih sangat besar untuk itu dan ini sekaligus memberikan satu jawaban terhadap penguatan pemanfaatan di dalam CPO di dalam negeri. Sehingga kita juga berkaitan dengan ekspor memungkinkan, tetapi dalam konteks Bio energy ini sangat terbuka lebar, bahkan kita sudah memiliki inovasi untuk b100 dan ini terus dikembangkan oleh kita.

Kemudian pertanyaan lain yang berkaitan dengan kebakaran, tadi juga disinggung oleh Pak Ketua. Kami sampaikan bahwa ada dua strategi utama, yang pertama berkaitan dengan preventif. Kami melakukan pembinaan sekaligus memberikan bantuan untuk mengembangkan mengoptimalkan pemanfaatan kebun yang dimiliki oleh rakyat, sehingga mereka menjaga kebunnya. Yang kedua, yang pencegahan memang kita dalam konteks operasionalisasi pemadaman Api, ada kelompok atau brigade yang kita sebut dengan kelompok petani peduli api dan itu bekerja sama dengan juga PNPB dan Kementerian Kehutanan.

Kemudian yang berkaitan dengan harga TBS, kami laporkan Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya, kenapa ada variasi diantara ini. Dan ini memang sedang kami tertibkan, sesungguhnya Kementerian Pertanian telah merilis Permentan 01 Tahun 2018 yang berkaitan dengan bagaimana perhitungan harga TBS dan ini sebagai bahan juga pengawasan kami untuk yang tidak memenuhi dari pada Permentan ini akan merupakan satu hal untuk bisa kami tegur kedalam pengawasan itu, sekaligus kita mintakan untuk konsisten di dalam konteks menerapkan Permentan 01 ini.

Kemudian yang terakhir, saya kira yang berkaitan dengan Karet. Juga ada pertanyaan, kenapa harganya terus menurun. Memang Bapak-Ibu sekalian seperti kita ketahui bersama. Penentu harga Karet di kita ini sangat dipengaruhi oleh harga internasional, dalam hal ini yang paling domain menentukan adalah Sicom Singapura dan juga Shanghai China.

Nah tiga hal upaya strategis yang sudah kita lakukan, dalam konteks internasional dengan ITRC (*International Tripartite Rubber Council*) antara Thailand, kita dan Malaysia membuat kesepakatan untuk menahan ekspor sejumlah 240 ribu ton. Itu yang kita sebut sebagai mekanisme AETS. Jadi tidak menahan ekspor dengan harapan supply di pasar global menurun, harganya bisa naik.

Yang kedua adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri, salah satunya adalah memanfaatkan karet untuk campuran aspal. Tetapi juga di aspek perhubungan juga banyak sekali penggunaan karet di dalam negeri ini untuk bisa dimanfaatkan misalnya untuk kanisir ban, pesawat dan sebagainya, pembatas jalan dan seterusnya.



Yang strategi yang ketiga adalah meningkatkan peremajaan karet kita. Kami laporkan bahwa ada potensi yang diremajakan 400 ribu hektar. Ini yang menjadi target di dalam peremajaan. Upaya konkrit untuk peningkatan harga Keret Bapak-Ibu sekalian. Kami laporkan juga bahwa Kementerian Pertanian membantu untuk melembaga kelompok perkebun Karet ini melalui lembaga yang disebut dengan UPPB (Unit Pengelolaan Pemasaran Bongkar) bahan oleh karet rakyat. Dan sampai saat ini sudah terbentuk 443 UPPB, tetapi yang terdaftar baru 322. Ini mau kita tingkatkan, kenapa, kita memberikan bantuan disitu untuk meningkatkan kualitas karet sehingga harga karet meningkat, yang biasanya dibeli hanya 6000-7000 bisa meningkat menjadi 9000. Sehingga ini menjadi upaya konkrit di dalam negeri untuk bisa kita meningkatkan harga karet rakyat kita.

Ini sementara beberapa tanggapan kami Bapak-Ibu sekalian.  
Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Kepala Badan Litbang ya.

**KA. BPP (FADJRY DJUFRY):**

***Bissmillahirrohmanirrohim***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan.**

Ini Pak Menteri menyampaikan beberapa saran, masukan, tanggapan.

Yang pertama dari Haerudin, S.Ag. MH. dan Pak Daniel Johan, terkait dengan penerapan sistem organik. Kami sepakat bahwa kedepan pertanian organik perlu kita kembangkan lebih masuk lagi, karena memang beberapa daerah kita di Indonesia ini kadar bahan organiknya sudah dibawah 20%. Oleh karena itu perlu juga akan mendorong petani-petani kita yagn sudah berusaha di organik karena kebutuhan akan permintaan pangan organik juga akan menjadi penting. Oleh karena itu penggunaan bahan organik harus tentunya secara simultan bersamaan, artinya pada saat penggunaan bahan organik juga menggunakan bahan organik.

Terkait dengan pertanyaan Pak H. Dedy Mulyadi, SH. Terkait dengan yang semangkin luas, kita sepakat bahwa pemanfaatan lahan pertanian sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009, tentang Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan. Oleh karena itu komitmen bersama dari pusat dan daerah, tentunya Gubernur dan Bupati sangat kita harapkan untuk menekan laju pertanian yang sangat subur.

Terkait dengan meningkatkan daya saing tanaman pangan. Badan Litbang Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun ini kita juga menyiapkan pada unggul baru yang khusus untuk ekspor. Beberapa contoh Padi yang sulit seperti contohnya kita sudah punya Beras Basmati. Ini hasil perkawinan Beras Basmati dengan Beras Lokal kita Pandan Wangi, sehingga kita punya Basmati yang beraroma. Beberapa yang lain juga kita sudah merilis juga Padi Japonica, Padi Jepang. Ini juga yang bisa kita dan beberapa komoditi yang lainnya yang sudah kita rilis. Kemarin kita merilis juga mangga, kitapunya Mangga-Pisang yang bisa diekspor dan Mangga Alpukat. Ini tentunya komoditi-komoditi yang ekspor kedepan. Untuk meningkatkan kualitas dan kita tentunya dari awal penggunaan beli bermutu, teknologi penyimpanan dan beberapa teknologi untuk meningkatkan daya hasil dan peningkatan hasil tanaman.

Terkait dengan pertanyaan Pak Firman Subagyo, penggunaan bahan bakar nabati. Badan Litbang Pertanian, kita sudah mempunyai biorektor untuk mengelola berbagai bahan bakar nabati menjadi minyak sawit dan kepala termasuk jarak pagar dan nyamplung dan ini alhamdulillah tadi disampaikan Pak Dirjen Perkebunan, kita sudah punya biorektor untuk mengubah CPO menjadi b100 dan ini dalam tahap proses penyempurnaan dan uji coba. Ini beberapa bulan ini kita sudah menguji coba untuk mesin-mesin alat mesin pertanian dan termasuk untuk roda dua dan roda empat.

Yang lain pertanyaan Pak I Made Urip, terkait dengan posisi kita terkait dengan BRG. Jadi Indonesia telah merifikasi protokol Undang-Undang nomor 21 Tahun 2004, yang mewajibkan semua BRG harus dikaji dulu oleh komisi keamanan hayati dan sebagai produk aman, pangan oleh tim teknis keamanan pangan oleh Badan POM dan setelah itu harus aman lingkungan oleh lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaan PP 21 Tahun 2005, peredaran paritas unggul BRG dan diatur dalam Permentan nomor 38 Tahun 2019. Peredaran BRG ini telah lolos pelepasan diawasi peredarannya oleh pemerintah tentunya dalam proses penerbitan.

Yang lain terkait dengan sinkronisasi riset dengan kementerian lembaga yang lain, Badan Litbang Pertanian dengan Kemenristekdikti jugas udah duduk bersama untuk menetapkan nasional. Jadi sehingga harapan kita tidak ada paling tidak meminimalisir tumpang tindih riset antara lembaga dan kementerian dan kita sudah sepakat, siapa mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab dengan siapa dan ini alhamdulillah sudah ditentukan dalam kegiatan 2020 Bapak Pimpinan untuk pangan hortikultura perternakan dan perkebunan.

Yang terakhir, terkait dengan pertanyaan Pak H.Yadi Srimulyadi. Adakah padi paritas yang bisa menghasilkan 12 ton per hektar. Beberapa paritas unggul baru yang

kita rilis, sudah memungkinkan untuk menghasilkan 12 ton perhektar, contohnya yang sudah kita rilis itu, paritas inparinam JT, inpari Padjajaran, Pamela, Hipa3, Hipa7 dan Hipa 14. Ini sementara kita kembangkan terus, sehingga bisa dikembangkan seluruh provinsi di Indonesia.

Itu mungkin Bapak Pimpinan anggota yang kami sampaikan.  
Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Saya mau menanggapi dulu sebentar.

Pak Kepala Litbang tadi ada mengatakan, sudah dirilis perhektar menghasilkan 12 juta ton, kira-kira tempatnya dimana. Jadi kalau bicara demplot, itu tidak bicara disini, tapi kalau bicara sawah yang luas, baru kita bicara disini. Kalau hanya bilang, oh setelah menghasilkan 12 ton, 10 ton, 12 ton ini sekian ton, tapi dalam demplot jangan dibicarakan, tidak perlu dilaporkan ditempat ini. Jadi yang mau saya tahu itu, realisasinya dimana tempatnya, berdasarkan hitungannya apa. Jangan nanti bicara 12 ton termasuk traktornya, termasuk orangnya yang ikut ditimbang.

la silakan Pak Haerudin.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Ini berkaitan dengan pupuk organik.

Pertama kita ingin minta statement dari Kementerian Pertanian melalui Litbang Pak Menteri. Dalam kondisi kawasan lahan kita, kualitas tanah kita hari ini seperti yang kita ketahui, kemarau sebentar sudah kering, artinya akar tidak mungkin tumbuh dan itu akibat dengan menggunakan pupuk kimia. Kita minta statement bahwa hari ini itu yang terpenting itu pupuk organik atau non organik untuk perbaikan lahan kita itu. Itu yang pertama. Karena kalau tidak, nanti akan dampak pada problem.

Yang kedua, komitmen dari Kementerian Pertanian, penggunaan pupuk organiknya. Kita akan lihat nanti dari sisi pertumbuhan pengadaan, pupuk organik yang ada Pupuk Indonesia Holding Company. Berapa mereka melakukan pengadaan dan berapa dari Kementerian Pertanian. Itu komitmennya.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

la dilanjutkan Pak Sekjen.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Lanjut Dirjen Peternakan.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Baik terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

***Mohon ijin Bapak Menteri kami menyampaikan.***

**Bapak ketua yang sangat kami hormati.**

Ada beberapa pertanyaan dari anggota yang kami hormati, terkait dengan kemitraan. Yang kedua terkait dengan pembagian aspirasi. Untuk pertama dari Bapak yang terhormat Bapak Ir. Refinsi Hanipar terkait dengan aspirasi itu, memang kami Tahun 2018 ada gagal melaksanakan pengadaan Sapi itu, sehingga dengan demikian kami seolah-olah wanprestasi terhadap sprit.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, tidak boleh mengatakan seolah-olah, jangan mengatakan seolah-olah, gagal atau tidak gagal, tidak ada kata seolah-olah.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Siap Pak Ketua.

Selanjutnya, untuk kemitraan, kami sebenarnya sudah kerja sama dengan KPPU, untuk mengatur bagaimana mengawasi kemitraan yang dilakukan oleh integrator dengan para peternak dan bukunya sudah selesai dan kami sudah edarkan.

Selanjutnya untuk penanganan Sapi , kekurangan daging kita, sebenarnya ada program kami disamping program siwab, kami sebenarnya juga kerja sama dengan Baharkam dari kepolisian, yaitu mengawasi pemotongan betina produktif kita, karena selama ini memotong betina produktif kita sesuai dengan data statistik, itu sekitar 240 ribu per tahun. Nah dari kita sebenarnya bisa tekan sampai 67% akibat pemotongan betina produktif. Kemudian kami juga berusaha untuk tetap bagaimana mendapat

dukungan dari DPR untuk bisa memasukan Sapi Indukan Pak. Sapi Indukan, karena sapi indukan ini adalah mesin-mesin produksi Sapi kita.

Yang ketiga, kami akan menguatkan untuk kerja sama integrasi Sapi-Sawit kita. Dari existing luas sawit kita itu sebenarnya 13,7 juta hektar. Dari 13,7 juta hektar itu, baru berisi 66 ribu ekor Sapi, setelah saya hitung sekitar 0,9%. Nah ketika kita bisa maksimalkan sampai 15-20% saja, kami merasa yakin bahwa kita bisa menekan paling tidak 50% impor itu. Kami tidak berandai-apa Pak, artinya kami harus hitung dengan hitungan yang komprehensif Pak ketua.

Terima kasih.

Terkait dengan import GPS, ada GPS sebenarnya kita sudah surplus terkait unggas ini. Kita surplus 1 juta ton telur, tetapi kita bermasalah, karena apa, harga murah, tetapi sekarang sudah pada harga sesuai HPP. Untuk unggas sebenarnya juga demikian, harga sudah sampai 18-20, sudah aman. Tetapi harga unggas ini seperti sekali turunnya. Nah ini yang kami sulit mengontrol. Ketika turun, kami dimarahi oleh peternak, ketika naik, kami dimarahi oleh pemerintah. Jadi disini menjaga supply demand ini yang benar-benar tetap stabil ini kami memang sulit. Untuk itu kami melakukan langkah-langkah seperti pemotongan. Jadi dengan demikian untuk menstabilkan harga. Itu sebenarnya yang kami lakukan.

Nah untuk itu terkait dengan GGPS ini, kami sebenarnya sudah mempunyai program Pak, untuk bagaimana kita menghentikan impor GPS, kita produksi sendiri dan ini sudah kita mulai, tapi belum ready di Subang dan jika Pak Ketua DPR ingin berkunjung kami akan undang Bapak untuk melihat langsung program ini. Kalau ini bisa jalan benaran itu Pak, ini juga nanti silakan Bapak yang menilai. Nanti kalau ini bisa benaran, kita bisa efisiensi sekitar 415 miliar/tahun terkait dengan impor GPS ini.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Interupsi Pak Ketua.

Hemanto Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Haerudin sudah dulu interupsnya ya, ia kasih Pak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.  
Selamat Pagi, siang.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh jajarannya, wabil khusus kepada Dirjen Peternakan.**

Pertama saya ingin menyampaikan, beberapa waktu yang lalu, kita ada program yang disebut dengan penggemukan. Tapi Sapi-sapi yang dikirim itu ke kelompok-kelompok petani, itu adalah Sapi-sapi yang sakit, macam-macam penyakitnya. Dia hanya bisa hidup hanya tiga hari di kandang peternak. Seminggu setelah itu berturut-turut mati, ada yang dapat bantuan 21, itu hanya sisa tinggal 9. Jadi kerjaan peternakan itu adalah membuat kuburan untuk menguburkan ternak-ternak yang mati itu. Nah ini catatan buat Dirjen. Saya pikir ini perlu kita perbaiki. Kalau untuk kelompok peternakan ini Pak Dirjen, jangan dibatas-batasi, jangan dikirim Sapi yang sakit dan mau mati.

Kemudian, ada lagi kasusnya itu pengirimannya dikirim dalam jumlah yang cukup, tetapi dengan kontrak itu akan diambil kembali jumlah beberapa, kemudian nanti janjinya akan dikembalikan lagi. Tapi sampai sekarang itu kelompok peternaknya tidak pernah menerima sapi kembaliannya itu. Itu kemana sapinya, apakah dia berjalan-jalan keteman yang lain itu. Jadi ada yang mati, ada yang catatan bukunya lengkap.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Sebentar Pak Sudin.

Terus yang ketiga, saya ingin catatan kepada Dirjen. Itu yang namanya Ayam itu perlu dicermati, pasarnya itu adalah pasar oligopolistik, hanya beberapa perusahaan yang berkuasa disektor itu. Sementara kelompok-kelompok peternak Ayam rakyat itu, itu selalu dirugikan oleh permainan, perusahaan-perusahaan yang bersifat oligopolistik ini. Saya minta, pemerintah melalui Menteri dan juga melalui Presiden, ini perlu ditata kembali ini, supaya pasar ini menguntungkan rakyat juga peternak-peternak kecil itu.

Demikian Pak Ketua.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

## **KETUA RAPAT:**

la terima kasih.

Jadi mohon teman-teman selesaikan dulu jawaban Eselon I, kemudian nanti ada pertanyaan khusus anggota dewan.

Lanjutkan Pak Sekjen.

## **SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Lanjut Dirjen PSP.

## **DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

***Bismillahirrohmanirrohim.***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Bapak Pimpinan dan para Anggota yang terhormat dan kami banggakan.**

Beberapa hal yang ingin kami jelaskan, yang pertama yang berkaitan dengan pupuk organik. Ini usul dari Pak Haerudin, terima kasih Pak. Jadi kami konsisten bahwa kami ingin mengembalikan struktur dan kesuburan tanah. Untuk 2020 kami sudah mengalokasikan untuk pupuk organik dari anggaran subsidi itu 1 triliun Pak, dari 2019 600 miliar. Jadi 2020 1 triliun rupiah. Maksudnya agar nanti secara perlahan petani itu mengerti bahwa pupuk organik tersebut penting untuk mengembalikan struktur tanah dan kesuburan tanah.

Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Pak Haerudin dan Pak Selamat, terima kasih kaitannya dengan pupuk organik. Kemudian yang kedua, kaitan dengan infrastruktur, ini dari Pak Fadholi dan Pak Hermanto.

Yang pertama kaitan dengan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi yang juga banyak usulan dari anggota dewan dan alhamdulillah kita sampai saat ini sudah membangun atau merehabilitasi lebih kurang 3,14 juta hektar dari target 2019 itu 3,274 juta hektar. Dan untuk tahun depan 2020, kita juga mengalokasikan rehabilitasi atau pembangunan jaringan irigasi tersier lebih kurang 250 ribu hektar.

Kemudian yang kedua, masih dalam pertanyaan tersebut berkaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan, juga kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka untuk mengantisipasi kekeringan di beberapa wilayah walaupun belum semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terbangun lebih kurang 3 ribu unit dari target 3700 unit dan di 2020 masih kita anggarkan untuk program kegiatan perpipaan dan perpompaan. Juga untuk

pembuatan Embung. Embung ini kami bangun sebagai bank air. Jadi bisa menampung air hujan juga menampung sumber-sumber atau mata-mata air, kita tampung dalam Embung kemudian kita juga membuat book dan disalurkan ke sawah-sawah masyarakat, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan pada saat kemarau atau musim kemarau. Dan sampai saat ini kami sudah membangun lebih kurang 12.587 unit, juga di 2020 masih kita anggarkan untuk pembangunan Embung, Long Stories.

Kemudian kaitan dengan cetak sawah. Tadi juga banyak ditanyakan oleh anggota. Kami sampaikan bahwa cetak sawah 2015-2018, itu sudah mencapai 2 ribu 19 ribu, 146,74 hektar dari target 225 ribu 147 hektar, sisanya dianggarkan 2019. Kemudian untuk 2020.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Siap Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tadi ada mengatakan alokasi 2015 sampai 2019. Betul cetak sawah?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Cetak sawah realisasi.

**KETUA RAPAT:**

Berapa hektar?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Realisasi 2015-2018, berdasarkan catatan yang ada pada kami, 219 ribu 146,74 hektar Pak.

**KETUA RAPAT:**

Itu berapa triliun.



**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Ini lebih kurang kali 18 juta per hektar.

**KETUA RAPAT:**

Kok Bapak memang tidak punya catatannya

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Ada Pak, 3,3 triliun rupiah.

**KETUA RAPAT:**

Begini, saya bukan ahli pertanian, tapi saya yakin yang di depan saya ini semua ahli dan jago pertanian. Tolong jelaskan cetak sawah itu apa. Jangan cetak sawah cuma gusur, gusur, gusur, bikin galangan, terus kalau tidak ada airnya dari mana, saluran airnya bagaimana, irigasinya bagaimana. Kita cek kelapangan. Ini saya tidak mengerti masalah pertanian, cuma saya mau tau, cetak sawah itu dari apa saja. Kalau kita bangun rumah ada tembok, ada pintu, ada jendela, ada atap, ada kaca. Nah kalau cetak sawah itu apa saja. Karena selama ini belum ada jawaban yang konkrit dan pasti. Tolong nanti saja dijelaskan.

Terima kasih.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Siap Pak Pimpinan, terima kasih.

Kemudian kaitan dengan optimalisasi lahan. Itu ada pertanyaan juga dari Pak Ikhsan kalau tidak salah kita tahun ini membuat failed projek itu lebih kurang 4 ratus 4 ribu hektar, yang tersebar Sumtra Selatan 200 ribu hektar, di Kalimantan Selatan 120 hektar, di Kalimantan Tengah 25 ribu hektar, kemudian Lampung 25 ribu 604 hektar dan di Sulawesi Selatan 33 ribu 505 hektar. Ini tujuan dari optimalisasi lahan sawah ini yang pertama untuk meningkatkan pertanaman. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan provitas dah alhamdulillah yang sudah kita optimalkan dari tanam satu kali sudah bisa tanam dua kali dan provitasnya pun meningkat dari rata-rata 2-3 tahu/hektar awalnya, sekarang sudah 5,5 ton/hektar.

Kemudian yang ketiga, kami sampaikan juga bahwa potensi lahan rawa di Indonesia itu, ada lebih kurang 34 juta hektar dan berdasarkan hasil penelitian dari ahli

tanah itu ada lebih kurang 19 juta hektar yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian produktif, sehingga mudah-mudahan kedepan, program optimalisasi lahan rawa ini bisa dilanjutkan dan memang dilanjutkan di Tahun 2020 ada lebih kurang 100 ribu hektar.

Kemudian kaitan dengan luas lahan baku sawah nasional yang merupakan program 100 hari Bapak Menteri Pertanian. Ini ada dari Pak Endro, Pak Efendy dan Pak Ichsan. Kami sudah diberi waktu sampai dengan 1 Desember sudah ada satu data yaitu lahan baku sawah. Lahan waktu sawah dan kami sekarang sedang melakukan validasi kekurangan lebih kurang 650 ribu hektar berdasarkan perbedaan antara BPN Tahun 2013 dibanding dengan SK PPN 2018. Kami sudah melakukan rapat di beberapa putaran dengan BPS, BPN dan alhamdulillah dari 7,105 juta hektar ini, sekarang posisinya sudah 7 juta 206 ribu hektar. Jadi sudah naik lebih kurang 100 ribu hektar dan tim kami dari Kementerian Pertanian PPN dan BPS sedang masih di lapangan Pak untuk melakukan validasi lahan baku sawah ini, mudah-mudahan tanggal 25 November ini sudah final dan nanti tanggal 1 Desember sudah siap diumumkan.

Kemudian selanjutnya kaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini pertanyaan dari Pak I Made Urip dan Pak Hermanto. Bahwa kita sudah mensosialisasikan untuk Undang-Undang 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, juga berdasarkan Perpres nomor 59, kaitan dengan percepatan penetapan sawah berkelanjutan dan ahli fungsi lahan, ini sudah kita sosialisasikan ke Dinas-dinas Provinsi dan Kabupaten dan alhamdulillah ada lebih kurang 221 kabupaten itu sudah membuat RT/RW nya dan luas lahan kita yang sudah LP2B kan lebih kurang sudah 6 juta hektar Pak, berdasarkan catatan dari Kabupaten-kabupaten yang sudah mengajukan.

Kemudian banyak juga dari Dinas-dinas yang mengajukan revisi kaitan dengan LP2B ini juga dari anggota-anggota DPRD, ini cukup banyak dan belum kami respon, karena memang bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Sutrisno, Pak Andi Akmal kaitan dengan pupuk bersubsidi. Jadi pupuk bersubsidi ini mulai dari 2019 ini kita melakukan melalui elektronik RDKK. Jadi rencana defenitif data kebutuhan kelompok mulai dari bawah dibuat oleh petani, diampingi oleh penyuluh, kemudian direkap oleh kelompok tani, kemudian direkap lagi oleh BPP, dari BPP diserahkan ke Kabupaten, disana ada Kepala Seksi penyediaan sarana-prasarana pertanian, kemudian dari dinas kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat. Kemudian kami di pusat di Rektorat Jenderal PSP, melakukan rekapitulasi dan kami sampaikan kembali kemasing-masing provinsi sesuai dengan usulan RDKK tersebut, berupa kuota per provinsi. Kemudian provinsi memetakan ketinggian kabupaten dan kabupaten memetakan ketinggian ke kecamatan dan desa. Mudah-mudahan dengan pola RDKK ini, tidak ada lagi kelangkaan pupuk.

Itu Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian penebusan pupuk melalui kartu tani, kami sudah melakukan rapat dengan Menteri Perekomian dan efektif akan diberlakukan Tahun 2020 mungkin secara bertahap, karena ternyata di lapangan ada beberapa kendala yang pertama sinyal di beberapa desa itu sulit. Kemudian yang kedua, memang para petani lupa nomornya. Dan yang ketiga ada juga yang terselip kartunya. Dan berdasarkan data yang masuk ke kami, sudah lebih kurang 10 juta RDKK yang sudah diakses oleh bank pemerintah baik BNI, BRI dan Bank Mandiri selaku pelaksana kartu tani dan yang sudah dimasukkan ke dalam program itu lebih kurang 6 juta, 6 juta kartu tani dan mudah-mudahan ini bisa awal dari pelaksanaan kartu tani di 2020.

Kemudian kaitan dengan asuransi pertanian. Ini pertanyaan dari Pak Suhardi, ini kami sudah melaksanakan. Target asuransi setiap tahun kita alokasikan 1 juta hektar untuk padi, kemudian untuk ternak 127 ribu hektar, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimum, karena rata-rata realisasi 80% paling tinggi. Dalam asuransi pertanian ini, para petani hanya membayar 36 ribu rupiah atau 20%, karena yang 80% nya sebesar 144 ribu rupiah itu disubsidi oleh pemerintah atau dibayar oleh pemerintah. Dan apabila terjadi kekeringan atau banjir atau terkena hama eksplosif atau terkena eksplosif hama dan penyakit, maka para petani diganti oleh Bank Jasindon sebagai bank asuransi yang kita tunjuk bank pemerintah sebesar 6 juta rupiah/hektar/musim tanam. Jadi hanya membayar 36 ribu rupiah dapat penggantian 6 juta rupiah/hektar/musim tanam.

Kemudian asuransi ternak juga demikian, hanya membayar 40 ribu rupiah, karena yang 160 ribu rupiah dibayar pemerintah, ini untuk asuransi ternak per ekor/tahun dan apabila mati atau hilang, itu bisa diganti 10 juta/ekor/tahun. Kemudian kaitan dengan bank tani. Ini pertanyaan dari Ibu Endang. Ini sudah kita inisiasi bu. Jadi bank tani itu program jangka panjang mungkin, karena memang persyaratannya banyak. Untuk jangka pendek kita melingkar, kita punya lebih kurang 7048 LKMA yang pecahan dari PUAP, PUAP itu kita mempunyai 52 ribu gapoktan. Kemudian yang masih hidup itu 7048, yang 7048 itulah yang kita alihkan ke bank pemerintah, baik BNI, BRI maupun Bank Mandiri dan bank-bank lain yang berminat. Sehingga diharapkan akses pembiayaan petani melalui LKMA agar bisnis di pedesaan agar nantinya akan kita tempatkan BPP sesuai dengan konsep Pak Menteri, kita merupakan satu komando di BPP itu akan mudah-mudahan akan lebih efektif.

Barangkali itu hal-hal yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Selanjutnya mudah-mudahan yang terakhir ini Kepala BPSDMP.

**KEPALA BPPSDMP (DEDI NURSYAMSI):**

Baik, terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang kami hormati Bapak Ketua, kemudian juga Bapak-bapak, Ibu-ibu Komisi IV semuanya, Bapak Menteri dan rekan-rekan sekalian.**

Terkait dengan SDM, ini sepertinya banyak sekali pertanyaan. Namun demikian saya kelompokkan pertanyaan tersebut, yang pertama mengenai penyuluh, ini pertanyaan dari Bapak Firman, Bapak Suhardi, Bapak Sunarna, Bapak Johan dan Bapak Daniel. Kemudian terkait dengan konstratani, ini ada pertanyaan dari Bapak Hermanto. Kemudian petani muda atau petani milenial, ini agak banyak. Pertanyaan dari Ibu Nuraini, Ibu Lulu, Pak Yadi, Ibu Yesi dan Pak Slamet. Kemudian mengenai aspirasi, ini Bapak Efendy dan Bapak Salim Fachri dan terakhir mengenai penganggaran dari Ibu Endang.

**Baik Bapak-Ibu sekalian.**

Pertama terkait dengan penyuluh. Ini terkait dengan kuantitas penyuluh, kualitas, kapasitas, BOP, kemudian mengenai afiliasi politik. Terkait dengan kuantitas seperti yang ditanyakan oleh Bapak Daniel Johan, memang betul Pak kami ini penyuluh ini memang masih kurang, kalau petokannya satu penyuluh satu desa, memang masih kurang Pak sampai saat ini. Kemudian disaat yang sama, penyuluh kita banyak yang sudah senior Pak. Jadi dua, tiga tahun, empat tahun kedepan, banyak yang pensiun. Nah terkait dengan ini, Bapak Menteri sudah memerintahkan kepada kita untuk mengajukan pengadaan formasi begitu. Yang pertama itu.

Kemudian yang kedua, yang sudah dan sedang kita lakukan adalah kita mendorong tumbuhnya atau lahirnya penyuluh swadaya. Jadi penyuluh swadaya ini kan hampir tidak membebani APBN, tapi di lapangan ini justeru sangat efektif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan itu alhamdulillah sampai saat ini penyuluh swadaya itu lebih dari 20 ribu orang yang sudah tumbuh dan berkembang.

Kemudian terkait dengan kapasitas penyuluh. Betul Pak, jadi ini yang sedang kita genjot. Yang sudah kita lakukan adalah pelaksanaan Bintek untuk penyuluh dari berbagai kegiatan kita, baik yang PHLN maupun APBN, kita banyak melakukan Bimtek terhadap penyuluh melalui kegiatan misalnya kemudian yang APBN nya juga kita banyak melakukan bimtek terhadap para penyuluh. Nah yang tidak kalah penting mulai dari 2019 ini, ada program Kostratani (Comando Strategis Pembangunan Pertanian) sampai dilevel kecamatan. Justeru ini objek bimtek kita adalah penyuluh terutama dan

petani tentunya. Jadi kita tingkatkan kapasitasnya Pak, itu melalui berbagai bimtek tematik, misalnya sekarang akan dikembangkan IT untuk setiap BPP melalui program Kostratani, dimana IT tersebut akan tersambung dengan AWR yang ada di Kementerian Pertanian melalui pemanfaatan IT internet dan sebagainya. Kemudian disaat yang sama kita juga akan memberikan bimtek terkait dengan tematik Pak, bagaimana meningkatkan produktivitasnya misalnya untuk Padi, untuk Jagung dan lain sebagainya.

Kemudian terkait dengan biaya operasional, honor dan sebagainya. Jadi hingga saat ini, termasuk 2019, alokasi untuk BOP honor THL, TBPP masih dianggarkan di Kementerian Pertanian dan itu diperpanjang 2020 juga demikian termasuk yang teman-teman THL-TBPP yang PPPK Pak. Yang PPPK untuk 2020 kita perpanjang kontraknya.

**KETUA RAPAT:**

Itu honorinya berapa Pak?

**KEPALA BPPSDMP (DEDI NURSYAMSI):**

Untuk BOP itu antara 320-480 ribu ya, tergantung kualifikasi penyuluhnya.

**KETUA RAPAT:**

Itu belum termasuk honor?

**KEPALA BPPSDMP (DEDI NURSYAMSI):**

Untuk honorinya 2 juta/orang yang THL itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tidak salah?

**KEPALA BPPSDMP (DEDI NURSYAMSI):**

Ia sekitar 2 juta betul.

**KETUA RAPAT:**

Jangan sekitar Pak, karena ini menyangkut cukup tidak cukup Pak. Kalau satu hari saja mereka membeli Bensin, makan 50 ribu dikali 20 hari, sudah satu juga, kalau Bapak bilang perkiraan, kok sepertinya gimana si Eselon I. Ada panduannya, berapa honorinya yang diberikan kepada THL, jangan kira-kira, ini, itu kan ada panduannya Pak dan Bapak juga kalau membebankan ke Provinsi, ada Provinsi, Kabupaten yang tidak membayar BOP nya. Maksud saya yang jelas Pak kalau bicara, oh ini sekian, ini sekian. Kalau nanti ini Bapak-bapak anggota dewan ini pulang ke kampung, bertemu penyuluh ditanya, berapa si honorinya, kira-kira sekian. Tolonglah Pak.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Saya bantu Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

S1, 2 juta, DIII, 1,6, SLTA, 1,2 ditambah BOP, BOP tergantung wilayah barat 320, tengah 400, wilayah timur 480.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Teman-teman itu panduan dari Pak Sekjen, karena ini beliau ini sekian puluh tahun di SDM. Jadi perlu diketahui. Jadi kalau nanti pulang ke kampung, ditanya bisa menjelaskan, jangan nanti di kampung, Bapak dewan, Ibu dewan yang dianggapnya apa, Bapak-Ibu cuma bicara saja, kenyataannya tidak begitu, karena memang tidak pernah dapat info. Betul tidak Pak Menteri. Kasihanlah. Kalau di Pulau Jawa tidak bicara. Kalau di kampung saya di Tulang Bawang itu, itu kalau jalan memberikan penyuluhan bisa 50 kg Pak, 50 kg paling cepat 2 jam itu alhamdulillah kalau sampai Pak, kalau tidak kecemplun kesungai Pak. Ini lho tolong. la lanjutkan.

**KEPALA BPPSDMP (DEDI NURSYAMSI):**

Baik Pak Ketua siap ditindaklanjuti, nanti saya akan baca lagi.

Kemudian mengenai afiliasi politik, ia sebetulnya sudah ada PP 42 Tahun 2004, bahwa penyuluh itu tidak terlibat politik. Kemudian bahwa misalnya di lapangan masih ada, nah ini barangkali pembinaan yang harus kita tingkatkan terus.

Nah kemudian juga ada usulan mengenai penyuluh ditarik lagi ke pusat. Nah ini sampai saat ini memang Undang-Undang 23 Tahun 2014, untuk penyuluh pertanian posisinya ada di daerah di kabupaten/kota. Nah terkait dengan usulan tadi, ini sedang kita kaji Pak, bagaimana mana follow upnya. Kemudian mengenai kostratani, ini dari Bapak Hermanto ya, ini istilah nama, dipertimbangkan Pak, barangkali nanti kita akan diskusikan lagi dan dikonsultasikan dengan Bapak Menteri. Tetapi substansinya sebetulnya sudah memuat apa yang Bapak sarankan. Jadi intinya substansinya untuk kostratani ini adalah yang pertama penguatan sarana-prasarana, termasku bangunan BPP kemudian juga peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, peningkatan kelembagaan, kemudian bimtek dan sebagainya.

Terkait dengan petani muda, ini yang dipermasalahkan saya kira memang betul semua ya, jadi jumlahnya saat ini sedikit dari 31 juta petani kurang lebih 2,7 juta, itu petani muda, artinya sekitar 8% saja petani kita yang memang berumur muda, bahkan diantaranya banyak petani yang telah berumur lebih dari 50 tahun. Nah ini kemudian yang kedua, minat. Minat petani muda ini semangkin menurun terhadap pertanian. Kemudian yang ketiga ini masalah regenerasi. Bapak-Ibu sekalian, yang sudah sedang kita lakukan, itu melalui program PWMP (Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian). Jadi melalui program ini, ia kita rekrut para petani muda untuk berbisnis sehingga nanti dia bisa mandiri. Nah selain itu sebetulnya di Kementerian Pertanian juga sudah melakukan bimtek atau pendidikan vokasi dan penumbuhan P4S termasuk di dalamnya magang Pak. magang-magang para petani muda ke negara-negara yang memang pertaniannya sudah maju, seperti Jepang, Taiwan dan lain sebagainya.

Kemudian juga di Kementerian Pertanian itu adalah politeknik pembangunan pertanian dan SMK KPP. Nah politeknis pembangunan pertanian kita ada 7 ya, yaitu ada berada di Medan, kemudian di Bogor, Jogja, Malang, kemudian di Manokwari. Ia saya kira. Kemudian ada di Palembang, kemudian ada di Banjarbaru. Nah ini semuanya menghasilkan para petani mudah Pak, yang siap untuk menjadi job creator dan job seeker. Jadi kita terus bangun itu para petani muda untuk mencitai dan berusaha disektor pertanian.

Kemudian untuk tahu ini dan kedepan, kita ada program di kostratani, yang salah satu objeknya adalah juga membangun petani milenial ini, agar kemampuan pengalaman yang meningkat dalam berbisnis pertanian. Kemudian terkait dengan aspirasi. Saya pikir ini kita akan tindaklanjuti, apalagi untuk program kostratani kita akan genjot besar-besaran ya. 2019 saja kita ada 534 BPP yang akan kita akan genjot di dalam program kostratani. Kemudian 2020, ada 3500 kostratani, sehingga sampai 2020

kurang lebih ada 4 ribu. Jumlah kecamatan kita kurang lebih sekitar 7100 kecamatan, nah yang ada BPP nya kurang lebih 5600. Jadi memang belum semua kecamatan ada BPP nya. Nah hal ini disebabkan karena memang ada kecamatan pemekaran. Nah biasanya kecamatan pemekaran ini memang belum ada BPP nya, karena baru. Nah selain itu juga ada kecamatan yang memang tidak berpotensi untuk pertanian, terutama di Ibu Kota atau di Ibu Kota Provinsi.

Kemudian terkait dengan penganggaran. Ini pertanyaan dari Ibu Endang. Tahun 2019 kurang lebih badan SDM ada 1,7 triliun rupiah Ibu Endang. Kemudian 2020, 2,04 triliun. Jadi ada peningkatan kurang lebih 340 miliar, ini terutama peningkatan untuk alokasi kostratnai bu, untuk kostratani BPP di 3500 BPP.

Saya kira demikian Pak Sekjen.  
Terima kasih.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Interupsi Ketua.  
Hermanto Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sekali saja ya interupsinya habis ini ya. Habis ini jangan interupsi lagiya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Sekali saja Pak Ketua.  
Terima kasih Pak Ketua.

Kementerian terutama SDM, selalu luput membahas tentang (Sarjana Membangun Wirasa Desa Pendamping) SMDWP. Saya pikir ini tidak pernah ada pembahasan secara detail dan bahkan tidak pernah disini disinggung. Padahal peran mereka ini, ini luar biasa. Saya minta ini diperhatikan nasibnya Pak, karena sejauh ini mereka ingin bekerja, tapi perhatian dari pemerintah sangat minim terutama terkait dengan pengakuan-pengakuan statistik. Nah ini saya minta supaya ini harus dijelaskan statusnya, sehingga mereka ini lebih bersemangat.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Swadaya. Swadaya ini satu saja aspirasinya Pak. Mohon diperhatikan kesejahteraannya itu. Tadi Bapak mengatakan ini tidak terlalui membebani APBN. Saya pikir ini pun juga bentuk ketidak pedulian kita, kalau disebut kalau tidak menjadi bebann. Padahal mereka juga setiap hari berada di



petani, kemudian setiap saat petani kalau ada apa langsung bertemu penyuluh swadaya ini. Saya pikir ini perlu diperbaiki.

Yang ketiga terkait juga dengan soal penyuluh yang kategori termasuk PPPK. Nah ini kebijakan ini kan harus ada pembiayaan di Pemprov kan atau di Pemerintah Daerah. Tolong Pak perhatikan, sampai sekarang mereka ada yang belum mendapatkan pembayaran-pembayaran atas apa yang sudah kita putuskan disini, baik oleh Pemprov maupun juga oleh Kabupaten/kota. Nah ini mereka sudah kita putuskan sebagai PPPK, tapi kesejahteraan dia, penghasilan mereka, tidak kita perhatikan. Jadi sampai saat ini juga kita dzolim ini. Kita dzolim mempekerjakan penyuluh tapi tidak kita perhatikan kesejahteraannya.

Kemudian yang terakhir Pak ketua. Hal-hal yang terkait dengan apa yang kita bantu kepada petani, baik yang bersifat SDM maupun program, harus diperhitungkan multi efeknya apa, jangan sampai kita cuma menganggar-anggarkan seperti sebagai membagi-bagikan uang saja. Jadi ini tidak baik. Jadi harus ada pengawasan, harus ada pembinaan, sehingga anggaran yang kita gelontorkan kepada petani itu, ada multi efeknya dan harus ada juga, jangan sampai kita ini membuat anggaran besar-besar, tapi tidak ada bentuk wujudnya kepada perbaikan nasib miskin di sektor pertanian.

Demikian Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Tadi Pak Andi mau bertanya Pak Andi. Karena Pak Andi ini habis ini mau rapat Banggar, supaya kalau bisa nanti ada APBNP, Kementerian Pertanian dapat alokasi tambahan, tapi kalau tidak, nanti suruh pindah ke Komisi XII.

#### **F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri beserta dengan jajaran,  
Pak Pimpinan Komisi IV dan anggota,**

Pertama tanggapan dari Pak Menteri dan seluruh Dirjen saya bisa pahami dari pertemuan kemarin. Saya cuma memberikan catatan, masukan agar Pak Menteri mengemban amanat tugas negara 2020 kedepan ini menjadi lebih sukses, harapan kita ditangan Pak Menteri inilah sebenarnya kebutuhan pangan, negeri kita, rakyat kita itu. Oleh kerana itu saya ingin memberikan catatan:

Yang pertama, sampai dengan bulan sekarang, pencapaian realisasi anggaran baru 74%. Saya kira ini menjadi catatan, karena Menteri Keuangan nanti kedepannya akan memberi pagu anggaran kepada kementerian, berdasarkan berapa anggaran yang bisa direalisasikan serapannya. Saya khawatir nanti kalau tidak mencapai 99%, 21 triliun akan turun lagi anggarannya nanti 2021 begitu. Ini kekhawatiran saya yang pertama.

Yang kedua, saya bisa memahami adanya rencana pergeseran antar Eselon I Pak Menteri. Karena Pak Menteri pasti punya visi-misi bagaimana target 2020 bisa tercapai begitu. Dan memang APBN kemarin 2020 kita sahkan oleh menteri yang lama, oleh karena kita bisa pahami. Tinggal bagaimana nanti dari Badan SDM dan badan Litbang bisa memberikan penjelasan, terutama kepada kami Fraksi PKS, apa saja alokasi anggaran ini untuk 2020 itu Pak Menteri.

Yang ketiga Pak Ketua. Saya juga ingin memberikan masukan untuk konstatatani. Saya kira ini sangat bagus sekali kostratani ya. Tinggal bagaimana manajemen koordinasi dan pengelolaan dengan Bupati, sebagaimana kita ketahui bahwa otonomi daerah ini sekarang di kabupaten ditangan Bupati itu. Kita tahu bahwa balai penyuluhan pertanian itu di kecamatan di bawah kewenangan Bupati. Tapi saya yakin Bapak Menteri mantan Gubernur ini bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan para Bupati, para Gubernur, sehingga program Kementerian ini bisa tercapai begitu.

Yang terakhir Pak Menteri. Kita tahu bahwa selama ini impor pangan kita, harus sebelum-sebelumnya itu harus ada persetujuan dari Menteri Teknis, apakah Menteri Pertanian, Menteri KKP. Tapi dua tahun terakhir ini, ada kebijakan ditingkat pemerintahan, hanya diputuskan oleh Menteri Perdagangan Menko Perekonomian. Ini bahaya saya kira. Kenapa, karena satu sisi Menteri Teknis mengatakan, kita cukup beras kita, Jagung kita, tapi oleh menteri yang bukan teknis yang tidak tahu berapa datanya, dia menyetujui saja. Seperti hai ini ada 1 juta ton busuk di Gudang Bulog, karena kesalahan pengambilan keputusan dan di Komisi IV kemarin sudah memutuskan, kita tidak setuju dengan adanya impor beras, tapi tetapi diimpor 2 juta ton. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap 1 juta ton beras di Gundang Bulog sekarang, nilainya triliunan. Inilah salah satu contoh Pak Menteri. Saya ingin Bapak Menteri Pertanian berbicara dengan Presiden, agar namanya impor pangan harus melalui persetujuan Menteri Teknis, sehingga impor itu bisa dilakukan.

Saya kira itu saja Pak Ketua yang saya sampaikan, saya mohon maaf, karena ada rapat ditempat di tempat lain.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam.***

Pak Sekjen sudah selesai semua.

Saya pikir alangkah baiknya kita Ishoma dulu Pak Menteri, karena ada yang mau Sholat, ada yang mau makan siang. Nanti kita kembali keruangan ini Pukul 13.30.

Saya skors.

**Rapat diskros.**

**Skors dicabut.**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa setiap anggota diberikan waktu 3 menit. Saya ingatkan lagi waktunya 3 menit, menurut Tatib.

Silakan.

Yang pertama Pak Lema.

Silakan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,**

**Yang terhormat Pak Menteri Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya,  
Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.**

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya memberikan apresiasi terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga jajaran terkait dengan berbagai jawaban.

Catatan saya terkait dengan itu hanya satu, Pak kalau boleh bicara dengan data dan data itu kita ingin lihat per Kabupaten/kota, sehingga kemudian kita tidak bicara tanpa dasar yang akurat dan valid.

Yang kedua Pak, saya akan bicara khusus menyoroti kaitan ataupun kontribusi sektor pertanian terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan terutama di Provinsi saya di Nusa Tenggara Timur Pak. Kalau kita bicara Nusa Tenggara Timur, itu kita

bicara banyak orang miskin di sana Pak. Saya akan bicara menggunakan data-data yang disampaikan oleh BPS. Kalau kita lihat angka kemiskinan nasional, itu dari tahun ketahun menurun, IPM selalu naik, tetapi tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di NTT. Di NTT itu kemiskinan, itu konstan, statis, bahkan kemarin naik 0,06%. Artinya ada kenaikan sebanyak 12 ribu penduduk. Lalu pertanyaannya siapa yang miskin di NTT ini. Yang mayoritas di NTT itu mereka yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencariannya Pak, padahal kita ketahui selama 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kallah, Pak Jokowi itu hampir 12 kali sudah ke NTT, kenapa, karena beliau tahu bahwa NTT sebagai daerah miskin. Ini harusnya mendapatkan afirmatif policy dan afirmatif action.

Tetapi apa hasilnya terkait dengan angka pengurangan kemiskinan tidak signifikan hasilnya Pak. Saya akan bicara langsung, ada 7 bendungan terkait dengan infrastruktur yang dibangun di NTT. Total dari 7 bendungan itu angkanya 5,9 triliun Pak. Tetapi ketika kita bicara tentang pembangunan bendungan, yang paling mayoritas mendapatkan dampak, itu adalah pertanian lahan basah. Betul NTT kurang air, dengan membangun bendungan masyarakat mendapatkan air, perikanan air tawar juga ada manfaatnya. Tetapi kalau kita bicara NTT Pak, NTT itu sejatinya adalah lahan kering Pak. Jumlah lahan kering di NTT hari ini itu ada 1,3 juta hektar. Sementara yang terdampak dari 7 bendungan ini, itu hanya 214 ribu hektar dan sampai hari ini saya belum melihat. Ada visi besar, ada grand desain, ada road map, terkait dengan bagaimana membangun pola pemberdayaan pertanian di lahan kering ini Pak, dan kemiskinan, itu mayoritas ada sekitar 1,1 juta penduduk NTT yang miskin, itu semuanya adalah petani Pak dan petani lahan kering.

Di NTT sudah banyak diberikan traktor macam-macam lah benih pupuk dan seterusnya Pak. Tanah di NTT itu keras Pak. Traktor itu dia tancap ketanah, paling 40 cm Pak, yang ada ujung traktor itu rusak. Saya sudah mengecek ke 22 Kabupaten/kota di NTT. Kalau mau buka lahan harus pakai Excavator, kenapa, karena 40 cm itu Pak kelihatannya bagus tanah sudah gembur, begitu ditanam Pak, ternyata ilangnya itu tumbuhnya lebih cepat begitu dikasih pupuk dan dikasih air. Karena itu Pak, mewakili rakyat NTT, saya mohon perhatian dari Pak Syahrul Yasin Limpo, saya juga ingin tahu bagaimana keseriusan dari Kementerian Pertanian ini, untuk membangun pertanian lahan kering di NTT yang angkanya 1,3 juta Pak, dan itu kalau dikonversi kalau ini bisa digerakan, akan membantu NTT untuk bisa keluar dari kemiskinan ini.

Manfaat laini dari excavator ini Pak, dia bisa tancap 1 meter ke bawah, tanah menjadi gembur. Dan kalau tanah gembur Pak, tanah akan mampu untuk menangkap air Pak. Jadi ini juga cara yang paling efisien dan efektif untuk menangkap air, NTT ini kekurangan air. Yang berikut kalau lahan sudah dibuka, saya hitung saja ada 22 Kabupaten di NTT. Kalau satu kabupaten itu katakanlah 250 hektar, satu hektar itu,

biaya excavatornya cuma 3 juta, itu artinya cuma 75 M Pak. Bandingkan dengan 7 bendungan, yang dibangun menghabiskan anggaran hampir 6 triliun Pak. Sementara dampak dari pembangunan itu, itu hanya dua ratusan ribu hektar Pak. Dan penggunaan excavator ini memang tidak lazim, karena ini alat berat tidak terbiasa dalam referensi di ilmu pertanian, tetapi tanah NTT butuh excavator Pak. Kalau setelah dibuka, lahan sudah semangkin gembur, baru kemudian traktor itu bisa masuk untuk meratakan ini Pak. Karena itu menurut saya Pak, harus ada perubahan secara revolusioner untuk pengembangan pola pertanian lahan kering di NTT, baik para level paradigma itu kita harus berubah, level regulas dan kebijakan harus berubah, level aksi dan implementasinya juga harus berubah.

Pak Ketua, demikian yang saya sampaikan. Saya sudah menyiapkan bahan presentasinya dengan dilengkapi dengan data. Mohon Pak, saya sudah mengunjungi 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Pak, termasuk di Rampi dan Seko segala macam. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Syahrul, NTT juga lebih banyak mendapatkan perhatian, terutama menyangkut pembangunan lahan kering Pak. Orang katakan di NTT ini banyak lahan tidur, saya katakan tidak, yang tidur itu negara, kenapa, karena tidak membuat apa-apa terhadap lahan kering.

Sekian dan terima kasih Pak.

Mohon ijin Pak Ketua, bisa saya sampaikan ini kepada Pak Menteri Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Lema bukan pemerintah yang tidur, karena terlalu banyak sekian puluh tahun tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya Mba Lulu silakan.

#### **F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):**

Ia terima kasih Pimpinan, juga Pak Menteri dengan semua jajaran yang hadir.

Pertama saya juga turut mengapresiasi untuk kesiapannya rapat pada hari ini, meskipun ada begitu banyak catatan terutama tentang data. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu bukan data. Yang pertama justeru buku hijau ini Pak. Ini tanggapan atas pertanyaan hasil rapat bersama ya beberapa waktu yang lalu ada Pak Sekjen dan lain-lain. Karena ini bentuknya dokumen dan sudah dicetak bagus, sementara ada hal yang mengganggu dan ini penting buat saya, karena ini bisa menjadi dokumen publik, semua akan membaca. Antaralain disini disebutkan bahwa poin a halaman 43 Pak. ini terbalik dengan apa yang sebenarnya saya tanyakan waktu itu. Disini dituliskan saya bertanya tentang strategi kementerian apa yang akan

dilakukan, apakah paradigma yang akan dilakukan atau dijalankan hanya isu kedaulatan pangan. Nah ini justeru pokok persoalannya Pak. Jadi justeru masalahnya saya mempertanyakan, mengapa kedaulatan pangan itu bukan menjadi fokus kita Kementerian kita ini kedepan. Pertanyaan saya justeru mengapa kita masih menggunakan ketahanan pangan. Sementara Undang-Undang tentang Pangan, selain ada ketahanan pangan, maka tujuan akhir kita sebenarnya adalah kedaulatan pangan. Kalau bicara tentang ketahanan pangan, nanti ini akan relevan dengan program yang sering kali memang jangka pendek ya, misalnya oh dalam waktu 3 bulan kita akan memenuhi ketersediaan pangan.

Ketersediaan, ketahanan pangan ini sebenarnya sampai mau berapa lama. Kira-kira kedaulatan pangan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ini akan kita capai butuh waktu berapa lama. Dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Pak Menteri, apakah kedaulatan pangan ini bisa kita wujudkan, caranya seperti apa. Nah itu justeru poin pertanyaan saya. Kalau disini terbalik. Kalau disini justeru seolah saya memertanyakan kedaulatan pangan itu, dalam artian mengapa kok bicara kedaulatan pangan, sementara catatan saya mohon maaf, Pak Menteri tidak bicara tentang kedaulatan pangan ya, dan saya mohon sekali karena ini akan menjadi dokumen publik saya punya *open library* nanti di kantor saya. Saya tidak bisa ini tunjukan kepublik, karena nanti dibidang ini Lulu bicara apa pada waktu rapat. Sementara saya sampai hari ini pada posisi misi saya jelas, bagaimana kita bisa mengamankan, mengawal Undang-Undang yaitu mewujudkan kedaulatan pangan.

Kemudian yang kedua Bapak Menteri, disini juga disebutkan tentang poin c jawabannya dari Pak Menteri, yang terkait dengan ketersediaan komoditas pangan strategis secara 3 bulan. Kita juga mau bertanya sebenarnya. Ketersediaan ini kira-kira disediakan melalui cara seperti apa. Kalau waktu itu saya berharap, tiga bulan kedepan tidak ada lagi import. Nah ini belum dijelaskan ini selama 3 bulan kedepan ini masih akan impor atau tidak impor, terutama misalnya soal beras. Kemarin waktu pertemuan dengan Bulog itu, ada fakta yang sangat mengejutkan. Tadi disebutkan hampir 1 juta itu ada stok Pak, yang itu harus dikeluarkan dari gudang Bulog. Ini ada kesalahan yang sangat fatal dari Kementerian yang sebelumnya pihak yang lain yang melakukan karena tidak ada koordinasi secara teknis juga dengan Kementan, sehingga impornya ini mengawur, sampai ada kelebihan yang sebegitu banyak, disini lain ada temuan. Nah ini yang kita juga tidak mengerti, kenapa kemudian disebut ada 22 juta yang kemudian rawan pangan. Ada kondisi rawan pangan 22 juta, tetapi ada situasi dimana kemudian importasi ini sangat lebih, tapi juga ada situasi stok yang itu jumlahnya hampir 1 juta. Ini saya tidak bicara kasar, tapi ini anak-anak milenial itu pasti akan bertemu bicaranya kasarnya, apalagi orang Jawa Timuran begitu ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa terjadi silang sengkabut yang seperti itu.

Nah kemudian yang berikutnya Bapak. Yang saya mau juga respon adalah tanggapan dari Kementan, dimana RPJM nya 2024 adalah sasaran umumnya terwujudnya kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Nah ini berarti kita masih pada posisi yang penting ketersediaan pangan itu cukup, kemudian produktivitas mungkin bisa dinaikan. Tetapi memang lagi-lagi bahwa pilihan kita pertanian yang berdaulat dengan ketahanan pangan itu pasti akan berbeda, karena ini akan menyangkut *good will* nya pemerintah. Kalau kita sudah bicara tentang ketahanan pangan, pasti kita memang akan punya keberanian untuk melawan semua rezim perdagangan internasional yang hari ini, itu sudah berusaha untuk mencengkram kita, apa lagi mohon maaf, ada pesanan dari pihak kementerian, agar ada 4 Undang-Undang yang itu direvisi. Saya pada saat ini sampai detik ini, belum melihat alasan yang sangat kuat, mengapa Indonesia harus tunduk kepada tuntutan WTO dengan mengubah atau merevisi 4 Undang-Undang yang terkait dengan pertanian, yang kita bela adalah Indonesia, Indonesia itu punya pemerintahan. Jadi cara kita membela Indonesia, pemerintahan kita ini sebenarnya adalah menolak segenap tindakan yang menurut kita yang sudah melampaui konstitusi.

Nah kalau misalnya kita ini sama Pak, antara DPR kemudian Pemerintah melawan kekuatan yang menurut kita ini memang mencederai akal sehat kita sebagai sebuah bangsa, maka pasti akan enak. Yang mau kita revisi itu satu, bagaimana posisi petani semangkin kuat, bukan kemudian kalau kita mau revisi, posisi petani kita semangkin lemah. Nah itu pasti kita menjadi pendosalah kalau yang seperti itu dan menurut saya DPR menjadi tidak berkah kalau sampai kemudian kita terlibat di dalam setiap upaya perubahan yang membuat hajat hidup rakyat kita, terutama petani-petani kita yang nasibnya saja naik turun, tidak jelas dan kemudian akan kita perparah dengan perubahan Undang-Undang yang tidak pada posisi membela mereka. Kita butuh komitmen betul dari Pak Yasin, Pak Syahrul, Pak Limpo, tree in one itu kan semangatnya. Ayo kita sama-sama punya semangat wujudkan sesuai dengan Undang-Undang Pangan, bahwa kedaulatan pangan itulah sebenarnya misi utama Bapak sebagai menteri.

Saya kira itu. Terakhir jangan lupa ini untuk dibuah, bahwa pertanyaan saya justeru bukan mempersoalkan kenapa kita hanya bicara tentang kedaulatan pangan, karena Bapak justeru belum bicara itu. Pertanyaan saya justeru mengapa pemerintah masih berkuat kepada ketahanan pangan, tidak menggeser paradigmanya dan juga komitmennya untuk bergerak ke isu kedaulatan pangan dan nanti saya butuh ini yang baru dan disitulah baru ini akan menjadi dokumen yang layak untuk bisa dibagi ke yang lain.

Saya kira itu Bapak.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Muslim, lagi keluar. Kalau begitu dilanjutkan dengan Pak Ono Surono.

**F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):**

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati  
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya**

Mohon maaf, raker pertama saya belum hahir, sehingga saya mengucapkan selamat atas posisi barunya sebagai menteri dan tentunya ini menjadi harapan kita semua.

**KETUA RAPAT:**

Kenalkan namanya.

**F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):**

Tadi sudah disebut, Pak Sharul, Pak Yasin, Pak Limpo.

**KETUA RAPAT:**

Naman anggotanya.

**F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):**

Ono Surono Pak.

Pak Menteri posisi yang baru tapi pasti membawah hal-hal yang lama. Nah dalam hal ini perlu saya mengingatkan karena memang beberapa informasi juga masuk kekami, terkait dengan temuan BPK. Yang pertama terkait dengan biaya distribusi Alsintan Pak. Yang kecenderungannya terjadi duplikasi, biaya angkutan antara kontrak pengadaan alat mesin pertanian dengan kontrak distribusinya dan informasinya mungkin sekitar 200 miliar. Dan Kejangung pun menurut informasi masih juga memproses terkait dengan masalah ini. Nah mohon tanggapan Pak Menteri, apa kira-kira yang harus dilakukan kedepan, terkait dengan masalah yang ada tersebut. Itu yang pertama.



Nah yang kedua, terkait dengan Hortikultura Pak. Proses rekomendasi ijin pemasukan atau import hortikultura, dalam praktiknya telah menimbulkan moral hazard yang menurut saya secara sistemik ini terjadi di Direktorat Jenderal Hortikultura. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan RIPH yang menjadi biaya tinggi dan tidak ada kepastian Pak, sehingga mengakibatkan negara-negara mitra dagang juga tentunya membalas dengan mempersulit ekspor kita. Sebagai contoh misalnya Pakistan, India, Cina dan Uni Eropa. Sehingga saya mohon Pak Menteri harus membuat gebrakan, terkait dengan ijin rekomendasi yang harus berhijrahlah dari masa lalu, harus ada program yang progresif, kalau PDIP bilang progresif revolusioner Pak. Pak Sudin juga biasa mengatakan seperti itu. Tentunya ini juga perlu pengawasan, karena pengawasan internal atau Inspektorat Jenderal juga saya rasa masih sangat lemah. Nah sehingga mohon kami menunggu tanggapan dan kebrakannya seperti apa.

Selanjutnya terkait dengan pengendalian import Bawang Putih. Ini juga di periode kemarin kita sering rapat juga terkait dengan kewajiban bagi importir untuk menanam 5%. Mereka sudah menanam, ternyata ijinnya pun tidak keluar. Nah jadi ada apa terkait dengan hal tersebut, kok agaknya ada praktek yang terjadi di dalam dan cenderung mempersulit. Memang pada saat misalnya pengendalian import memang cenderung mempersulit. Tapi pada saat bicara ketidakjelasan, ini pun juga harus dihilangkan Pak, harus benar-benar ada unsur keterbukaan disana. Nah sehingga tentunya kami juga kenapa mengingatkan ini, karena telah juga menjadi kasus hukum oleh KPK, nah sehingga harus hati-hati juga kedepan.

Selanjutnya Pak Menteri terkait dengan masih dengan rekomendasi importlah, yang dalam hal ini mungkin Bawang Putih, Bibit Cabe, Bawang Merah dan lain-liannya. Tapi kita ini agaknya belum mempunyai konsentrasi apa produk Indonesia yang bisa menjadi produk unggulan untuk kita ekspor. Kita selalu fokus setiap tahun Padi, Jagung, Kedelai yang kita semua tahu pada saat bicara kedaulatan, bicara Swasembada, toh pada akhirnya juga beras ia juga kita impor. Nah sehingga apakah memang di Hortikultura misalnya terkait dengan buah-buahan, sayuran, tanaman lain bahkan misalkan terkait dengan rempah. Ini hanya menjadi program yang berjalan rutinitas saja supaya terkesan kita membackup, apa akan menjadi fokus. Sebagai contoh misalnya, abad ke-14 perdagangan rempah internasional itu kan ada di Indonesia. Tapi saat ini saya punya data, misalnya ekspor rempah kita stagnan dari 2014-2017. US\$494 pada Tahun 2014 dan di 2017 hanya \$ 626 juta dan di pasar Eropa pun cenderung turun Pak pasar rempah kita. Padahal berdasarkan data stremate 2015, potensi ekspor rempah Indonesia, itu sebesar US\$1,6 miliar. Namun itu tadi, ekspor kita mungkin disekitar US\$700 juta. Nah kenapa seperti itu, salah satu misalnya ada di pemberitaan di media, oh ternyata Indonesia ekspor Lada ke Singapura tidak kurang dari 3000 ton setiap tahunnya. Dan di Turkey, harga Lada itu 700 ribu/kg dan di Turkey yang terkenal itu bukan Indonesia, tapi Lada dari Singapura. Ini kan tentunya

aneh. Padahal petani Lada kita hanya dihargai cuma 40 ribu/kg. Nah sehingga mungkin ini harus menjadi perhatian Pak Menteri. Kalau pun kita ingin punya produk unggulan, coba kita kembali di era kejayaan Indonesia, yang menjadikan Indonesia dijajah 350 Tahun oleh VOC, bahwa disana ada potensi rempah-rempah yang sangat besar dan ini menjadi produk unggulan eksport Indonesia.

Yang terakhir Pak Menteri terkait dengan penyuluh. Tadi disampaikan, malahan tadi tidak tahu honor penyuluh berapa. Saat ini saya rasa di Badan Legislasi masih dibuka terkait dengan revisi Undang-Undang ASN dan penyuluh pertanian yang dari 18 ribu sekian yang kemarin diangkat menjadi PPPK kalau tidak salah baru akan 6 ribuan, 11 ribu dan itu pun masih setengah hati, karena apa, karena yang mereka inginkan adalah diangkat menjadi ASN. Menteri yang dulu terusterang setengah-setengah untuk mendukung itu, setiap rapat di Baleg, setiap rapat Gabungan tidak secara tegas bagaimana menteri mendorong penyuluh untuk diangkat menjadi ASN. Nah sehingga pada saat ini dibuka kembali, mohon kepada Pak Menteri berjuang sekuat-kuat tenaga bersama Komisi IV, bersama DPR-RI abagiamana penyuluh-penyuluh pertanian kita diangkat menjadi ASN dengan merubah Undang-Undang ASN.

Demikian, terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ibu Endang.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Terima kasih

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Pak Menteri yang three in one katanya Pak. Pak Menteri ini idolanya Ibu-ibu Pak ternyata.

**Bapak Ketua yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati juga,**

Jadi dari hasil paparan Pak Menteri, kami sebetulnya terkesima Pak, sama dengan Ibu Lulu. Jadi yang ditulis disini tidak semuanya tidak akurat. Jadi mohon diperbaiki. Yang kedua, tentang hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019. Jadi setelah kita pelajari ternyata subsidi pupuk kita ini sangat besar Pak, tapi hasilnya tidak

relevan di masyarakat petani. Nah apakah tidak ada Pak, pemikiran dari Pak Menteri dan jajarannya, untuk mengubah subsidi tersebut menjadi subsidi pasca panen dan subsidi harga. Tadi yang dikemukakan oleh Pak Ono baik sekali, bahwa kita ini selalu tidak punya prinsip seperti yang di Undang-Undang dalam Undang-Undang 1945. Jadi Pak, kita ini selalu tergerus dengan era liberalisme. Jadi realisasi anggaranpun demikian Pak. Jadi mohon Bapak memberikan penjelasan, kenapa anggaran di Kementerian Pertanian ini, realisasinya selalu tidak sesuai dengan target. Padahal tadi di lapangan banyak sekali kesulitan-kesulitan dari petani yang dihadapi, diantaranya yang Bapak kemukakan tadi untuk mendirikan Bank Pertanian. Jadi kalau bank pertanian Pak menurut pengalaman saya, kalau masih bekerja sama menjadi dengan bank umum, itu agak sulit Pak, karena ada *capital of flow* dari desa ke kota yang peraturan Bank Indonesianya memperbolehkan Pak, karena BRI yang semula kita harapkan dengan program Simpedes dan Kupedesnya juga tidak berjalan dengan baik. Jadi orang desa justru mensubsidi orang-orang kota Pak, karena hampir semua bank cari untung.

Nah jadi kalau Bapak akan membuat bank pertanian, sebaiknya jangan berupa bank umum Pak, tapi bank khusus yang ada prioritas-prioritas untuk mempermudah petani itu akses ke pembiayaan, karena yang diinginkan oleh petani itu bukan kemurahan, tapi kemudahan akses. Nah lembaga-lembaga yang sudah ada di daerah, itu tergerus Pak, tergerus dengan hilangnya program-program yang memperkuat kelembagaan, diantaranya lembaga-lembaga penyuluhan. Jadi lembaga-lembaga penyuluhan itu Pak, dulunya bagus sekali Pak, tapi setelah reformasi dihilangkan hanya karena gara-gara ada beberapa oknum penyuluh yang bekerja sama dengan distributor pupuk misalnya. Nah ini Pak sebaiknya jadi dari Pak Menteri dan jajarannya, jangan menghilangkan kelembagaan Pak, karena lembaga itu biasanya terbentuk dengan kearifan lokal setempat Pak, tapi tiba-tiba dihancurkan oleh program-program pemerintah yang menina bobokan petani-petani kita yang sudah biasa untuk belajar mandiri. Nah ini hal yang penting. Jadi untuk bank tani ini saya harapkan, Bapak bisa pelajari lagi supaya terealisasi dengan baik sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Nah kemudian selain subsidi pupuk dan anggaran, ada lagi tentang WTO tadi Pak. Ternyata saya perlu lapor juga ini ke Pak ketua. Hari minggu kemarin saya diskusi dengan salah satu teman saya Pak, yang kebetulan Dubes WTO. Jadi sebetulnya WTO ini sudah bagus Pak, didirikan oleh kita juga. Jadi pendirinya sesepuh-sesepuh kita dulu, pada Tahun 50 an sampai 94 bagus. Tapi tadi Pak, sosialisasi masyarakat dan para pejabat kita karena sering beralih tadi menurut Pak ketua juga betul pindah-pindah jabatan, tidak menguasai Pak, apa yang harus kita pertahankan untuk kedaulatan pangan tadi yang Ibu Lulu sampaikan. Jadi menurut saya dengan adanya program dari Bapak yang bagus ini komando strategi pertanian, sebaiknya disosialisasikan dulu Pak dan menyadari bahwa kostratani ini bisa menyerap aspirasi petani-petani kita. Dan juga

tadi Pak, strateginya harus dilakukan dengan baik oleh Bapak sampai ke desa-desa, karena biasanya Pak, pemerintah daerah kita, selain Pak Yasin Limpo tentunya, itu tidak mau mengadopsi Pak, karena biasanya Pak yang dijadikan Kepala Dinas adalah tim suksesnya dari para Bupati dan para Walikota setempat, sehingga tidak menghayati apa program-program yang sudah dicanangkan oleh pusat. Nah ini terjadi di beberapa daerah diantara di Cianjur Pak daerah kami. Itu sulit sekali Pak, program-program bisa berjalan dengan baik. Nah jadi ini ada kaitannya juga dengan optimalisasi pemanfaatan lahan Pak. Jadi lahan-lahan kita ini banyak yang tidak dimanfaatkan karena dikuasai oleh orang-orang kota Pak. Jadi rakyat sendiri mau hanya jadi penggarap masyarakat petani kita di daerah ini. Nah ini mohon Bapak bisa berkoordinasi mungkin dengan Kementerian Agraria atau yang lain untuk bisa mensertifikasi tanah-tanah itu dengan baik, sehingga bisa dikerjakan oleh petani-petani kita dengan maksimal.

Nah kemudian tadi regenerasi petani Pak. Jadi betul yang dikemukakan oleh Kepala Badan SDM, bahwa selain petani kita sudah uzur sudah berumur lanjut dan juga masyarakat muda ini tidak mau Pak bertani, kenapa demikian, karena tadi Pak, mungkin sosialisasi untuk menarik para kaum muda untuk bertani kurang dan juga tidak ada insentif Pak, supaya petani muda itu mau bekerja di lahan pertanian. Nah kaitannya dengan bank Pak, tadi dengan bank tani. Kebetulan saya banyak belajar tentang hal itu dan dikirim khusus untuk membuat pertanian. Jadi kalau di Prancis itu Pak, yang namanya *bank credit agricole* yang mau bertani, itu diberi berbagai training oleh banknya Pak dan pemerintahnya kepala dinas pertanian memberikan fasilitas yang berlebih. Nah sehingga mereka nyaman untuk bekerja di sektor pertanian.

Terima kasih Pak.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Mba Vita.  
Silakan.

**F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.  
Selamat siang Pak Menteri beserta jajarannya

Terkait dengan WTO yang sudah dibicarakan dari raker-raker kemarin juga menjadi sebuah aktual dari Kementerian Pertanian, juga menjadi isu menghangat di Komisi IV. Saya ingin sekedar mengingatkan WTO ini merupakan organisasi

perdagangan dunia yang salah satunya tugasnya merupakan menciptakan sistem perdagangan yang berkeadilan tentunya bagi semua anggotanya. Berkeadilan yang berarti perlakuan yang berbeda antara negara yang maju dan berkembang. Negara AS yang merupakan sengketa kita, kita kalah dengan WTO ya dengan Brazil juga, New Zealand juga, tentu berbeda dengan negara Indonesia. Kita tau negara AS memiliki luas lahan 50 hektar dan memiliki pertanian yang modern, memiliki permodalan yang cukup perbankan yang ringan dibandingkan dengan pertanian Indonesia yang luas lahannya cuma satu hektar dan juga perbankan yang sangat terbatas. Ini sangat tidak adil buat Indonesia.

Nah disini saya sangat mengharapkan, kita mengharapkan hadir untuk melindungi para petani melalui regulasi, melalui Undang-Undang yang hadir untuk melindungi dari serangan impor. Harapannya kementerian juga bisa merevisi dari Undang-Undang ini supaya bisa memberikan perlindungan kepada para petani melalui argumentasi yang ada dari para petani ini, supaya tidak terpinggirkan tidak menjadi tidak terbawah dari sengketa-sengketa WTO ini, tidak menjadi korban dari serangan-serangan impor Pak. sehingga nanti harapannya kita tidak hanya menjadi anak manis dari WTO, hanya menjadi mengikuti kemauan dari WTO, kita nanti kita melihat, kita evaluasi kalimat apa yang menjadi pertentangan dari hambatan-hambatan dari WTO ini. Yang penting prinsip perlindungan terhadap petani ini menjadi satu hal yang utama. Begitu ya Pak.

Nah nanti dari empat RUU ini, yang menjadi dari sengketa WTO ini harapannya nanti bisa dari pemerintah saja usulannya kalau bisa nanti menjadi RUU ratifikasi utama kalau bisa karena Baleg. Saya dari Baleg juga tidak dari usulan dari komisi.

Terima kasih Pak Menteri.

Bukan dari inisiatif, dari komisi begitu ya Pak.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Johan Rosihan.

#### **F-PKS (H. JOHAN ROSIAN, S.T.):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati.**

Pertama saya ingin memulai dari buku hijau ini. Membaca buku hijau ini jawaban atas pertanyaan anggota Komisi dan apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Lulu tadi, ada salah jawab segala macam. Saya hanya menyarankan kepada pimpinan, saya tidak ingin supaya forum ini hanya menjadi komisi bertanya, kementerian menjawab, harus dibuat formatnya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Johan, komisi bertanya, kementerian menjawab, serta mencari solusi jalan terbaik, agar dimenteri yang baru ini jauh lebih baik. Setuju tidak?

**F-PKS (H. JOHAN ROSIAN, S.T.):**

Setuju Pak Ketua.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIAN, S.T.):**

Saya mau bilang begitu, sehingga nanti format kesimpulan rapat kita, harus ada kesepakatan-kesepakatan antara Komisi IV dan Kementerian yang bisa kita evaluasi. Contohnya misalnya pembentukan badan pangan tadi. Ia jangan sampai sudah 5 menteri tidak bisa terealisasi, kita targetkan kapan, ia misalnya realisasi apa dalam 3 bulan sampai berapa persen. Jadi saya pikir sesuai tidak mubazir forum kita lama waktunya tapi tidak ada yang bisa kita evaluasi. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak ketua saya punya data bahwa dari laporan realisasi anggaran per November 2019, itu serapan terendah itu ada di Direktorat Tanaman Pangan yaitu sekitar 43,49% jauh lebih rendah dibanding dengan Dirjen-dirjen yang lain yang sudah mencapai 70%. Nah apakah ini yang menjadi masalah dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Produksi Padi kita baru pada angka 64% kita bicara tentang ketahanan pangan, kita bicara tentang, realisasi terendah itu ada di Dirjen Tanaman Pangan. Apa persoalannya ini Pak Menteri. Padahal pada saat yang sama, 22 juta rakyat kita ini masih kelaparan. Kita ini berada peringkat ke 65 dari 115 negara pada tingkat rawan pangan. Kenapa dirjen tanaman pangan ini susah sekali menyerap anggaran, apa persoalannya, apakah sengaja tidak diserap untuk membuka impor atau apa, jangan marah dengan kecurigaan kita Pak menteri, ini adalah fakta.

Yang berikutnya, saya menyambung apa yang disampaikan Lema tadi itu, karena karakteristik NTT sama NTB itu hampir sama soal lahan kering. Nah saya ingin bertanya Pak Menteri, bagaimana persiapan Kementerian Pertanian, karena kami bukan daerah irigasi teknis yang hanya mengandalkan hujan. Bagaimana persiapan kementerian menghadapi musim tanam pertama ini, bagaimana tentang ketersediaan

bibit, bagaimana tentang ketersediaan pupuk. Jangan sampai nanti bibit datang setelah kita tidak butuhkan lagi, jangan sampai pupuk datang ketika kita tidak membutuhkan lagi. Karena bicara pupuk itu Pak, jangan bicara subsidi Pak. Kalau subsidi alhamdulillah kalau ada. Yang dibutuhkan petani adalah ketersediaan, ketersediaan bibit dan ketersediaan pupuk tepat waktu, tepat guna, tetap sasaran dan tepat-tepat yang lain menurut versi tentang kementerian. Jadi kita butuh kepastian bagaimana persiapan itu agar masyarakat kita ketika kita bertanam itu ada bibitnya dan ketika ingin mengembangkan pertaniannya itu ada pupuknya. Seperti itu.

Yang berikutnya bicara tentang kostratani. Saya tetap mengapresiasi itu program luar biasa Pak Menteri. Cuma saya ingin mengingatkan Pak Menteri supaya pastikan semua stakeholder itu bergerak, siap bergerak ketika Bapak memukul gong tentang pemandu strateg itu. Saya sudah bilang sejak awal bahwa, ujung tombaknya itu adalah penyuluh dan BPP. Tetapi bagaimana kondisi penyuluh kita hari ini. Pak Ono Surono tadi sudah menyampaikan itu. Pak Menteri, THL kita itu saat ini berapa daerah, di NTB rata-rata sudah mengganggu, pemerintah daerah sudah mengganggu gaji mereka. Tetapi sampai hari ini pemerintah daerah belum mempunyai payung hukum untuk membayarnya. Saya lihat pada awal Bulan November sudah bersurat kepada pemerintah tentang ini. Tetapi sampai hari ini Pak, dibutuhkan payung hukum Kepreslah minimal, supaya anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah itu, bisa untuk membayar tenaga harian yang lepas itu, tenaga bantu penyuluh pertanian itu. Tolong diperhatikan. Kalau ini tidak diperhatikan mereka tidak bekerja, Bapak pukul gong 100 kali tidak akan bergerak itu kostratani. Ini juga didukung dengan fokus dari RKP rencana kerja pemerintah 2020 ini kan peningkatan SDM untuk kemajuan berkualitas. Bicara SDM perhatikanlah penyuluh, bicara SDM perhatikan tenaga-tenaga pertanian, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian itu dibawah, yang sampai sekarang mereka belum dibayar karena tidak punya payung hukum, bukan tidak ada uang Pak Menteri, daerah sudah mengganggu, tapi belum bisa membayar itu. Apa lagi kalau misalnya ada keinginan merubah ASN sehingga mereka menjadi ASN, dapat PPPK saja mereka sudah syukur, yang penting ada kepastian itu.

Nah berikutnya yang terakhir Pak Menteri. Ada tungan asuransi usaha tanaman padi. Sekarang ini baru tercapai 52% atau 519.306 hektar dari target 1 juta hektar. Kita tahu bahwa ini realisasi masih rendah, padahal kita tahu banyak fuso, kalau ditempat saya namanya fuho Pak. Jadi gagal panen atau bisa panen, tapi kualitas produknya itu dibawah standart, tidak punya berat istilahnya itu. Isi-isi karung yang ada, tapi ketika ditimbang itu kosong tidak ada isinya. Nah tetapi pada saat yang sama, asuransi tidak. Jadi saya meminta Pak Menteri, kami meminta supaya permudah orang itu untuk merealisasikan asuransi usaha tanaman padi ini, karena kita tahu pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Bertani, yang dimaksud

dengan asuransi pertanian itu adalah keterikatan antara petani dengan perusahaan asuransi terkait dengan resiko tani. Nah karenanya jangan dipersulit ini orang untuk mengakses asuransi usaha tanaman padi ini, karena inilah tanaman pokok kita Pak, yang semua mungkin orang Indonesia punya apa menanam itu.

Jadi mungkin itu beberapa hal Pak ketua yang bisa saya sampaikan, mohon perhatian Pak Menteri. Sekali lagi atas perhatiannya terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Johan.

Jadi perlu Pak Menteri ketahui, petani itu kalau mau bertanya masalah bayar asuran ke dinas kabupaten, dinas kabupaten pun kadang tidak tahu. Betul tidak. Itu terjadi di dapil saya. Setelah ada bencana, saya tanya, kok tidak bayar asuransi, yang pertama bicara tidak punya uang, tapi kalau beli pulsa 200 ribu mampu. Beli asuransi dengan nilai 36 ribu tidak mampu. Kedua, kadang tidak ada petugasnya di kantor dinas. Maka ini harus disosialisasikan, kalau sosialisasikan hanya di kementerian, di provinsi, saya rasa tidak ada gunanya. Pak Momon pahami hal itu.

Selanjutnya Pak Panggah.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pak Menteri beserta jajaran,  
Rekan-rekan anggota,**

Kami ingin mengingatkan kembali bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkebunan, itu terbentuklah dana perkebunan. Itu mendasarkan atas Undang-Undang Perkebunan ya. Yang sarasannya adalah salah satunya adalah untuk dana peremajaan dan riset sawit. Nah ini tentu saja terlibat langsung adalah Dirjen Perkebunan dan dulu saya juga masuk di dalam keanggotaan dewan pengawas. Nah mohon ini bisa diupdate, karena ini asalnya dari Komisi IV ini Pak, asal mula dari Undang-Undang itu kemudian tindak lanjut dari pada Undang-Undang yang berupa pembentukan badan pengelolaan dana PKS. Mohon nanti dari Pak Dirjen bisa menyampaikan data-data berapa penggunaan dana itu saat ini ya, khususnya yang alokasinya untuk peremajaan



dan juga untuk dana riset. Sudah terealisasi berapa persen dari total pengumpulan dana yang ada. Itu mungkin yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan masalah pengembangan kebun kaitannya dengan pabrik gula Pak. Nah ini memang saya lihat ada satu hal yang tidak realistis di dalam perencanaan Kementerian Pertanian, karena disitu dinyatakan bahwa setelah 3 tahun pabrik-pabrik gula rafinasi ini harus sudah mengembangkan tebu. Nah ini saya pikir perlu dilihat ya, supaya kita bisa mendorongnya secara realistis ya, karena kalau 3 tahun itu waktu yang sangat singkat untuk pembibitan saja sudah perlu waktu lebih dari 3 tahun. Bapak Dirjen Perkebunan tahu ini. Bagaimana mendevlop suatu bibit saja sudah waktunya sudah makan waktu yang sangat panjang. Sehingga ini perlu karena gula rafinasi masih ada di Kementerian Perindustrian. Nanti Bapak bicara dengan Dirjen Agro Pak, untuk bagaimana ini dibuat road map bersama, sehingga betul-betul bisa kita ikuti bagaimana pergerakan dari rafinasi menuju integrasi kebun. Nah ini saya sarankan untuk Bapak berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

Yang berikutnya barangkali saya ingin melihat Kementerian Pertanian ini yang ruang lingkupnya sangat luas Pak, kalau saya lihat pekerjaannya sangat banyak sekali, sehingga terkesan hanya kemudian mencari sederhananya saja, hanya Pajale diekspose dan dikembangkan secara all out begitu ya. Padahal potensi kita seperti Pak Ono tadi sampaikan, banyak sekali yang kita justeru menjadi keunggulan yang ada disitu. Seperti Kopi ya, kopi ini Pak Bambang mangguk-mangguk. Kopi ini kita cenderung merosot terus ini, kita akan kalah dengan Vietnam. Ini trend sudah kalah, import terus menurun, produktivitas kita tidak pernah beranjak dari 700 kg/hektar. Nah saya melihat kebetulan ini memang di dapil saya Pak ini, potensi Kopi, Kakao ada Teh, ada Tembakan, ini tidak dirasakan.

Kalau saya ke kampung-kampung ini keberadaan program Kementerian Pertanian. Nah ini mohon ini bisa ditekuni, lebih fokus lagi tidak hanya Pajale, tapi ini betul-betul dirasakan konsentrasi atau fokus dari pada Kementerian ini masuk ke desa-desa ini. Saya kira di Kakao juga bisa. Ini angkanya juga katanya kita sudah produksi 700 ribu ton, tapi kalau ICCO, yakin angka kita ini 350 ribu sampai 400 ribu tidak beranjak dari itu. Nah ini juga mohon ini bisa ditekuni ya Kakao ini ya. Demikian juga Teh, Teh itu merosot dari rangkin 3 dunia, sekarang jadi rangkin 7 dan akan merosot lagi ini Pak Dirjen Teh ini dan import cenderung meningkat kembali. Nah ini banyak kebun-kebun Teh tidak terurus terutama kebun rakyat karena masih mayoritas kebun rakyat ini masih menduduki mayoritas dari kebun Swasta dan BUMN. Ini kan sayang ini menggerakkan ekonomi masyarakat.

Saya kira masih saya masih banyak bicara ini Pak masalah Sapi pera juga, ini dengan Pak Dirjen Peternakan. Saya melihatnya mau ada kebijakan menyetop import. Nah padahal produksi kita ini hanya 800 ribu, kebutuhan kita lebih dari 3 juta. Nah tiba-

tiba ini ada kebijakan mau distop. Wah ini bisa gempa ini di industri minuman. Nah oleh karena itu tolong ini dibuat sama-sama Pak, bukan saya ya sekarang. Jadi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian untuk membuat program bersama-sama step by step nya itu seperti apa, sampai mencapai mungkin kalau Swasembada mungkin agak sulit ya. Setidaknya ini ada progres ya, dari 800 ribu ini kemudian katakanlah 1 juta, 1,5 juta, 2 juta dan seterusnya.

Ini mungkin beberapa yang ingin kita tekankan Pak Menteri. Jadi beberapa fokus yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dalam hal ini.

Demikian Pak Ketua dari saya, terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Panggah.

Selanjutnya Mba Rizki.

Silakan.

Yang tadi mau bertanya, tapi tidak kasih Pak, sekarang tambah datu menit.

**F-PDIP (RIEKY APRILIA):**

***Alhamdulillah.***

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, ini terkait dengan tanggapan dari Kementerian. Terkait pertanyaan diwaktu kemarin masalah Karet. Saya rasa disini ada pemahaman yang salah juga dari Dirjen terkait. Yang saya ingin pertanyakan, Memang Sumatra Selatan, Sumatra pada umumnya, itu memang dari jaman Belanda itu pasti karet, akan tetapi kita harus realistis hari ini, karet ini bersaingnya secara global seperti apa, petaninya juga sudah tidak memiliki lagi kemampuan yang sama seperti dulu dan lahannya juga semangkin terkisis oleh perkebunan. Nah pertanyaan saya sebenarnya, apakah ada solusi lain terkait karet ini, solusi tanaman lain karet, karena saya rasa ada tanaman yang lain lebih bisa produktif lebih cepat dipanen dibanding karet, yang penting kesejahteraan petani ini yang harus kita pikirkan. Itu satu.

Terus kedua, terkait pertanyaan saya mengenai Sawit. Dijawaban Bapak-bapak ini, terkait masalah sawit, ini normatif sekali, kita tahu aturannya. Aturannya seperti apa ini lahan sawit dengan Undang-Undang nomor sekian dan sekian ini, tahu. Cuma saya mau tanya, Bapak-bapak pernah tidak ada di lokasi yang bekas perkebunan sawit yang

sudah tidak terpakai lagi. Saya tanya dulu, pernah tidak meninjau langsung, perntah, tahun berapa Pak, sudah lama sepertinya ya, di Banka, Sumatra Selatan saya bilang Pak. Karena begini, kami kemarin habis Kunspek juga terkait Karhutla memang, tapi melewati perkebunan sawit yang sudah tidak terawat lagi dan tidak dipergunakan lagi. Kalau jawaban ini saya yakin Pak, semua perusahaan pasti mengikuti peraturan ini yang Bapak sampaikan disini, tapi efeknya terhadap masyarakat sekitar itu seperti apa. Bukan begitu Pak. Sudah berapa banyak data Bapak, lahan ini harusnya diperbaiki lagi mungkin oleh si perusahaan, ada datanya tidak lahan yang sudah selesai dan itu yang perlu Bapak cari, karena bukan apa-apa Pak, ini masalah sawit ini ya itu saya bilang. Ini untuk mengobati tanah yang sudah ditanam sawit ini lama lagi Pak. Nah kita juga pikirkan bahwa ada banyak masyarakat yang tinggal diantara perkebunan Sawit-sawit tersebut.

Nah karena dalam rangka juga untuk peremajaan sawit, riset sawit, ya cobalah ada Undang-Undang Perkebunan memperkenankan untuk melakukan pengumpulan dana, benar Pak, yang berasal dari pungutan ekspor CPO ya. Ini juga sekalian. Untuk pengelolaannya dibentuk Badan Pengelolan Dana PKS dan salah satu komisisnya ada di Dirjen Perkebunan. Betul Pak, betul tidak, apa, Dewan Pengawas ya. Oke. Sampai saat ini saya juga ingin tahu Pak, karena begini, saya ini di lapangan terus dari 2017 sampai 2019 kemarin, kampanye dan jalan-jalanlah. Jadi saya juga penasaran saya juga mendapat informasi ini, bahwa disitu kalau dilihat antara komposisi pemukiman, terus juga perkebunan ini tidak sinkron. Kewajiban perkebunan terhadap masyarakat juga seperti apa begitu ya, karena terkait dana tadi. Saya juga ingin tahu Pak, berapa banyak si dana yang sudah terkumpul dari itu, ada tidak reportnya. Saya yakin ada harusnya ya. Dari tadi Bapak-bapak bicara data BPS dan teman-teman saya yakin adalah. Nah jadi sekali lagi Pak, saya menghargai jawaban Bapak disini, tapi saya tidak berharap terlalu normatif berkaitan dengan Undang-Undang. Seribupun Undang-Undang dibuat dibuat satu juga pun Undang-Undang dibuat kalau memang ternyata tidak bisa direalisasikan itu semua omong kosong Pak. Itu saja ya.

Terus terkait juga pertanyaan saya terkait Klengkeng. Saya harus bertanya ini, maaf Ketua agak panjang ya, maaf. Ia satu menit. Karena begini, tadi sama Pak Ono sudah sempat dijawab sebenarnya, cuma karena kita bertanya. Bahwa saya ini dapat informasi terkait keluhan dari beberapa importir Pak. Jadi bahwa masalah, begini, buat saya, saya yakin ya Pak ya, import/eksport andaikan masyarakat diberi tahu, kenapa kita harus import, kenapa kita harus eksport, secara ada datanya konkrit dan riil itu pasti tidak ada masalah. Ini kan selama ini tiba-tiba impor dan segala macam. Nah kalau saya lebih mempertanyakan, ia maaf memang di Sumatra Selatan itu termasuk konsumen Lengkung besar, teman saya disini dari tadi bilang, harus tanya, karena saya hobby Lengkung katanya, tapi kok kenapa harus import. Tapi impor kemarin Pak Dirjen ya, Pak Momon ya. Ibu katanya sepintas karena Manggis kita ditahan di Thailand

juga katanya, betul tidak Pak, ia kan. Nah itu jawabannya. Tapi kan kalau memang terkait dengan praktis ya, bahwa dokumen untuk persyaratan *packing house eksportir*, satu ekspor hanya memiliki gap, betul tidak Pak. Nah ini makanya kami bertanya, latar belakang kebijakan Bapak ini maksud saya terkait importir ini, karena jangan sampai ya Pak, itu yang saya bilang dari minggu kemarin, ada terbang pilih, terbang pilih, kalau tidak, tidak semua maksudnya. Itu saya permintaan saya. Kalau tidak, tidak semua, jangan dipilih-pilih begitu ya, jadi kita perlahan sama yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam***

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal.

**F-NASDEM (ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Beberapa hari yang lalu, pertanyaan saya bahkan masukan saya, soal pangan lokal untuk memperkuat pangan nasional. Kita tahu bahwa di Indonesia, produksi padi nasional sekitar 66 juta ton sekian. Namun kita sementara sebenarnya potensi yang ada di desa-desa, potensi yang ada di masyarakat, yaitu potensi kearifan lokal. Kalau kita lihat di Maluku itu ada Sagu, di Madura ada Jagung, mungkin di Jawa juga ada Singkong dan lain-lain. Ini sebenarnya potensi.

Apakah pemerintah tidak bisa membuat suatu aturan untuk membangkitkan pembangun lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh masyarakat, ia contohnya bahwa masyarakat yang ada sekarang ini yang tidak terakomodir. Saya pernah katakan bahwa, tidak terakomodir dalam kegiatan perkebunan, kegiatan pertanian juga mungkin kegiatan usaha dan lain-lain. Ini mereka ini pada menganggur. Budaya kita dulu bukan makan Nasi atau Beras. Budaya kita dulu Singkong, Sagu dan itu budaya kita. Kalau nasi atau beras, itu cuma pemanis. Ini terbalik. Negara kita ini terbalik sekarang. Sekarang kalau tidak makan nasi, itu sepertinya belum makan, kalau lain dengan kita

dulu. Kalau tidak makan Sagu atau Papeda makan apapun mereka merasa tidak kenyang. Kok pemerintah apa tidak bisa dibuat satu aturan atau kerja sama dengan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/kota untuk kita giatkan kegiatan-kegiatan terkait dengan potensi yang ada ditempat kita. Sebenarnya gizi lapar itu, itu ada pada wilayah-wilayah pedesaan yang mereka sudah meninggalkan yang namanya kearifan lokal, kebiasaan Singkong, Sagu dengan yang lain-lain. Sebenarnya gampang tidak sulit. Saya pernah katakan bahwa, coba apakah bisa atau tidak. Dalam satu hari dala satu minggu masyarakat tidak makan nasi, satu minggu saja. Kalau satu minggu satu bulan itu 4 kali, empat hari ini dijadikan pasar, artinya pasar untuk kebutuhan lokal. Kalau ada pasar, maka masyarakat yang tadi tidak kerjaan ada pekarangan rumah, itu mereka bisa menanam bahkan bisa menjual di pasar. Coba dicari formatnya, saya kira Pak Menteri lebih punya keahlian, karena Pak Menteri ini pernah jadi Lurah, Camat, Bupati/Walikota, bahkan Gubernur. Kalau kita ini ya pengalaman ada di lapangan, kita dari masyarakat kita tahu bahwa masyarakat yang ada sekarang ini ia sudah ikut pola, kalau tidak makan nasi sepertinya malu, apa tidak. Kalau sampai ada program ini, itu berarti kita bisa mengurangi kebutuhan beras itu bisa jutaan ton. Tapi saya kira kembali Kementerian Pertanian, bagaimana ada caranya itu agar potensi yang ada di daerah-daerah kita, kita giatkan lagi. Jangan nasi sebagai pemanis ya. Sekali-kali Singkong, Sagu dijadikan itulah.

Yang kedua Pak Menteri. Ini sebenarnya tidak susah. Kita ambil saja pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman kabupaten kita, salah satu contoh bahwa produksi padi secara nasional kurang lebih 56 ribu 56 koma lima ratus tiga puluh tujuh, 774 tidak ton, luas lahan 10 juta sekian. Sedangkan kalau di Provinsi Maluku, itu ada 23 ribu hektar, 317. Produksi Padi sekitar 9892. Produksi beras itu sekitar 50 ton 638. Kalau kebutuha perkapita perorang 146,6 kg. Maka kebutuhan masyarakat Maluku sekitar 128 ribu ton. Produksi Maluku 50 ribu, berarti otomatis ada defisit sekitar 77.369 sekian ton. Dengan potensi yang ada, ya silakan saja, tadi dari rekan-rekan juga sampaikan bahwa, keberhasilan atau produk keberhasilan pernah disampaikan oleh ketua, yang dimaksudkan sawah itu apa. Ia otomatis pekerjaan sawah itu di butuh excavator, dia gali semua selesai, dicetak, maka satu itu adalah rasio perbandingan dengan sistem irigasi yang ada.

Yang kedua, kalau sudah ada sistem irigasi yang bagus, maka benih tadi juga disampaikan bahwa ada benih yang 1 hektar 12 ton. Di Maluku itu masih 4 sampai 6 ton. Kalau benar-benar 12 atau 8 ton saja, itu berarti secara otomatis kita sudah bisa mengurangi atau program kita untuk bagaimana Maluku itu untuk bisa surplus. Otomatis apa yang disampaikan tadi, sudah ada irigasi, sistemnya bagus, maka mekanisme ada hand traktor, ada traktor dan ada lain-lain. Dilain pihak masyarakat itu, kadangkala pada saat produksi musim hujan. Bagaimana langkah-langkah pemerintah. Atau musim produksi tengkulak masuk, harganya jatuh. Bagaimana caranya pasar kita

untuk kita bisa menangani ini. Saya kira kalau mungkin kalau dengan Bulog, saya kira ini perlu ada sehingga pada saat produksi tidak akan mungkin harganya turun. Salah satu contoh saya, walaupun ini bukan, ia salah satu contoh saja. Kalau rumput laut dulu pernah 13 ribu, tahu-tahu turun jadi 4-6 ribu, masyarakat tinggalkan namanya rumput laut, tinggalkan. Setelah harga naik lagi, mereka mulai, tapi sudah jadi penyakit, sudah jadi wabah. Yang penting sekali, bagaimana harus memperhatikan soal standar harga, sehingga masyarakat itu bisa aktif dan masyarakat bisa bertahan sesuai dengan kebiasaan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak.

**F-NASDEM (ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):**

Nah ini satu lagi Pak.

Sedikit saja, sedikit saja. Sebenarnya banyak, tapi contoh saja. Bagaimana cara dalam waktu 5 Tahun, Maluku ini bisa surplus beras ya. Ini daging juga sama, Maluku sebenarnya punya potensi, tapi kurang saja. Lalu yang satu lagi Pak Ketua, Pak Menteri, saya kira kita bicara soal penyuluh, kita bicara soal Padi, kita bicara soal lain-lain. Tapi kalau yang namanya Hewan atau Sapi, kalau tidak dikasih kandang atau dikasih tempat penghijauan, rumput-rumput gajah, Sorgum. Saya kira tidak akan kita capai. Jadi yang ada itu sekitar 70% tergantung dari pakan. Saya kira mau lagi, cuma ketua sudah itu saya cuma ingat. Satu lagi Ketua terakhir. Cengkeh. Cengkeh ini kenapa tidak masuk komoditi nasional. Tadi disampaikan oleh teman, bahwa rempa-rempa Eropa datang menjajah Indonesia karena Maluku karena rempa-rempa. Waktu itu saya kira sudah sekian Pak Menteri, insya allah saya yakin, karena Pak Menteri sudah punya pengalaman ditingkat bawah sampai jati Menteri, saya kira apa yang menjadi program tadi saya mau ini, anggaran saja, tapi saya kira saya tidak perlu saya koreksi, karena semua yang dirancang Pak Menteri, itu dia sifatnya sebagai landasan dasar untuk mensukseskan Kementerian 5 tahun akan datang.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ketua Abdullah Tuasikal.

Jadi begini Pak, saya 10 Tahun di Komisi IV. Kalau yang namanya pakan atau makanan kearifan lokal, kementerian ada inovasi Pak, bukan tidak ada inovasi. Tetapi di daerahnya kadang-kadang cuma sebatas wacana saja, setelah peluncuran Pak, hilang, contoh di Lampung, di Lampung menghasil Singkong terbesar. Jadi Singkongnya dibuat bentuknya seperti beras, sama modelnya, dimasak juga cukup enak, cuma launching saja, hampir disemua kabupaten, seperti itu. Ini kan harus komitmen bersama Kepala Daerah dengan Kementerian.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka.  
Silakan Pak.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan jajaran Eselon I,  
Hadirin yang berbahagia.**

Sebenarnya banyak yang ingin saya katakan, tapi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, dengan demikian hanaya ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama kita ketahui bahwa sektor pertanian hanya 3%. Saya kira dibawah dari pada pertumbuhan nasional. Disatu sisi, masyarakat kita banyak tergantung disektor pertanian. Jadi kalau ini tidak tumbuh dengan baik, maka tingkat kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan juga, lamban.

Di sisi yang lain juga, Kementerian Pertanian baru bisa merealisasikan anggarannya sekitar 74,4% realisasi anggaran 2019. Saya kira ini juga sejalan dengan defisit APBN kita sekarang 289 triliun dan penerimaan negara juga baru sekitar 70 triliun. Mungkin itu juga penyebabnya, sehingga tersendatnya realisasi anggaran disektor pertanian.

Saya dari pengajuan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kementerian, pada prinsipnya saya tidak keberatan, hanya ingin saya garis bawahi. Untuk hak-hak rakyat tolong jangan dikurangi, seperti pengadaan alsintan dan pengadaan alat-alat pertanian, bibit dan lain sebagainya itu jangan dikurangi, karena itu adalah hak-hak yang melekat pada rakyat kita. Sedangkan yang lain silakan disesuaikan diantara dirjen yang di Kementerian Pertanian.

Yang kedua, Subsidi pupuk. Saya masih ingin tekankan kembali subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini menelan anggaran yang cukup besar, 26 triliun 7,9 juta ton. Kita bicara subsidi tentunya kita dewan pasti mendorong, karena ini adalah untuk

kepentingan rakyat. Tetapi subsidi yang benar-benar dimanfaatkan oleh rakyat. Tapi kalau subsidi yang diselewengkan oleh penyelenggara, saya kira ini yang tidak tepat. Subsidi pupuk ini lebih banyak masuk diperkebunan besar. Saya juga petani perkebunan, saya juga petani sawah Pak, pupuknya sama, tapi itu sedikit saya pakai. Sedangkan mereka ribuan ton itu masuk diperkebunan besar, di daerah saya kebun sawit banya dan itu perkebunan Astra, perkebunan itu menggunakan pupuk bersubsidi. Jadi orang kaya tambah lagi disubsidi, tambah kaya. Yang diambil adalah yang orang miskin punya. Oleh karenanya itu pengawasan di subsidi pupuk ini, itu betul-betul dilapis, karena laporan-laporan PPL itu, laporan ini, mereka juga bermain, saya juga mantan Bupati.

Komposisi alokasi anggaran subsidi pupuk ini, saya minta supaya yang terakhir ini pupuk organik yang diperbesar nantinya. Ini juga bisa diberikan pendidikan kepada petani, supaya satu sisi Undang-Undang yang akan kita bahas ini adalah Undang-Undang Pertanian dan Perkebunan, untuk menjaga sustainable alam kita dan menjaga hasil-hasil pertanian akan lebih organik. Penggunaan pupuk kimia, saya kira sedikit demi sedikit akan kita kurangi. Dengan demikian, anggaran untuk subsidi pupuk organik ini, nantinya kalau tidak bisa Tahun 2020, ia diperbesar anggarannya, ditarik dari katakanlah Urea 11,3 triliun, kemudian NPK 11,1 triliun, sedangkan untuk Organik hanya 1,1 triliun. Saya kira ini bisa diseimbangkan dan bisa diberikan kepada rakyat untuk mengelola pupuknya sendiri, kelompok-kelompok tani dan lain sebagainya.

Selanjutnya saya ingin sampaikan juga kepada Bapak. Ada proyek di Sulawesi Barat, sudah 20 Tahun, sampai sekarang belum berfungsi, yaitu pengairan. Apakah ini Komisi V dan juga mungkin juga Komisi IV. Sepanjang saya Bupati, 10 Tahun, dikerjain ini proyek dan kontraktornya berani sekali dia tidak mau membayar galian c waktu itu, tapi saya Buptainya dia bayar, karena saya ajak berkelahi. Sampai sekarang proyek belum jadi-jadi dan tidak ada orang dihukum karena ini proyek. Olehnya itu saya kita kalau ini berada di Kementerian Pertanian, tolong dicek baik-baik, diaman anggarannya, siapa pekerjanya dan siapa yang harus dihukum, karena pasti dihukum kalau kita laporkan ke KPK ini atau lapor ke Kejaksaan, karena ini tidak berfungsi ini proyek, hanya tempat korupsi.

Yang terakhir adalah saya minta kepada Dirjen Peternakan, saya terima kasih karena masuk ternak di Wilayah Sulawesi Barat, tapi ternaknya itu terlalu baik Pak, impor dari Asutrali kalau tidak salah. Tidak familiar dengan masyarakat saya, tidak tahu ini Sapi apa ini, tidak tahu bahasa, tidak berbahasa dengan dia, makanannya juga tidak jelas, tempatnya, tanahnya juga, tempat tidak jelas, bahkan digugat oleh. Waktu itu saya punya Fraksi ganggu ini proyek, saya ditelepon oleh Pak Kapolda, karena Pak Amran Sulaiman minta kepada Pak Kapolda. Saya panggil fraksi saya, jangan ganggu dong ini, ini untuk masyarakat kita, begini-begini, akhirnya saya bertemu langsung



dengan Pak Kapolda, dengan petaninya. Jadi tolong dievaluasi ini Pak. Dan yang paling familiar dengan masyarakat saya itu adalah Sapi di bawah Pohon Sawit. Ini yang paling familiar. Terlalu luas itu pohon sawit, kosong. Kenapa tidak dikasih Sapi, dengan demikian, harga Sawitnya juga tutun, Sapinya naik, tetap juga pas-pasan, tetap juga sejahtera.

Saya kira ini yang saya sampaikan, terima kasih Pak Ketua.

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Suhardi kalau masalah Sawit, Sapi itu sudah dicoba periode yang lalu, itu sudah penugasan oleh BUMN, dari BUMN itu yang masuk Sapinya 500 ekor, Insya Allah yang bilang hilang 300.

Selanjutnya Mbak Alien Mus.  
Silakan.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Terima kasih Ketua.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.  
Selamat Sore salam sejahtera bagi kita semua,  
Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati,***

Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan kepada kami waktu kemarin dalam rapat RPD dan ada beberapa tanggapan yang perlu saya sampaikan juga. Bahwa harga Kopra ini memang sudah menjadi ancaman bagi petani kopra, yang disini diberi tanggapan mungkin bisa difungsikan sebagai *Virgin coconut oil* atau *Nata de Coco* dan sebagainya, tapi kan basic dari petani itu hanya Kopra Pak. Kalau memang seperti itu tanggapannya, mungkin ada penyampaian antara Kementerian dan Pemerintah Daerah, terus juga sampai Kabupaten/kota, bila perlu ada rapat bersama, karena ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kemudian soal Cengkeh. Disini juga ada tanggapan bahwa dibangun kemitraan antara petani cengkeh dan perusahaan industri rokok. Seharusnya ada kemitraan petani cengkeh dan perusahaan industri rokok. Ini disampaikan tanggapannya kepada kami. Berarti disini juga kami meminta bahwa pemerintah harus menyiapkan fasilitas itu

terhadap petani-petani cengkeh ataukah melewati kepala daerahnyakah, atau provinsi atau daerah, kan ini menyampaikan apa yang terjadi di lapangan di dapil kita masing-masing. Kalau soal cengkeh dan kopra, coklat, pala yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Abdullah, 350 Tahun VOC datang ke Indonesia, bascamenya ada di Maluku-maluku Utara, yang dicari adalah rempa-rempa, begitu malanya biji pala tersebut, begitu mahalnya bunga pala tersebut, begitu mahalnya cengkeh tersebut. Jadi ini perlu diantensi benar-benar diantensi oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanian, bahwa petani sejahtera negara kita kuat. Kita sebentar lagi dihadapi dengan Natal, Tahun Baru, setelah Natal/Tahun Baru sebentar lagi kita dihadapkan dengan Bulan Puasa. Kalau seandainya petaninya sejahtera, rakyatnya punya duit, Insya Allah Negara Indonesia pasti aman dan sejahtera, tapi kalau kita tidak punya duit, petani susah, ia mau dibilang apa lagi, jangan putus asa.

Pak Menteri, saya ingin sampaikan, tadi disini ada data di Tahun 2019 realisasi target dari padi itu 82,08, realisasi 52,82 atau 64%, terus disini ada target yang untuk Tahun 2020, itu 59,15%. Itu ada Pak, di halaman 8 dan 18. Mudah-mudahan bisa terlaksana Pak Menteri. Dan juga kami harapkan.

**KETUA RAPAT:**

Waktu sudah 4 menit.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Belum. 4 menit nomor 4 partai saya itu Pak.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Terima kasih.

Semoga dengan kepemimpinan Bapak Syahrul Yasin Limpo yang sudah mempunyai contoh dan sangat menjadi apresiasi kami di Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, dari potensi petani lebih baik, Insya allah dengan kepemimpinan Bapak, bisa lebih lagi mensejahterakan kami-kami dari kelompok petani di Indonesia.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.***

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

## **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya T.A Khalid.

## **F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan beserta seluruh rekan-rekan Komisi IV yang saya muliakan,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami banggakan.**

Kembali pada kesempatan ini sebagaimana semangat awal Pak Menteri dilantik berbicara data. Kemarin juga dalam pertemuan kemarin saya menyampaikan bahwa bagaimana gerakan dari pada Menteri Pertanian agar sebagaimana yang dijanjikan 100 hari kedepan kita mempunyai data yang valid. Juga telah dijelaskan dalam buku hijau ini, disamping tadi saya juga mendengar penjelasan dari Dirjen, bahwa telah melakukan sinkronisasi data. Namun ijin pada kesempatan ini, kembali saya mengingatkan bahwa bukan hanya sekedar mensinkronisasi data, tetapi kita berharap bahwa pembenaran data yang benar, karena apa, saya yakin keberhasilan Pak Gubernur bisa menjawab Gubernur Sulawesi, juga karena diawali oleh data yang benar. Namun ini kondisi hari ini Bapak sebagai Menteri yang harus berpikir untuk setiap provinsi, maka data menjadi langkah awal keberhasilan Bapak 5 Tahun kedepan. Maka kepada akita semua, mari kita awali berbicara data, berbicara kejujuran karena sering sekali permainan ketidak benaran atau kebohongan diawali oleh membohongi data dari awal. Maka sekali lagi pada kesempatan ini, 100 hari kedepan, sebagaimana komitmen Pak Menteri bahwa Insya allah kita telah memiliki data pertanian yang benar-benar valid dan benar. Karena apa lagi kita lihat tadi dari penjelasan Pak Menteri tadi, dari 60 temuan, salah satunya juga bagian masalah subsidi pupuk juga karena tidak validnya data. Dimana ini kami penjelasan tadi, bahwa sehingga menjadi bagian temuan BPK. Maka pada kesempatan ini menyangkut subsidi pupuk, saya juga ingin menyampaikan Pak Menteri, tadi Pak rekan kami Pak Duka, telah menyampaikan bahwa banyak sekali pupuk yang subsidi masuk kepada pekebun atau toke-toke besar.

Hari ini juga di Aceh bermasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi, tetapi yang langkah untuk petani, untuk pekebun besar dia tidak langkah pupuk bersubsidi itu. Maka tadi juga Ibu Endang, Eyang Putri, menyampaikan kalau bisa ada lain kita harus inovasi berpikir bagaimana seandainya subsidi pupuk ini kira rubah menjadi subsidi harga, karena selama ini subsidi pupuk dimanfaatkan oleh para pekebun oleh toke-toke besar. Mungkin kalau kita subsidi harga, pasti dimanfaatkan oleh pegabah atau petani.

Kemudian pada kesempatan ini, saya ingin menambah sedikit menyangkut dengan cetak sawah. Saya mungkin sebagai orang baru di komisi ini dan juga baru

datang dari daerah, yang kami tahu bahwa ada cetak sawah di mana-mana termasuk di Aceh. Yang kami paham dan kami lihat malah di Aceh yang cetak sawah di atas gunung. Maka mohon pada kesempatan ini melalui pimpinan, saya meminta data konkrit, semoga untuk seluruh Indonesia, terutama untuk Aceh saya mewakili Aceh, saya mau lihat data itu, karena da cetak sawah Pak di gunung.

Kemudian juga menyangkut dengan program kementerian tentang komando strategi pertanian. Ijin Pak, sehebat apapun program komdando, kalau orangnya, penyuluhnya tidak benar juga tidak akan berhasil. Apa lagi kalau penyuluhnya sekarang kondisinya bukan lagi penyuluh, malah sudah jadi pengeluh. Maka pada kesempatan ini melalui pimpinan, saya juga memohon agar juga dapat diberikan data penyuluh, minimal alhamdulillah untuk seluruh Indonesia atau minimal untuk Aceh. Bisa mungkin kami yang mewakili rakyat Aceh, bisa minta data balik atau memberikan informasi yang benar, sehingga para penyuluh betul-betul orang sehat, orang yang bisa menyuluhkan orang lain, bukan hanya sekedar rekrut. Apa lagi mungkin saya dapat informasi, ada penyuluh pertanian di daerah yang tidak pertanian.

Kemudian yang terakhir, ijin pada kesempatan ini Pak Menteri. Menyangkut dengan kasus yang menimpa seorang Kepala Desa, yang sampai hari ini belum selesai Pak Pimpinan. Bahwa menyangkut dengan benih IF8. Benih IF8 ini awalnya diberikan, ini saya ceritakan kronologis karena sudah sampai ke Komisi IV waktu Pak Edy Pimpinan Komisi IV. Saya ceritakan awalnya sedikit, mohon ijin Pak ketua waktu. Bahwa bibit ini yang berikan kepada petani Nisam Aceh Utara adalah Pak Gubernur, karena Gubernur Aceh ada program Pruto. Jadi kalau bahasa Indonesianya kenyang, perut kenyang. Itu ada program gubernur. Maka memberikan bibit padi. Bibit Padi IF8 ini diberikan kepada petani di Nisam, setelah diberikan setelah dipanen, ternyata padinya bibitnya bagus, sehingga mendapatkan 8 ton/hektar, sehingga masyarakat disekelilingnya berminat mencari.

Karena banyaknya peminat bibiti itu, sehingga salah satu Kepala Desa, namanya Munirwan, melakukan pembibitan itu secara banyak, kemudian mereka memasarkan kepada teman-teman lainnya, sehingga singkat cerita ini saya sampaikan tidak mungkin karena waktunya terbatas. Bibit itu diterima dengan luar biasa di masyarakat Aceh, tapi akhirnya apa yang dirasakan, karena memang kemudian Pak Munirwan ini atas nama BUMdes, beliau memasarkan pupuk bibit itu, beliau dipanggil oleh Polda, kemudian waktu hari dipanggil itu sebagai saksi malah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga terjadi keributan kegonjangan politik di Aceh, dukungan masyarakat muncul kepada Pak Munirwan, tetapi masalah itu di media tidak selesai, kemudian saya membawah kasus itu ke DPR RI waktu itu. Saya menghadap ke Komisi IV, diterima oleh Pak Edhy Prabowo. Saya sampaikan kebeliau, terlepas apapun kesalahan seorang anak bangsa, tugas kita bagaimana membina bukan membinasakannya. Namun Pak Edhy di depan

saya menelepon salah satu direjan pertanian waktu itu, saya tidak tahu siapa, mungkin tanaman pangan, ada yang telepon Pak Edhy menyangkut bibit padi itu, ada yang hadir disini, sudah diganti, oh sudah diganti. Ditelepon di depan saya, menyampaikan tentang kondisi itu, 3 hari kemudian, Pak Munirwan ini dilepaskan, tetapi kasusnya belum selesai, wajib lapor, sampai hari ini. Siapa yang melaporkan beliau adalah Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi. Setelah desakan masyarakat demo masyarakat, kepala dinas melepaskan, mengatakan tidak melapor, sehingga namun singkat cerita ingin saya sampaikan, sampai hari ini, Munirwan masih wajib lapor. Maka saya minta pada Pak Menteri, mari kita hargai inovasi anak bangsa, mari kita bina kalau memang itu ada kekurangan dan kesalahannya, bukan kita binasakan. Ini perlu perhatian karena kenapa, hampir semua petani dan Kepala Desa yang selama ini menggunakan bibit IF8 itu, tidak berani lagi melakukan langkah. Ijin mungkin Dirjen Tanaman Pangan pernah melihat bibit IF8, pernah, belum pernah. Nah kalau pernah mungkin dua hari saya sudah suruh kirim, mau saya kasih. Masa disaat kita bermasalah bukan kita lihat dulu bibitnya, malah kita perkarakan dia. Ini mohon perhatian kita semua, yang namanya kita ingin meningkatkan tarap hidup petani, bukan malah mengorbankannya. Ini mungkin yang terakhir.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam.*

Terima kasih Pak T. A. Khalid.  
Selanjutnya Bapak Sutrisno.

#### **F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.  
Pak Menteri dan jajarannya,

Yang pertama saya akan menyikapi LHP BPK. Dasar hukumnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 huruf e Ayat (3), bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan ke DPR RI itu, ditindaklanjuti.....(suara terputus) tentunya kalau mencermati hal itu, ada tujuan apa, mencari solusi atas apa yang ditemukan supaya ada perbikan, sehingga terbangunlah pemerintahan yang bersih dan baik. Permasalahannya adalah bagaimana mungkin kami ikut bisa memberikan obat sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua, karena bicara persoalan itu bukan hanya

oleh eksekutive juga legislative akan memberikan obat, lewat kebijakan legislativenya kebijakan anggarannya, kalau kesalahan manajemen mungkin oleh eksekutive. Persoalannya adalah data yang disampaikan kepada kita hanya rekomendasi, kami tidak tahu persoalan apa. Sepertinya acara ini, aktivitas ini hanya formalitas memenuhi aturan Undang-Undang, bukan diambil kesempatan bagaimana kesempatan ini diambil supaya mendapatkan solusi terbaik kedepan tidak terulang kembali. Jadi mohon Pak ketua kami tentu ingin mendapatkan apa si persoalannya. Yang jelas tadi Pak Ono, ternyata temuan BPK ada penyalahgunaan 200 miliar. Kemudian Pak ketua menyampaikan dalam pengantarnya, bahwa sudah dibangun, tapi jaringana irigasi tertiernya itu belum dibangun. Ini pasti urusannya urusan anggaran, urusan kewenangan dewan, bagaimana mungkin itu tidak disampaikan. Mohon kedepan jangan hanya berpikir formalitas, kita ini sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan.

Kemudian yang kedua, evaluasi anggaran 2019. Pada RDP yang lalu saya sengaja memancing sebuah pertanyaan, tentang bagaimana ketersediaan dan kebutuhan pangan, tujuannya adalah kita sangat mendambakan, kita ini bisa tercapai Swasembada pangan, kedaulatan pangan. Sesungguhnya yang dicari adalah data. Sudah dijawab terima atas jawabannya di halaman 8 ya. Disini seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, itu tidak impor, yang ada hanya impor daging Sapi 14416 ton dan impor gula pasir 495114, tapi publik tahu, bahwa salah satu penyebab defisit transaksi perdagangan adalah Thailand negara yang urutannya ketiga menerima dolar impor dari Indonesia 6 miliar lebih, menyakini bahwa itu sumbernya pasti dari pertanian. Kemudian ini semua berbicara data, tentang beras stok beras Oktober 2019, 4,7 juta dan hasil produksi 14,59 juta. Tapi laporan dibuku data tentang program kerja, produksi per Oktober itu mencapai 52,82 juta ton. Ini saja bertolak belakang, sepertinya asal dijawab, kami cermati jawaban-jawaban ini, kenapa, data ini akhirnya akan diterjemahkan pada program Tahun 2020. Yang kedua jadi artinya Pak, mohon Pak Menteri untuk sungguh-sungguh disikapi, berikan kami ada apa adanya, kalau bersifat rahasia, ia disampaikan secara khusus, kami juga bisa menjawab, karena ini pasti ada ketersambungan dengan program-program yang akan datang.

Kemudian yang ketiga, evaluasi program 2020. Saya dan tentunya kita semua termasuk Pak Menteri dan jajarannya. Mencermati betul berpegang teguh betul pada apa yang diarahkan oleh Presiden RI, pada saat memberikan pengarahan di Sentul Bulan Juli 2019. Presiden mengatakan, menjamin penggunaan APBN focus, kemudian jelas sasarannya, memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat kepada rakyat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah kalau kita memang memperhatikan arahan Presiden, apa yang disampaikan di halaman 8 ini, mestinya tercermin pada program Tahun 2020, bagaimana kita menghindari tidak impor lagi daging Sapi, kalau toh ia, ia memperkecil impor daging Sapi. Kemudian ada programnya karena coba impor gula 495 ribu ton, bagaimana mengembangkan kebun tebu, apakah masih ada

peluang, tentunya peluangnya mengkaji bagaimana lahan-lahan terlantar akibat kebakaran gambut, mungkin tidak itu dikembangkan untuk pengembangan tanaman tebu. Di dalam rencana anggaran 2020, tidak mencerminkan itu. Artinya apa, persoalan-persoalan yang berkembang, tidak menjadi acuan, dia menjadi dasar pertimbangan bagaimana kita menterjemahkan pada program agar rakyat mendapat jawaban.

Kemudian masalah WTO Pak Menteri. Saya hanya ingin mengingatkan untuk berhati-hati bersikap. Pembukaan Undang-Undang 1945 aliena 4 ya, kehadiran pemerintah negara untuk melindungi rakyat dalam mencapai kemakmuran hidupnya. Tapi disisi lain kita sebagai anggota WTO, mau tidak mau harus tunduk dan patuh pada peraturan. Sepanjang Menteri Pertanian mampu memberikan solusi bagaimana memberikan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945. Manakalah itu tidak, jangan diharap 4 Undang-Undang itu bisa dilakukan perubahan. Karena apa, manakalah itu perubahan membayar rakyat petani untuk kepasar bebas, tidak akan sanggup, tidak akan kuat rakyat kita untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Yang terakhir Pak Menteri, Penyuluh.

#### **KETUA RAPAT:**

Paling terakhir ya Pak ya.

#### **F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Ya siap. Penyuluh ya.

Ini kan kita Pak Menteri mempunyai program baru ini, Kostratani disetiap kecamatan, bahkan juga kantornya mau diperbaki, jangan nanti jadi gudang Jagung, gudang Padi, para penyuluh. Artinya apa, perlu ada persiapan sumber daya manusianya. Saya mohon dengan hormat, sekarang ini setiap kementerian diberikan jatah untuk menerima PNS, tolong jatah itu diberikan dulu untuk para penyuluh penting para penyuluh itu, soal kualitasnya kurang, tinggal bagaimana memberikan pemahaman, diberikan pelatihan agar supaya apa, para ini ada pendampingnya itu. Kami sudah terima usulannya dari koordinator forum penyuluh ada 20 ribu lebih, 3 kementerian, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga KKP, nanti akan kami sampaikan setelah dipotocopy.

Terima kasih Pak Menteri.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bupati.

Selanjutnya Puteri Bupati Jombang, Ema Ummyatul Chusnah.

## **F-PPP (EMA UMMIYATUL CHUSNAH):**

Terima kasih

## ***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pimpinan,

## **Pak Menteri beserta jajarannya.**

Tidak banyak waktu yang saya sampaikan, hanya beberapa hal yang sangat mungkin menggajal dalam hati saya, terkait dengan Kedelai. Kedelai dari data yang tadi disampaikan, realisasi produksi Kedelai yang tidak sesuai dengan target untuk 2019 ini, yaitu 16,4%. Padahal Kedelai merupakan bahan pokok, bahan baku, kita yang biasa makan tempe, tahu, kecap untuk dikonsumsi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah ini yang kami tanyakan, bagaimana rencana program strategis Kementan di Tahun 2020, supaya petani kita mau menanam Kedelai. Nah kira-kira apa yang nanti bisa dilakukan oleh Kementan kedepan 2020 nanti, sehingga sangat menarik untuk petani untuk bertanam Kedelai, sehingga target produksi bisa tercapai. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan program utama 2020 yang juga tadi sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, terkait perkembangan SDM Pertanian termasuk petani milenial. Karena semakin hilangnya minat generasi muda di bidang pertanian, perlu mendapatkan perhatian khusus. Petani milenial ini kami mohon tidak hanya diperhatikan terkait dengan sekolah-sekolah umum, tapi juga di lingkungan Pondok Pesantren. Dalam Madrasah-madrasah ini juga harus diperhatikan bahwa tujuan kita kedepan juga Santripreneur- santripreneur yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Sehingga para santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, di pesantren pulang bisa mengamalkan ilmu pendidikan agama yang didapat di pesantren dan juga ada tambahan ilmu pertanian yang juga bisa dikembangkan di daerahnya masing-masing. Karena tidak menutup kemungkinan, para orang tua dari para santri adalah sosok-sosok petani. Jadi itu kami mohon untuk kedepan untuk lebih diperhatikan. Jadi pesantren tidak kalah pentingnya untuk peningkatan SDM sesuai dengan visi-misi pemerintah mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Itu yang kedua.



Yang ketiga dan ini yang terakhir. Kami sangat mengapresiasi yang telah disampaikan tadi terkait perekrutan penyuluh pertanian. Yang memang sekarang sangat kekurangan Pak di daerah. Sudah kurang tenaga penyuluhnya juga usianya juga sudah dikatakan, saya tidak enak Pak bilang sepuh. Ia seperti itulah Pak. Jadi intinya karena sebenarnya para petani hari ini sangat membutuhkan bimbingan, arahan penyuluh pertanian, yang memang harus update terkait dengan teknologi pertanian. Karena tadi biar seimbang banyak minimal usia petani 50 tahun ke atas hari ini karena dan penyuluh-penyuluhnya juga sama-sama sepuhnya Pak ketua. Jadi harus diimbangi dengan penyuluh-penyuluh update dan mungkin bisa ada teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan dalam bidang pertanian di daerah dan itu kami sangat membutuhkan dan sangat mengapresiasi dan mohon untuk ini untuk segera direalisasikan di Tahun 2020, karena para petani sangat membutuhkan.

Terima kasih, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon diperhatikan.

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Pak Krisantus.

**F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi IV DPR-RI,  
Bapak Menteri beserta jajaran,  
Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua.**

Minggu yang lalu pada RPD minggu yang lalu ada tiga hal yang saya sampaikan, yang pertama mengenai progres Pak Menteri, itu sudah dijawab dengan data. Kemudian yang kedua, mengenai Beras, mengenai Sawit yang ketiga. Dan sudah mendapatkan tanggapan dan sekalipun tanggapan tersebut meluruskan. Jadi saya anggap itu meluruskan. Waktu itu saya menyampaika satu setengah kali Pulau Jawa, luas potensi lahan di Provinsi Kalimantan Barat dan memang dijawab, ada 5500 ton/bulan Kalimantan Barat membeli beras dari Jawa Pak ketua, perbulan 5500 ton.

Tentu ini suatu masalah. Saya pikir harapan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Menteri bisa hadi.

**KETUA RAPAT:**

Coba Pak Krisantus tadi bicaranya yang pertama dengan yang kedua beda. Coba jelaskan, tadi yang pertama berapa, yang kedua berapa supaya jelas. Berapa banyak beli beras dari Pulau Jawa.

**F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):**

Ia. Jadi jawaban dari Kementerian Pertanian, kita defisit dalam satu tahun Pak, 213,16 ribu ton kurang Beras di Kalimantan Barat. Saya tidak dapat bayangkan kalau petani-petani di Jawa ini memboikot tidak menjual beras ke Kalimantan Barat, kelaparan semua kami. Kalau kita kemudian kekurangan beras tersebut dihitung perbulan, 5500 ton/bulan. Itu beras yang didatangkan. Nah ini masalah Pak Menteri. Jadi seperti yang disampaikan Pak Lema, Pak Suhardi Duka, banyak sekali sebetulnya pembangunan-pembangunan yang punya potensi di bidang pertanian. Kami di Provinsi Kalbar ada yang namanya bendungan merowi. Sudah mengahabiskan 100 miliar. Jadi saya tidak pakai kira-kira, ini ajaran Pak ketua, jadi tidak ada perkiraan. 100 miliar rupiah. Habis dibangun bendungan merowi, tapi sampai hari ini tidak ada hasilnya. Ini tentu kedepan mungkin Pak Menteri bisa tinjau kesana bendungan merowi, yang membangun adalah Kementerian PURT. Mungkin bisa koordinas dengan Kementerian PURT.

Kemudian saya perlu tanyakan pada kesempatan ini, masalah cetak sawah. Seperti disampaikan oleh teman saya dari Aceh tadi. Cetak sawah di Kalimantan Barat 23 ribu hektar Pak, bukan padi tumbuh subur, tetapi rumput yang tumbuh subur. Nah ini lewat Komisi IV, lewat Kementerian kita perlu tinjau, bila perlu, perlu aduit ini Pak. Ini memang program yang tidak berjalan, perlu dievaluasi kedepan.

Kemudian mengenai Sawit. Sawit saya dijawab dengan aturan, tetapi saya pikir perlu langkah nyata. Bahwa bukan investor sawit, tapi investor PHP, pemberi harapan palsu. Itu yang ada. Jadi dengan memberikan contoh terhadap perkebunan-perkebunan yang sudah berhasil yang sedikit mensejahterakan rakyat. Coba Bapak-bapak kesana di daerah ini, dulu tidak ada Parabola, ada parabola, dulu tidak ada mobil mereka mampu membeli mobil. Itu perkebunan yang serius buka kebun. Tetapi terhadap perkebunan yang tidak serius buka kebun, dengan pola penyerahan tanah yang tidak seragam, yang tidak ada regulasi secara khusus kita tetapkan dari pemerintah pusat, sehingga daerah mengamil kebijakan-kebijakan sendiri insentif terhadap investor sawit.

Nah sekarang para Kepala Daerah, mohon maaf Pak, mereka takut cabut kebun sawit itu. Sudah banyak sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Pak tentang perkebunan untuk dicabut, tetapi tidak dicabut karena ada ketakutan bagi Kepala Daerah untuk mencabut ijin yang bersangkutan. Bayangkan menyerahkan lahan 10 hektar, 10 hektar itu adalah lahan pertanian mereka, 10 hektar itu adalah lahan karet mereka, karena PHP nya perusahaan tadi, dengan iming-iming kesejahteraan yang luar biasa, mereka serahkan habis lahan itu, apa yang terjadi, begitu panen, 100 ribu rupiah per bulan, 200 ribu rupiah per bulan. Akhirnya mereka jadi kuli di tanah airnya sendiri Pak. Nah ini harapan saya dengan Menteri yang baru ini karena kalau bicara yang dulu, dulu Pak, tapi saya yakin dengan Pak Menteri Pertanian yang baru kita punya harapan baru untuk menegakan peraturan di bidang perkebunan, terutama kepada perkebunan-perkebunan sawit yang nakal, cabut saya ijinnya.

Kemudian yang berikutnya. Dulu kami gampang menjawab, tentang harga Karet dan harga Sawit. Waktu saya di Kabupaten, waktu saya di Provinsi, DPRD Provinsi, ditanya oleh rakyat, bagaimana harga Sawit dan harga Karet, saya jawab, itu pemerintah pusat punya urusan. Nah saya sekarang saya sudah di DPR-RI Pak, ketika seperti apa saya menjawab. Tadi ada jawabannya, perdagangan internasional, kemudian kita batasi eksport, lebih banyak kita gunakan di dalam negeri untuk mencampur aspal, tapi itu jawaban yang tidak memuaskan rakyat. Harapannya Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kita Komisi IV dan Kementerian Pertanian ini, mari kita cari jawabannya, kita carai jawabannya, kita buat satu terobosan agar nama Kementerian Pertanian, nama Komisi IV harus dimata rakyat RI, harus diperdagangan internasional. Itu harapan saya.

Terima kasih Pak.

Saya pikir pas Bapak bilang cukup, memang paslah habis.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya silakan Ibu Yessy. Biar disambung karena sama-sama Kalbarnya. Silakan.

#### **F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):**

Ia baik.

Terima kasih Pimpinan

**Yang kami hormati, Pak Menteri beserta jajaran, pada hari ini bisa Reker bersama kita.**

Saya mungkin rekan-rekan sedikit bosa, karena melihat dan mendengar ketika saya memberikan argumen atau pernyataan, pasti mengenai petani milenial, ia bukan semata-mata karena saya masih muda, tapi karena saya melihat jauh kedepan bonus demografi yang akan kita hadapi, dimana mayoritasnya adalah petani-petani muda. Dan saya sangat respos, ketika Kementerian mengeluarkan satu program, salah satunya program petani magang di Jepang dan saya mencoba untuk melemparkan isu program ini ke masyarakat, pertama lewat account media saya, lewat Facebook, lewat Instragam. Dan luar biasa sekali antusias kaum muda tentang hal ini. Tetapi satu pertanyaan saya dan juga kawan-kawan di luar sana, apa si setelah dari magang yang bisa dibuat oleh anak-anak muda ini tadi. Apakah mereka hanya sebatas kita dorong sebagai pelaku wirausaha di bidang pertanian atau mereka punya suatu ikatan dengan negara dalam hal ini mungkin lebih spesifik dengan Kementerian Pertanian. Mereka punya ikatan semacam ikatan dinas, yang mungkin juga mereka punya program, punya suatu jadwal yang mereka harus pertanggung jawabkan, reguler mereka sampaikan kekita atautkah mereka ini ditempatkan ke wilayah-wilayah yang potensial pertanian, bisa jadi mereka ini semacam role model atau job creator tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan saya. Seperti apa si sebenarnya konsep ini dan seberapa signifikan untuk kita di bidang pertanian, karena kalau mengingat proses sepereti ini, pasti mengeluarkan biaya juga yang tidak sedikit menurut hemat saya dan ini harus berkontribusi juga bagi kita. Jadi minimal kita melihat penekanan impor kita berkurang. Itu yang kita inginkan.

Kemudian pola perekrutan juga Pak Menteri. Ini masih banyak sekali rekan-rekan kita yang tidak tahu tentang program ini. Saya sendiri juga tidak tahu persis seperti apa. Jadi ketika ditanyak misalnya ketika saya turun ke dapil, saya bingung mau jawab apa, prosedur rekrutmentnya seperti apa, mungkin lebih transparan dan kalau bisa jangan java sentris, kalau bisa seluruh provinsi ini dilibatkan. Mungkin bisa dilihat dari Peta-peta potensial komoditi sesuai wilayah tertentu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya juga menyinggung tentang bank tani. Tadi Ibu Endang juga sudah mengupas habis dan mungkin saya sedikit memberikan tambahan. Ini konsep juga sangat ditunggu oleh masyarakat kita, tapi satu pertanyaan saya, seberapa program ini akan benar-benar mampu kita realisasikan dalam jangka 5 atau 10 tahun kedepan, karena ini dana pihak ketiga saja kita masih bingung, sumbernya dari mana untuk diberikan kepada petani. Dan saya sedikit memberikan gambaran tentang bank tani ini, pemerintah boleh berpikir tentang hal ini atau lembaga keuangan semacam selainnya selain bank. Di Kalimantan Barat kami ada salah satu kredit Union Pak Menteri. Nah ini luar biasa baik. Saya pernah berpikir, apa perlu dari pemerintah ataupun dari Komisi IV DPR-RI melakukan observasi ataupun berkoordinasi lebih jauh dengan pihak kredit union ini, karena saya melihat disana mereka memang pasarnya masyarakat menengah kebawah.

Kalau kita bongkar lagi status menengah kewabah itu siapa, ia petani kebanyakan. Dan disana itu mereka tidak hanya memberikan dana, memberikan pinjaman, proses pinjamannya sebenarnya juga sama seperti perbankan konvensional, jadi bank umum sama, agunannya sama dan pola segala macam tata cara kreditnya sama semua. Tapi kenapa kredit unio ini bisa berhasil dan bahkan mereka saat ini bukan hanya memberikan pinjaman berupa dana, tapim mereka juga menyiapkan market, mereka juga punya pasar. Nah ini bagi saya itu luar biasa, suatu terobosan kenapa sekelas kredit unior saja bisa, tapi kita negara pemerintah yang notabene segala sesuatu tinggal minta, duit sudah ada, anggaran sudah disiapkan, tetek bengek dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah dibiayai oleh negara, kenapa kita tidak mampu. Nah ini pertanyaan juga bagi kita semua. Dan saya ingin mungkin ada semacam perbandingan atau kita boleh study kasus kesana atau apapun sistem saya siap untuk memfasilitasi, karena saya juta intens komunikasi dengan bagian dari kredit union ini juga.

Kemudian yang terakhir, masalah data. Saya setuju ini sangat penting. Dan saya menginginkan satu cita-cita, bisa tidak Kementerian dalam hal ini Pertanian, menyajikan, mengolah, memberikan data itu per wilayah, misalnya wilayah Kalimantan Barat, ini cocoknya pertanian bidang apa ya, Jagung apa Kedelai dan tidak semuanya tumpang tindih disuatu provinsi saja, karena saya yakin, tanah Indonesia ini sangat subur, apapun yang di tanam di sana, saya rasa akan sangat mudah dan tidak susah untuk tumbuh. Contoh, saya melihat sedikit masalah Kedelai. Ini kecil sekali realisasi target kita di Tahun 2019 dan tandatanya juga bagi saya, 2020 ini diturunkan lagi menjadi 1,12 juta ton kalau tidak salah dari 2,8 sekian juta ton. Nah ini saya bingung, sebenarnya apa si permasalahannya kenapa Kedelai ini tidak bisa mengangkat ketahanan pangan kita khusus untuk Kedelai.

Sementara saya juga sudah pernah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait di Provinsi, bahwa sebenarnya Kedelai ini sangat mudah hidup, sangat mudah ditanam, bahkan di Kabupaten kami di Melawi salah satu dapi saya, itu belum ada program bantuan untuk bibit atau benih kedelai, tapi mereka sudah mencoba, sudah observasi sendiri dan itu berhasil sangat baik. Hanya keluhan dari mereka, ketika kami, oke kami tanam Kedelai, tapi marketnya apa.

Nah mungkin ini juga bisa dipikirkan kita bersama, bahwa pemerintah dan petani dalam hal ini hanya sebatas input, misalnya memberikan bibit, pupuk, pelatihan dan segala macam, tetapi market, pasarnya yang kita belulm ada dan ini keluhan hampir semua petani di daerah dan juga mungkin secara nasional.

Yang terakhir, mungkin itu market tadi, Kedelai juga sama dan pertanyaan saya, apakah ketika kita menurunkan target realisasi Kedelai kita, tidakah ini semangkin membuka keran impor kita terhadap Kedelai. Karena kita tahu kebutuhan nasional rata-

rata kedelai pertahun hampir 2 setengah sampai 3 juta ton kalau tidak salah. Nah ini juga menjadi polemik bagi kita dan kontroversinya juga bersamaan dengan kasus WTO kita saat ini. Jadi semangkin seolah-olah kita ini kalah dimata internasional.

Mungkin itu saja Pimpinan dan Bapak Menteri beserta jajaran bisa saya sampaikan, selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Effendy.

**F-PDIP (Ir. EFFENDY SIANIPAR):**

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan Komisi IV dan pihak Kementerian dan jajarannya.**

Saya sedikit mau melapor kepada Pak Menteri. Dari waktu masih Pak Bambang Dirjen, kita telah menjajaki tentang Replanting di Riau. Dan pada prinsipnya BPDPKS setuju. Yang menjadi masalah adalah tidak tepatnya dan tidak tanggapnya dinas-dinas di Riau melaksanakan, sehingga sekarang tidak terserap uangnya yang telah dicadangkan, kalau tidak salah ada Pak Bambang, ada Pak Dirjen yang baru, disini Pak Kasdi, satu triliun Pak, paling terserap berapa Pak, tinggal 300 yang belum terserap. Jadi Pak Sudin, karena saya yang di Riau, saya melihat sendiri dan ikut terlibat sudah teralokasilah 900 an kalau tidak salah ya Pak ya, kemarin kita rapat terakhir. Kita rapat terakhir dengan gubernur dan kita telah buat pertemuan dengan dinas, cuma masalahnya satu, kurang gesitnya dinas-dinas di daerah karena mungkin masalah fasilitas yang tidak ada buat mereka, karena langsung uangnya masuk kerekening dari pada pengusaha rakyat dan terjadi tadinya dulunya ini masuk ke koperasi dan sekarang kita arahkan masuk langsung kepada petani. Jadi mungkin agak malas dinas itu, maka kita diangkat waktu itu oleh dibuat SK kepada anak-anak di Riau untuk mensosialisasikan dan mendorong percepatan.

Jadi saya kira itu supaya Pak Menteri bisa kita dorong. Dananya langsung dari BPDPKS dan kami rapat dengan BPDPKS dan mereka mereka sudah melonggarkan syarat-syaratnya. Tapi ini supaya ini terus kita laksanakan, tadi kita bicara tentang BPDPKS dan kami dengan Pak Kasdi, dengan Pak Bambang telah melaksanakannya, memang uangnya masuk kerekening dari pada masyarakat. Jadi satu masyarakat maksimal 4 hektar bisa dapat 100 juta dan kekurangannya dipinjamkan dari bank. Itu hadir dirjen, kita bertemu dengan gubernur kira-kira dua minggu yang lewat ya Pak ya,

dan sudah mengeluh karena uangnya tidak terserap. Tapi dikasih kelonggaran bisa diambil uangnya disisihkan dulu kira-kira 300 untuk menutupi telah dirkomtek.

Dan yang terakhir. Di Riau itu Pak yang ada hanya Sawit dan Karetlah yang utama. Jadi pertanyaanya selalu, kenapa harga karet murah yang tadi banyak teman-teman kasih tahu. Kalau kita kasih alasan Pak dia tidak mungkin percaya, karena dia tahu pemerintahlah yang memikirkan dari pada kenaikan harga sawit ini, karena mencakup kehidupan masyarakat. Jadi saya mengimbau kepada Pak Menteri, kita bicarakan, kita pikirkan. Kalau alasan kita bilang WTO, ini segala macam, luar negeri, tidak masuk akal mereka, karena yang tahu mereka Pak, bahwa negaralah yang memikirkan harga karet ini, harga karet dan sawit. Kadang-kadang harga sawitnya bisa 600 Pak, jadi kalau dipanen rugi. Jadi mereka langsung tidak memanen sehingga rontok sendiri dan tidak terpakai. Saya kira perlu sekali bahan pemikiran kita Pak Menteri dengan Pak Ketua, alasan apa yang pernah kita duduk bersama Pak, dan pernah ini saya tanya waktu Pak Jokowi kampanye di Riau, beliau kalau tidak salah saya sudah berpidato, sehabis pemilu ini harga karet bisa 10 ribu, harga sawit 1600. Jadi saya kira ini perlu didorong oleh Pak Menteri, nanti DPR saya kira tinggal membantu. Jadi sangat penting karena di Riau ini Pak, yang ada hanya karet, minya, minyak sekarang juga turun Pak, sangat jauh. Jadi sangat kurang sejahtera masyarakatnya. Jadi saya kira ini bahan pemikiran Pak, khusus Riau itu kita perhatikanlah Sawit, Karet dan tadi Replanting Pak. Dan 260 miliar kalau tidak salah saya Pak ya, uangnya BPDPKS ini untuk membangun sarana dan prasarana pertanian untuk jalan produksi, untuk mengangkut sawit.

Jadi ini saya kira memang kemarin itu ada 18 persyaratan, kalau sekarang sudah tinggal 8 ya Pak ya. Sudah tinggal 8 kami revisi, yang penting bisa berjalan. Saya kira ini perlu diperhatikan untuk Riau.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Fachry Pahlevi.

**F-PAN (FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri Petanian beserta jajarannya**

Saya disini ingin bertanya tidak banyak-banyak, cuma satu pertanyaan saja Pak Menteri. Sebenarnya seberapa serius pemerintah dalam hal Kementerian Pertanian dalam mengenai menangani serta membantu daerah-daerah yang lahan pertanian dan perkebunannya terkena dampak bencana alam. Mengapa saya bertanya demikian Pak Menteri, karena Dapil saya Sulawesi Tenggara, Bulan Juli kemarin itu terkena dampak Banjir Bandang. Dampak Bajor Bandang terbesar itu di dua kabupaten, yakni Kabupaten Konawe dan juga Konawe Utara. Yang hampir seluruh wilayah di dua kabupaten tersebut terendam banjir. Banjir Bandang juga itu selain merusak rumah-rumah warga, merusak infrastruktur, merusak juga lahan pertanian dan lahan perkebunan yang ada. Berdasarkan data yang disampaikan Pak Menteri, yang saya dapatkan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe, lahan pertanian dan lahan perkebunan yang rusak ini, yakni 9193 hektar sawah siap panen jadi gagal panen. 363 hektar Jagung rusak, 30 hektar Kacang Tanah rusak, 1074 hektar Hortikultura rusak dan juga 707 hektar perkebunan produksi rusak. Ini baru dari segi pertanian dan perkebunan saja, belum lagi data dari peternakannya. Banyak ternak-ternak masyarakat yang terkena dampak banjir, baik itu hilang, sakit, mati maupun potong paksa, yakni Sapi 2347 ekor, Kambing 1240 ekor, Babi 1662 ekor, Ayam Kampung, ini yang paling besar Pak Menteri. Ayam Kampung, Ayam Potong dan juga Ayam Petelur ini sampai 76.129 ekor.

Kalau mungkin teman-teman dari Kementerian ini melihat angka-angka ini mungkin seakan tidak percaya, tetapi kenyataannya demikian. Saya punya ayam petelur saja Pak Menteri, 2200 ekor itu, sakit dan mati, karena terkena banjir kemarin, karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe itu terendam banjir kemarin, selama kurang lebih satu bulan. Jadi dari data tersebut bisa kita bayangkan, berapa besar kerugian yang diderita oleh masyarakat dan itu baru satu kabupaten saja yang terkena dampak, tetapi sampai kemarin Jumat saya turun ke daerah, bantuan-bantuan pasca banjir dari Kementerian Pertanian, dalam rangka merevitalisasi kembali lahan pertanian dan perkebunan yang rusak, belum terealisasi sampai sekarang, sudah kurang lebih hampir 6 bulan ini Pak Menteri. Yang ada kemarin saya dapat info, baru bantuan benih, itupun masih berada di provinsi, belum terealisasi sampai turun kemasyarakat. Proses birokrasi yang panjang juga inilah yang jadi suatu problem, sehingga realisasi mengalami keterlambatan. Ini mungkin PR kita bersama Pak Menteri, bagaimana supaya proses ini jangan terlalu panjang, kasihan masyarakat. Petani kita di sana itu Pak Menteri, sebelum terkena banjir sudah susah, setelah kena banjir tambah susah sudah. Makanya itu saya harapkan Pak Menteri ini memiliki perhatian khusus kepada daerah-daerah yang kena banjir tersebut.

Ya mungkin demikian.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***



## **KETUA RAPAT:**

***Waalaikumsalam.***

Ustad. Hermanto.  
Tiga menit ya Pak Hermanto ya.

## **F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Siap Pak Ketua 3 menit lebih sedikit.

***Bismillahirrohmanirrohim.***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri, Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati.**

Pertama saya ingin mencermati tindaklanjut dari hasil pemeriksaan BPK. Saya melihat disini ada semacam niat yang sungguh-sungguh dari Pak Menteri, ini betul-betul saya sampaikan apresiasi, semoga niat baik dan tujuan baik ini, Pak Menteri bisa menuntaskan temuan-temuan dari BPK, karena limit waktunya pun juga sudah sangat kasip. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan, bahwa Kementerian Pertanian itu mendapatkan WTP dua kali berturut-turut. Begitu Pak Sekjen ya, sudah tiga kali. Ia berarti kalau tahun berikutnya dapat WTP, berarti yang keempat kali. Jadi ini awal baik buat Pak Menteri. Ini awal yang baik, awal yang bagus kalau Pak Menteri sukses dalam menjaganya, artinya tiga kali berturut-turut itu sudah hatrick namanya. Hatrick ini sangat jarang terjadi, kalau satu kali lagi yang keempat, nah berarti ini lompatan yang luar biasa kinerja Pak Menteri ini, Kementerian Pertanian.

Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan, kedepannya agar realisasi antara Kementerian dengan Dinas, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Kota, ini supaya ditata ulang secara baik, untuk menciptakan *good governance*. Dalam hal kaitannya adalah untuk mendistribusikan program-program kementerian, wabillhusus itu adalah program untuk yang bersifat berbasis masyarakat. Sejauh ini kami di lapangan itu mencermati, itu selalu ada kendala dan bahkan juga baik kendala yang terkait dengan soal penyerahannya maupun administratifnya dan juga kadang-kadang ada klaim dari pihak tertentu yang mengakibatkan anggotanya yang seharusnya itu sebagai yang harus melakukan hadir disitu, itu tidak dapat hadir. Ini saya minta supaya relasi ini perlu di tata secara baik.

Kemudian yang ketiga, Untuk Dapil Sumatera Barat dan untuk Daerah Sumatera Barat, kami minta supaya juga program-program yang berkaitan dengan exavator

kemudian perbaikan irigasi, kemudian juga terkait dengan program-program pupuk, kalau saya lihat laporannya UFO ini sudah kembali ke Dirjen PSP ya, bukan lagi tanaman pangan. Jadi saya pikir ini relatif lebih agak longgar. Relatif lebih agak longgar karena juga ini adalah kepentingan untuk kita bagaimana tanaman kita ini sudah organik. Ini sudah 3 menit apa belum.

**KETUA RAPAT:**

Sudah Pak.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Sudah.  
Terima kasih.

Jadi ini Pak Menteri pesan saya, supaya pupuk organik ini juga adalah mengatasi kelangkaan pupuk non organik, karena selama ini pun juga RDKK itu pun juga, itu selalu mengalami kekurangan pada anggota-anggota, karena ini dicermati ternyata, ada juga jalur dari pada pupuk RDKK itu tidak mengalir kepada kelompok-kelompok tadi itu. Nah ini juga perlu kami ingatkan.

Demikian Pak Ketua.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ichsan Firdanus.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Terima kasih Ketua.

***Bismillahirrohmanirohim***  
***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri, sebelah kanan Pak Menteri.**

**Terima kasih Pak Menteri.**

**Pak Menteri yang saya hormati, Eselon I  
Pimpinan yang saya hormati juga.**

Tadi banyak hal teman-teman yang sudah menyampaikan, tapi ada beberapa hal. Saya minta ijin Pak Ketua. Setidaknya ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan kekuatan Karantina kita Pak Menteri. Hari ini saya mendengar di media sosial ada wabah.... kalau tidak salah di Medan itu ya, di Sumatera Utara Pak Sekjen. Saya teringat cerita dengan bawah rabies di Bali tempo hari. Ini sudah kita bahas berulang-ulang pada saat pembahasan RUU Karantina kemarin. Saya khawatir kalau kemudian wabah ini mengejala, ini akan merugikan Sumatera Utara, bukan hanya Sumatera Utara. Saya ingin mempertanyakan kekuatan Karantina kita Pak. Saya ingin Pak Menteri betul-betul memberikan perhatian khusus terkait dengan karantina ini.

Pertama Pak, saya ingat pada kasus di Bali, itu merusak pariwisata di Bali Pak, pada saat rabies itu muncul. Saya khawatir kalau kemudian kasus Virus Babi ini muncul, lalu kemudian mengejala lalu mewabah. Ini bukan hanya merugikan peternak Babi Pak, tapi bisa mengarah ke Manusia. Saya minta Pak Ketua, kita harus kunjungan khusus ke Sumatera Utara untuk mengecek hal itu dan Pak Menteri memberikan perhatian khusus, karena bagaimanapun ini dampaknya bukan hanya dampak persoalan peternakan Pak, tapi dampak pada manusia dan merugikan secara sosial ekonomi masyarakat.

Saya berharap Pak Menteri melakukan evaluasi khusus pada Karantina ini, karena kita sudah punya Undang-Undangnya, sekarang Undang-Undangnya sudah kita terbitkan, sudah tetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR, tinggal kita segera melakukan upaya penguatan karantina ini. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak, terkait dengan impor Bawang Putih Pak. Ini semakin menarik impor bawang putih ini, karena pertanggal 13 November, saya minta Pak Dirjen Horti mana Pak. Betul Pak ada permintaan 3946 Tahun 2019, betul Pak mencabut kewajiban luas lahan untuk 5% itu, tidak. Menanam setelah. Pada konteks ini Pak, kita sudah berdebat di Tahun 2016, ini mudah saja sebenarnya bagi para importir untuk melakukan upaya memanipulasi data Pak. Ambil contoh misalnya terkait dengan importir. Saya sebagai importir Pak. Mengajukan import. Setelah itu kami diwajibkan untuk menanam. Begitu kan Pak. Lalu kemudian kami tidak menanam. Itu sanksinya itu berarti dia tidak boleh imporkan. Nah begitu kan. Kalau saya mudah saja sebagai importir, saya ganti saja perusahaan saya Pak., saya pakai orang lain. Nah hal seperti ini menurut saya konsistensi terhadap peraturan keterkait wajib tanam ini, ini juga perlu dievaluasi. Ini sudah berapa tahun Pak permintaan ini, tidak, bukan sebelumnya, 2 tahun. Baru 2 tahun, lalu kemudian dievaluasi lagi Pak Menteri. Ini perlu dicek betul Pak. Jangan sampai ini upaya-upaya mengakali saja. Jadi para para importir-importir ini mengakali peraturan kemudian lalu dirubah-rubah lagi, lalu kemudian bingung lagi.

Sejak Tahun 2019 ada 69 importir yang menangani RIPH Pak, tapi hari ini belum diterbitkan. Nah hal ini perlu dievaluasi betul Pak. Saya minta ini dipantau betul terkait

dengan hal ini, ini keluhan-keluhannya Pak. Wajib tanam itu saya sebenarnya setuju Pak dengan wajib tanam itu. Tapi kalau setelah melakukan impor, kemudian baru melakukan wajib tanam, ini ada apa itu ya. Dulu kita berdebat terkait dengan wajib tanam itu, sekarang dirubah lagi peraturan wajib tanam ini. Tolong dievaluasi Pak. Saya minta ini jangan sampai terlambat. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini data pangan. Tadi Ibu Ali mengatakan bahwa ada Tahun 2019 itu ada 80 target, 82,08 juta ton gabah kering giling, betul kan, yang kemudian gara-gara KSA menjadi 52 juta ton. karena KSA berarti ada perubahan angka luas lahan. Bukan begitu Pak. Pak Dirjen tanaman pangan mana Pak, Pak Dirjen mana, Pak Dirjen Tanaman Pangan tidak ada ya, berhalangan Pak ya.

**KETUA RAPAT:**

Coba kalau Dirjenya tidak ada, jawab dulu, harus jelas.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Asumsi 82,8 itu, luas lahan teknisnya berapa Pak, saya mau tanya dulu Pak. 82 koma sekian juta ton gabah kering giling itu berapa luas lahannya Pak.

**SESTAMA PANGAN:**

Baik Bapak.

Jadi asumsi awalnya luas lahannya itu 8,1 Pak.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

8,1 juta.

Menurut data BPS, kita punya 7,1. Berarti ada penyimpangan Pak selama ini mengenai data itu. 8 juta hektar, kemudian berubah menjadi 7,1. Berarti asumsinya selama ini, berarti subsidi pupuk, bantuan benih juga akan mengalami persoalan. Bukan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, 2020 subsidi pupuk 26 triliun, itu asumsi luas lahannya berapa Pak, berapa, 7,1. 7,1 bukan 7,7, bukan 8,1. 7,1 ok. Subsidi Tahun 2019 berapa Pak?

**SESTAMA PANGAN:**

30, tapi 2 koma sekian bintang.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

2,1 itu bintang dari asumsi 30 subsidi, subsidi pupuk 30, lalu berkurang menjadi 26, dengan asumsi bahwa luas lahannya 7,1. Bantuan benihnya Pak?

**KETUA RAPAT:**

Ijin Pak Ichsan.

Anda Seksi kok tidak tahu data, bagaimana. Bagaimana mau selesaikan masalah, data saja tidak tahu. Ini selama ini kami diam lho Pak. Kalau data saja tidak ada, berapa yang disubsidi, berapa luasan, mau jada apa Kementerian begini.

Lanjutkan Pak Ichsan.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

la maksud saya begini Pak Menteri, artinya 7,7 hektar merubah menjadi 7,1 dengan berkurang 26 triliun. Itu artinya asumsi pupuk juga harus berubah, asumsi bantuan benih juga berubah. Kan begitu. Makanya kemudian saya ingin agar asumsi-asumsi yang selama ini bermasalah, itu perlu kemudian Bapak tanggulangi. Saya inta Pak pada saat reker kita pertama dengan Pak Menteri, saya sudah ingatkan Pak Menteri untuk minta turunannya Pak dari perubahan data dari data yang selama ini bermasalah menjadi data KSA lewat BPS itu. Saya minta itu Pak. Artinya hari ini saja kita sudah simpang siur, data BPS 7,7, menurut Pak Sekjen 8,1. Bayangkan Pak ada 300 ribu hektar Pak, kalau kemudian dalam asumsi subsidi pupuk itu ada 30% saja bermasalah ditingkat bawah, lalu kemudian ada perubahan luas lahan dari 8,1 menjadi 7,7, lalu berubah lagi menjadi 7,1, berapa triliun rupiah penyimpangan kita Pak. Ini yang ini saya menyatakan bahwa, ini kita harus berubah Pak, harus cepat berubah itu. 8,1 ke 7,1 ada satu juga hektar, 1 juta hektar Pak lahan kita bermasalah, ini kemana larinya satu juta hektar subsidi selama 5 tahun Pak, untung ada BPS. Itu baru ketahuan di BPS Pak, belum ada penyimpangan juga kalau kemudian geo special kita, ada penyimpangan juga di lapangan. Berapa subsidi yang harus kemudian menghilang begitu saja, belum problem kurang bayar PT. Pupuk Indonesia itu Pak. Satu juta hektar. Saya membayangkan 5 tahun 1 juta hektar itu luar biasa Pak, apakah kita perlu mengadu pihak yang berwajib, saya tidak tahu juga. Harus kita tanyakan dulu Pak asumsi itu. Itu yang ketiga.

Yang keempat, terkait dengan benih. 2017 saya ingat sekali bahwa masih ada subsidi benih. Tetapi Tahun 2018 itu sudah dicabut subsidi benih. Betul Pak? sudah dicabut subsidinya Pak, betul ya, subsidinya sudah dicabut, hanya berupa bantuan benih saja. Bayangkan Pak, petani Pak, apakah karena ini kebijakan WTO Pak, atau

karena kebijakan Kementerian Pertanian atau kebijakan Bappenas. Saya mau tanya Pak. Kebijakan Kementerian atau kebijakan Bappenas Pak, Kementerian Pertanian. Jadi subsidi benih sudah dicabut sejak Tahun 2018 karena kebijakan Kementerian Pertanian dengan berbagai macam alasan. Saya minta Pak, subsidi benih itu coba dievaluasi lagi Pak. Dengan asumsi 7,1 hektar Pak, bukan 7,7. Nah berapa bantuan benihnya, berapa subsidi benihnya itu harus synergy dengan subsidi pupuk, jangan sampai kemudian ada penyimpangan satu juga hektar. Itu yang keempat.

Yang kelima, saya ingin mengingatkan saya Pak Menteri, kalau nanti ada panen Pak, betul-betul panen raya Pak, bukan panen yang dirayakan Pak. Saya hanya mengingatkan itu Pak. Jangan sampai panen itu dibilang panen raya padahal baru 100 hektar Pak panennya Pak, Pak Menteri tahulah, karena saya yakin Pak Menteri setelah jadi Gubernur dua periode, tahu membedakan mana panen raya mana panen dirayakan. Bukan begitu Pak Menteri ya, paham ya Pak ya. Saya minta betul-betul sungguh-sungguh Pak. 2020 kita sedang ada resesi krisis. Jangan sampai resesi krisis ini kemudian diperparah dengan sebuah berita-berita, panen raya 100 hektar. Pada yang dimaksud dengan panen raya itu ribuan hektar Pak, kemudian disorot oleh TV Pak, begitu banyak TV, tapi kemudian lahannya cuma satu hektar Pak.

Dan yang terakhir Pak Ketua. Kalau asumsinya 59,15 juta ton gabah kering giling, berarti asumsinya adalah kalau dijadikan beras berubah beras itu kira-kira sekitar 50% betul Pak, berapa, 60. Kalau 82 juta gabah kering giling saja kita kemudian melakukan import, kemarin itu Pak sudah impor 1 juta. Kalau asumsinya 59,15, apakah kita akan impor Pak 2020. Saya ingin mengingatkan saja, hati-hati mengambil kebijakan import, import itu bukan barang haram Pak, tapi hati-hati. Asumsi 59, yang katanya kemarin Swasembada pangan Pak, swasembada beras, tapi ternyata impor terus Pak 2 tahun berturut-turut. Kalau asumsinya 59,15, saya khawatir kita melakukan impor. Hati-hati Pak. Jangan sampai betul kata teman-teman tadi ada 1 juta ton beras di gudang bulog itu busuk, karena laporan dari Direktur Bulog. Impor bukan barang haram, tapi momentumnya Pak yang harus diatur, jangan sampai merugikan petani. Harga eceran tertinggi pupuk juga kita belum pernah evaluasi sampai dari Tahun 2012. Ini banyak agenda Pak Menteri yang harus kemudian diselesaikan, tapi saya berharap kita sekitar Januari, kita lihat wajah baru Kementerian Pertanian dengan Pak Menteri. Kita tunggu Pak Menteri Januari.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ibu Nur'aeni.

**F-PD (NUR'AENI):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan Komisi yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta para jajarannya,**

Langsung, mungkin yang pertama, saya mencoba untuk menyikapi terhadap tindaklanjut. Sebelumnya memberikan apresiasi, bahwa Kementerian Pertanian sudah mendapatkan WTP ya, tiga kali beturut-turut, akan tetapi semoga keberhasilan ini tidak hanya puas sampai disini Pak, harus lebih ditingkatkan lagi, dipertahankan. Yang lebih penting lagi bagaimana juga meningkatkan kualitas kinerja para ASN nya. Tadi yang terjadi yang teman-teman sampaikan koordinasi yang lemah, birokrasi yang berbelit-belit, ini mudah-mudahan juga bisa ditepis, karena sudah hebat. Tapi kalau ada hal-hal yang teknis dibawah masih kurang, tentu ini juga apa yang sudah dilakukan investasi. Tentu yang lain kaitan dengan LPH ini juga, saya juga memberikan masukan agar Kementan juga harus mampu untuk bisa menguatkan pengendalian secara internal. Yang kita lihat bahwa penyaluran pupuk bersubsidi juga masih menjadi kendala, masih menjadi temuan. Tentu ini juga pengendalian internal yang masih kurang dari sisi pengawasan atau dari kelembagaannya yang memang harus betul-betul diawasi, baik dari menteri maupun dari jajaran eselon yang dibawahnya. Serta kepatuhan dan kepatutan terhadap perundang-undangan juga jangan diabaikan. Tapi sependapat ya dengan Pak Ichsan, bahwa impor itu bukan suatu yang haram, tapi bagaimana itu sesuai dengan peraturan kuota dan sebagainya ini juga harus diperhatikan.

Nah saya juga memohon bahwa kedepan ini kita masih banyak PR harus kita lakukan sinergy kerja keras juga. Salah satunya bagaimana meningkatkan produktifitas hasil pertanian kita, juga bagaimana pengendalian terhadap impor juga, jangan terlalu berlebihan yang akhirnya menyengsarakan petani kita. Bagaimana juga Kementerian Pertanian dan jajarannya ini bisa mensejahterakan, bisa meningkatkan hasil nilai tukar petani dan petani menjadi bahagia, rakyatnya makmur semua pada senyum. Ini PR yang kedepannya.

Terus kalau melihat dari pada realisasi anggaran Kementan, ada dua Dirjen PSP dan Tanaman Pangan, ini realisasinya ini terendah di angka 66%. Yang ingin saya tanyakan, mengapa benar yang terdahulu tadi tanya, apakah tidak mampu menyerap atau memang rencana kerja dengan pelaksanaan itu tidak sesuai. Nah ini harus dijawab. Dan saya juga melihat bahwa ada anggaran tertinggi yang diserap, yaitu di Dirjen Perkebunan. Anggaran tinggi juga tidak selalu serta merta, bahwa pelaksanaannya itu sesuai sasaran, tepat sasaran atau memang sudah dipikirkan dari sisi output-outcome bahwa pada benebit. Saya sependapat, bahwa kita harus

mengukur anggaran besar disalurkan, tapi kalau tidak, mengukur dari output-outcome serta benefit, ia untuk apa juga. Terkesan hanya bentuknya seremonial saja, jadi tidak hanya di angka riil sekian kampanye realisasinya. Tapi apa yang didapatkan, misalkan dari sekian bentuk yang digulirkan sarana-prasarana traktor. Satu traktor itu bisa untuk bisa untuk mentraktor berapa sawah, itu kan harus dipikirkan. Berapa kontribusi terhadap produktifitas hasil pertanian padi kita.

Nah berikutnya. Saya melihat bahwa realisasi produk kementerian, seperti Kedelai khususnya Bawang Merah, serta Cabe Merah. Ini mengalami peningkatan produktifitasnya ya di 2019. Pertanyaan saya, kok tadi teman-teman bersuara masih saja si banyak impor, jenis barang-barang tersebut benar atau tidak. Itu ya minta jawabannya.

Terus kaitan dengan anggaran 2019. Sepertinya Kementan masih ragu-ragu untuk bisa menetapkan target produksi pertanian kita, masih saja diangka yang sama dari Tahun 2019, contoh, misalkan target bawang merah, padahal kan lebih 102%. Tapi masih saja menslot untuk pencapaian proyeksi di 2020 itu hanya sekitar 1,56 itu ya. Itu seperti apa. Berarti ada masih ragu-ragu. Ataukah memang ada indikasi atau mungkin ada hal yang lain yang direncanakan untuk bisa melakukan importir besar-besaran. Nah itu juga saya ingin tahu.

Tahu Tahun 2020, kalau itu sudah ditetapkan, paling tidak saya berdoa semoga saja apa yang sudah ditetapkan ini bisa direalisasikan dengan sesuai harapan kita semuanya. Yang terpenting fokusnya ini harus tepat sesuai dengan harapan-harapan petani kita.

Dan yang terakhir bahwa mohon dari pertanian ini jangan asal mengeluarkan ijin terhadap alih fungsi lahan, karena ini akan juga menggeser terhadap jumlah luas lahan pertanian kita. Saya dengar juga di Provinsi Banten, dengan memiliki 77 ribu hektar lahan pertanian, ini juga berlomba-lomba ya untuk merubah RT/RW yang awalnya zona hijau. Ini rata-rata ini untuk bisa diakal-akali dijadikan zona kuning dan sebagainya. Mohon dari kementerian juga untuk membatasi itu, karena saya khawatir Pulau Jawa ini sebagai lumbung ya, produksi pertanian cukup besar, khawatir kalau semua melakukan perubahan-perubahan ataupun ahli fungsi lahan untuk bisa menetapkan jumlah luas lahan, ini juga akan membahayakan terhadap nilai produksi pertanian kita.

Nah dan yang terakhir, tentu kita berharap bahwa seperti program-program penyaluran alat-alat pertanian, irigasi pertanian, pupuk dan sebagainya. Ini juga mohon di Provinsi Banten juga diperhatikan.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah***

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***



**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ustad. Haerudin.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Sampurasun

**Pimpinan anggota yang terhormat,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran dan stakeholder Pertanian yang hadir pada  
Sore hari ini yang juga saya hormati.**

Ingin kami sampaikan Pak Menteri, kalau dari amanahnya salah satu Walisongo Kanjeng Gusti, Kanjeng Sinuwun Tunggal Jati Syekh Syarif Hidayatullah, sampaikan untuk Pak Menteri, titip.... fakir-miskin. Titip tempat ibadah, titip rakyat jelata. Tentu pesan itu adalah pesan moral yang bukan untuk orang kecil, untuk kita yang mengurus orang banyak.

Yang pertama Pak Menteri, ada bahasa kita kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, swasembada pangan. Ingin kami simpulkan bahwa kedaulatan pangan itu tentu petani kita jadi subjek, bukan objek. Jadi kelas mereka itu bagian dari sebuah kekuatan negara agar negeri ini bisa mencapai tujuannya sejahtera, berkeadilan, berkemakmuran. Yang sampai hari ini kita saksikan dimana-mana, petani kita itu masih jadi objek bahkan petani kita itu masih bisa hanya cukup untuk dimainkan. Tentu kita bagaimana tidak geli mendengarnya, ada peraturan Kementerian Pertanian. Bawang Putih petani berhenti, importir impor dulu baru nanti tanam, apa jaminannya. Kecuali mereka menyimpan duit, ini besar duitnya, besok hari baru impor, ini duit kalau aku tidak tanam oleh negara, kasih ke rakyat. Nah kalau begitu kren itu. Ini diberikan ruang yang sangat gratis, yang dikorbankan rakyat jelata dan bangsa kita sendiri. Bagaimana kita tidak merasa batin kita terganggu, pikiran kita terganggu, bagian dari tanggung jawab terutama dipundak Pak Menteri hari ini. Tentu butuh evaluasi. Dan saya ingin sampaikan ke Pak Pimpinan, kita ini punya perangkat yang baik, ada Pansus, ada Panja, mana yang kira-kira pas untuk mengevaluasi total tentang pangan ini, karena kita tidak bisa dengan cara rapat kerja, waktunya terbatas, waktunya pendek. Kita tahunya hanya parsial, mungkin kita tahu hanya suudzon, kita butuh data dan data itu dalam panja kita buktikan. Hal-hal lain baru naik keatas atau tidak tergantung dari pertemuan kita masing-masing.

Yang kedua Pak Menteri. Saya ingin sampaikan tentang cetak sawah. Hari ini sudah hampir 220 ribu kira-kira target sampai 2019 dan ini tentu uangnya triliunan dan kita banyak melibatkan seluruh potensi bahkan lembaga tinggi negara yang lain terlibat dalam cetak sawah. Cetak sawah ada yang galangan padi ditinggalkan, dibiarkan hanya kedalamannya 20 cm, tentu tidak baik untuk pertanian. Dengan nilai yang dikeluarkan sawah yang kita garap dan yang kita miliki, apakah kembali sesuai dengan asumsi kita bahwa kita akan punya padi sekian pada tahun sekian. Kita butuh evaluasi. Tentu banyak yang melibatkan banyak pihak Pimpinan, apa tidak penting kalau kita membuat Pansus Cetak Sawah, tidak apa semua menjadi panja dan pansus, toh kita anggota DPR butuh tahu, butuh paham, butuh proses penyelidikan lebih panjang, kenapa, karena ini uang yang tidak kecil, uang yang luar biasa besar.

**KETUA RAPAT:**

Tiga setengah menit.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Siap.

Pak Kasdi, Menteri untuk Pak Dirjen Kebun. Saya ingin tanya butuh jawaban cepat. Berapa lahan pertanian kita di luar kawasan hutan yang kena kebakaran hutan.

**KETUA RAPAT:**

Tolong pakai aturan, nanti dijawabnya.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

Tidak boleh langsung.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Oke, siap Pimpinan terima kasih diingatkannya.

Pak Dirjen, biasanya kalau pimpinan kita itu besok oke a, besok oke b, tapi kita tahu ini pimpinan kita ab dan ba, amanlah, yang penting aman, top.

Saya ingin lanjutkan ya.

Pak Dirjen, saya ingin tegaskan, apakah skema Kementerian Pertanian Kebun, karena ini hampir penyakit tahunan kita kena kebakaran. Mempersiapkan anggaran kebakaran untuk menangani kebakaran, apakah dianggarkan atau tidak karena tadi pimpinan sudah ada arahan, jawabannya nanti, kami minta jawabannya sekarang. Terima kasih.

Satu lagilah kira-kira yang ingin saya sampaikan, ini pesan tentu untuk Pak Menteri. Jadi ruang kita yang tanah agraris, yang hari ini sudah mulailah lahannya rusak berat, gara-gara kita terbodohi, terbohongi oleh konsep pupuk modern. Pada saat dan lama kita ingin hasilnya panennya luar biasa hebat, tapi kita gagal. Kita butuh pengkajian lebih dalam. Ini pesan alam, pesan Tuhan, pesan kehidupan. Tenang ketua, harus paling benar kita ini sementara.

Pak Menteri, keberpihakan kita pada pupuk itu, pupuk organik adalah jiwa, kepentingan politik kita, kepentingan dalam negeri kita, kepentingan lahan kita, kepentingan pertanian kita, tidak sederhana dan kita butuh penelusuran berapa pupuk organik yang ada di Indonesia hari ini, tentu dengan seluruh stakeholder pupuk.

Yang kedua, sistem distribusinya. Yang ketiga, dari pupuk secara umum Pimpinan, ini banyak distributor nakal yang subsidi menjadi non subsidi. Nah ini butuh perncermatan, makanya dampak pada pertanian gagal. Untuk itu kalau Komisi IV membutuhkan ini menjadi Panja dan Pansus, tidak ada masalah dan ini butuh perhatian yang cermat dari kita tentunya dari fungsi pengawasan DPR-RI.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Menteri, mohon maaf sebesar-besarnya.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Sunarna.

**F-PDIP (H SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Siap Pimpinan.

**Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh Pejabat Kementan yang hadir pada kesempatan hari ini.**

Partama Pak Menteri tentu ini hari yang sangat menyenangkan, bisa bertemu dengan Pak Menteri dan jajarannya.

Cuma kami sangat mengharapkan bahwa dengan Bapak Menteri yang baru tentunya beliau mantan Lurah, mantan Camat, Bupati dan juga Gubernur. Tentu saya tahu persis apa yang harus dilakukan. Nah tentu harapan kami, nanti pas kita rapat lagi bersama Pak Menteri, Pak Menteri berani menyampaikan bahwa pangan kita yang impor ini dalam kepemimpinan oleh Pak Menteri 5 tahun ini, menurun Pak Menteri, bukan naik, bukan naik, bukan naik Pak Menteri, tapi menurun. Kalau kita tidak mau menurun, kapan kita akan memualinya, mau bergantian menteri barapapun, tentu akan selalu nanik. Tentu kami sangat mengharapkan grend desainnya Pak Menteri 5 tahun kedepan target kita tahun pertama bisa menurunkan sekian, sekian, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima Pak Menteri. Karena bahwa memang kalau kita bicara dengan anggaran negara ini dengan anggaran pemerintah, memang benar tidak ada ruginya Pak Menteri, kita hanya menganggarkan, kita buang duit kerakyat, salah sedikit besok diulang lagi tidak apa-apa. Tapi kalau orang bisnis mati semua itu Pak Menteri, karyawannya lari semua, tapi kalau di birokrasi masih bisa gaji seterusnya Pak Menteri. Nah tentu ini kami sangat mengharapkan keberanian dari Pak Menteri, dalam rangka menentukan target-target kedepan selama 5 tahun yang akurat.

Kami sampaikan disini Bapak Menteri, bahwa pada tahun dari tahun ketahun saja contoh salah satu, apabila ini dari Tahun 2016, 2017, 2018, impor daging kerbau kita saja dari asal India 39 ribu, 2017 45 ribun ton. 2018, 79 ribu ton, naiknya 76,2%. Ini contoh salah satu. Tentu diproduksi yang lain pangan yang lainpun juga masih impor. Nah bagaimana ini kedepan ini tahun 1, 2, 3, 4, 5 ini Pak Menteri mungkin di Kementerian Pertanian ini menurun Pak Menteri. Kita harus mulai belajar, kita harus mulai berbenah, kita harus mengefisienkan anggaran, tentunya kita bekerja sama dengan Gubernur, dengan para Bupati, dengan Para Walikota, bagaimana membuat road map, sehingga kita negara kita ini nanti bisa Swasembada, lihatnya kuat. Kalau untuk kedaulatan, tentu saya yakin 5 tahun bukan pekerjaan yang mudah Bapak Menteri.

Selanjutnya Pak Menteri, terkait dengan peternakan, terkait dengan petani peternak kita. Memang tidak mudah Pak Menteri, kalau kita bicara perusahaan, tentu kita harus sering melakukan pelatihan, kita harus sering melakukan diklat Pak Menteri, sedangkan petani kita perlu didiklat juga. Saya mungkin pelaku dari kecil mungkin Pak, saya biasa menongkrong pasar manapun Pak, kalau saya Pagi Jam 5 datang, saya tinggal tidur, saya tinggal makan sate, nati semua sudah berjualan Pak, saya harus untung 500 ribu/ekor, untuk 1 juta, saya tinggal tidur, dia untung semua. Tapi petani itu untuk mengembalikan keharga yang semula, mereka menjual kepasar lagi kepedagang lagi, dia perlu waktu 3-4 bulan baru normal. Jadi kalau dia memelihara 3 bulan, 4 bulan, dia belum untuk Pak. Makanya rata-rata petani memelihara 7 bulan, 8 bulan, setahun Pak. Tapi benar durasi panjang dengan durasi pendek, dengan biayanya yang bertambah, pertumbuhannya sama dan tentu kita harus m mulai Bapak Menteri yang

baru ini harus menentukan, Sapi mana yang kita kembangkan untuk seluruh Indonesia ini yang cukup, mana yang pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya cepat, tidak kita banyak bicara, sering kita bicarakan mendengar, daging ini, sapi ini tulangnya kecil. Tulangnya kecil kalau pertumbuhannya sehari 0,6/kg mau apa. Contoh Madura itu Pak kecil, tapi tulangnya agak besar sedikit, tapi pertumbuhannya bisa 1,1, 1,2 kg/hari Pak. Mana yang harus kita tentukan dan mana yang harus kita buat, populasi kita naik. Populasi negara kita Pak 16,5 juta sekarang, Nomor 18 di dunia. Kapan kita tidak pernah naik Pak Menteri, populasi naiknya itu kapan. Kalau kita bicara indukan, siapa yang mendatangkan indukan, indukan yang mana yang mau kita kembangkan, jangan dari Australi Pak Menteri, mungkin dari negara mana yang agak lulut Sapinya Pak Menteri, disana sapinya yang sudah gembalaan Pak Menteri, mana yang agak enak, yang agak baik, yang gampang yang sesuai dengan petani kita Pak Menteri atau mungkin disini saja.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Lima menti Pak, terakhir.

**F-PDIP (H SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Oke Pak. Saya nanti setengah menit lagi Pak, sebentar sedikit, mumpung bertemu Pak Menteri saya harus menyampaikan, menunggu tadi sudah dari Jam 10. Jadi ini perlu Pak Menteri, jadi petani itu harus apa, harus dilatih Pak. Bagaimana hasil Sapi, bagaimana hasil Sapinya itu pakai meteran pakai apa tidak bertemu. Mereka sekarang sudah ada timbangan elektrik Pak Menteri, siapkan sapi, jenis sapi berapa, 300, 350, 280, 400 ditimbang elektrik. Silakan, kamu petani tinggimu sama sapi itu sepundakmu, sekupingmu atau sekepalamu, kalau sepundakmu kira-kira beratnya 300, kalau sekupingmu kira-kira beratnya 400, kalau sekepalamu kira-kira beratnya 500, tolong kamu kalikan harga sekarang 50 ribu, 50 kg hidup kalikan berapa itu beratnya. Tentu mereka akan lebih tepat Pak Menteri. Petani kita harus diajari dulu baru dia menggemukan akan benar. Dan indukannya juga Pak Menteri, tolong yang dua ini disubsidi biar tidak dijual Pak Menteri. Kalau setahun hanya mengasih mereka yang punya indukan yang melahirkan. Kalau indukannya melahirkan, kasihlah mereka bonus Pak Menteri 1 juta atau berapa, anggap saja mebuat dia senang dia pakan selama setahun, 9 bulan biar mereka sampai berani, dikasihlah, biar happy mereka, biar mereka tambah semangat. Indukannya tidak dijual, indukannya tidak dipotong Pak Menteri, biarpun mengawini anaknya Pak Menteri. Jadi ini perlu sekali Pak Menteri juga, sedikit tambahan Pak Menteri.

Terakit titipan teman-teman dari pengusaha Gapuspindo Pak Menteri, terkait dengan Permentan Nomor 41 Tahun 2019, bahwa wajib memasukan indukan 5% dari jumlah rekomendasi importnya Pak Menteri. Kalau kadangnya muat 1000 Pak Menteri, kalau yang terus 5% dari harus, penuh Pak Menteri kandangnya, perlu sama kandang indukan. Kalau perlu kandang indukan, bangkrut Pak Menteri, usahanya mati, karena tidak ada. Sekarang itu bahwa untuk pinjam bank boleh Pak Menteri ya tidak dikasih Pak, tidak ada itu, tidak ada untungnya. Mereka mengharapkan 5% dari luasan kandangnya Pak Menteri. Kalau dia mempunyai populasi kandangnya cukup untuk 5 ribu, 5% indukannya. Itu realistis menurut mereka Pak Menteri.

Mungkin itu Pak Menteri yang kami sampaikan. Harapan kami Bapak Menteri punya keberanian selama kepemimpinan Pak Menteri dan juga rakyat ini merasa Pak Menteri ada, Menteri Pertanian ada dan Pak Menteri itu memang berbuat untuk rakyat banyak.

Itu mungkin Pak Menteri.  
Sekian dan terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Merdeka.

**F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

Pak Bambang, Merdeka.

**F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

***Bismillahirrohmanirrohim.***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pimpinan dan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Saya lihat teman teman sudah banyak memberikan saran, masukan. Ini bicara produksi, belum bicara kualitas produksi. Sudah banyak persoalan yang dihadapi oleh Pak Menteri terkait dengan program yang disusun oleh Kementerian. Ini saya minta Pak Menteri melakukan evaluasi internal, agar semangat Pak Menteri yang disampaikan minggu lalu, memberikan komitmen yang luar biasa bisa berhasil dengan baik dan kami Komisi IV yakinlah pasti akan memberikan dukungan ketika memang programnya realistis.

Kemudian saya akan menyoroti terkait dengan peternakan. Ada program yang cukup menari, Sawit, Sapi dan ini sudah diuji coba, hasilnya cukup baik. Saya minta ini Pak Menteri ini supaya dikembangkan, karena banyak petani yang sekarang sudah banyak memiliki kebun sawit. Nah ini bisa dipandukan dengan peternakan sapi, bisa meningkatkan nilai tambah kepada petani dan ini cukup baik Pak Menteri. Di sudah dicoba dan hasilnya cukup baik.

Kemudian terkait dengan perkebunan Pimpinan, untuk bisa kita melakukan evaluasi dan pengawasan. Kami minta peta perkebunan, itu supaya disampaikan pada saat pertemuan yang akan datang, karena ini juga penting agar kami juga bisa melakukan evaluasi dan pengawasan karena banyak bersinggungan dengan lahan-lahan petani kecil.

Saya kira itu Pimpinan yang kami sampaikan.  
Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

***Walaikumsalam.***

Pak Darori. Siap-siap Muhtarom

**F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

la terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri.

Langsung saja Pak Menteri, kita kembali kehasil temuan BPK Pak Menteri. Tolong Bapak lihat halaman 4, bahwa satu tahun ini masih ada tunggakan temuan 60 dari mulai belanja bantuan juga pinjaman IBRD ada 18, dari perijinan ada 8 temuan, dari laporan keuangan ada 26, dari subsidi pupuk ada 1, juga dari proyek Kementerian Tahun 2018 ada 7. la tolong ini Pak Menteri, ini pengalaman Pak, saya kira Pak Dirjen sudah paham, kalau tidak ada tindaklanjut, ini temuan ini dilanjutkan ke Kepolisian, Kejaksaan dan KPK Pak. Saya duga ini orang-orangnya sudah bergeser Pak. Pengalaman kami yang lalu ini Pak, ini contoh, ada kementerian di ruangan ini, diingatkan tidak mau, tiga kali disclaimer hampir Pak. Nah sekarang bersakitan Pak, sudah mulai dipanggil oleh KPK, oleh Kejaksaan, baik Dirjennya, bahkan Pak Menteri baru satu bulan sudah dipanggil. Saya kira saran saya Pak Menteri langsung menemui Ketua BPK, bagaimana penyelesaian kasus ini. Ini yang pertama.

Yang kedua, juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tahun 2019, ini realisasi produksi kegiatan utama ini kementerian contohnya mengenai Padi baru 64% ini Oktober, juga ini Kedelai baru 16%, juga mengenai pengembangan Padi baru 41%, pengembangan Kedelai ini 19% dan seterusnya. Tolong dievaluasi untuk Tahun 2020. Kalau ini memang bobotnya terlalu besar, tolong dikurangi targetnya Pak. Kalau ini terus seperti ini, ini ia anggaran tidak akan terealisasi begitu.

Terus yang ketiga Pak Menteri, saya hanya informasi bahwa ada kasus kebun tanpa ijin, ini hasil temuan kami dulu juga dengan Komisi IV, dengan Bareskrim, Kejaksaan Agung dan didalami oleh KPK. Yang sampai sekarang pemerintahan Jokowi belum tindaklanjuti, nanti datanya akan saya kasih pada saatnya. Ada 878 ijin kebun tanpa ijin dikawasan hutan Pak. Luasnya 8,4 juta hektar dan kerugian kayunya saja 170 triliun rupiah. Ini Pak Sudin sebagai ketua, berkali-kali meminta Kementerian Kehuatan belum dijawab, mudah-mudahan besok dijawab Pak Sudin. Ya saya kira ini. Tapi saya juga ada titipan karena saya kalau menyampaikan pertanyaan yang banyak ini waktunya, saya sudah saya ketik Pak Ketua, saya akan sampakan ke Pak Menteri, mohon ijin ini tiga pertanyaan tertulis.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Belum terakhir Bapak Muhtarom. Masih tinggal dua lagi.

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,  
Yang terhormat Bapak Menteri dan seluruh jajaran,**

Langsung saya, saya langsung kepermasalahan lapangan, mohon maaf.

Disini saya karena sudah dipenghujung, biasanya garis bawah, garis bawah ujung-ujungnya begitu. Titik tekan kepada pupuk organik, saya mengharapkan bagaimana kebijakan subsidi pupuk ini ditinjau kembali, dialihkan kepada pupuk organik. Tadi kalau formulanya itu yang besar itu ke pupuk kimia harapan saya dibalik



formula besarnya kepada pupuk organik, karena apa, karena kita ini seperti satu pihak kita bagaimana intensifikasi tanah ini menjadi produktif, tapi satu sisi pupuk kimia yang notabenehnya menghancurkan kondisi lahan kita, terus kita subsidi. Maka bagaimana kebijakan ini dibalik formulanya kalau kalau memang tidak bisa dicabut seluruhnya, dialihkan langsung kepetani, maka formulanya dibalik, pupuk organiknya lebih tinggi, kemudian yang pupuk kimianya lebih kecil.

Kemudian juga bagaimana nanti ada regulasi masyarakat biasanya menyebutnya pupuk organik-organik, begitu menyebutnya pupuk organik, menjadi permasalahan aparat penegak hukum, ditanya standarisasinya bagaimana, ijinnya bagaimana, akhirnya petani kita menjadi korban. Maka bagaimana ini nanti ada regulasi yang melindungi pupuk mandiri yang dilakukan para petani ini tidak berbenturan dengan aparat penegak hukum.

Kemudian yang kedua, tentang penyuluh Pak. Penyuluh kondisi lapangan memang benar adanya, Bapak ini harus benar-benar mendapatkan perhatian. Jadi penyuluh pertanian ini yang ASN kira-kira tinggal sepertiga, yang selebihnya adalah tenaga kontrak, dan THL. Maka ini bagaimana orang yang sudah berjasa, kemudian mengabdikan sudah puluhan tahun, ini nanti benar-benar ada kejelasan, mereka pada umumnya kalau mengikuti aturan tentang ASN yang sekarang sudah tidak menuntut, karena sudah diatas 35 Tahun, mungkin ada kebijakan, bagaimana Kementerian Pertanian dengan Menpan RB maupun BKN, ini ada sebuah kebijakan, mereka-mereka yang sudah mengabdikan kepada terhadap pemerintah dengan puluhan tahun ini ada kebijakan. Kalau kemarin saja K3 sudah berbunga-bunga, apa lagi kalau ini nanti langsung mendekati pensiun tapi diangkat menjadi PNS. Ini luar biasa dampaknya positifnya.

Kemudian harapan saya ada kalau memungkinkan, ada revisi Undang-Undang 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman. Karena apa, karena yang ini juga mendorong atau mensupport bahwa keasaman tanah kita tidak menjadi standart, ini karena budi daya tanaman atau pola tanam yang tidak standart, karena memang di Undang-Undang ini ada kebebasan bagaimana budi daya tanaman. Jadi kalau ini bisa direvisi, Insya Allah juga dampaknya mungkin saja banyak yang masih bertahan, karena selama ini tidak bertahan itu khususnya yang di PTPN, karena memang dia tidak mampu mencari lahan, karena produk tebu ini tidak sebanding kalau berorientasi profit dibandingkan dengan tanaman padi atau tanaman pangan. Makanya di daerah saya disana, sudah ada satu yang ditutup, karena ini BUMN yang sudah tidak produktif. Tapi persoalannya sebenarnya, karena dia sudah tidak mampu lagi mencari lahan untuk menanam bahan bakunya.

Berikut disertifikasi tanaman, ini memang harus diatur. Harus diatur karena saat ini satu sisi karena memang petani berorientasi profit, yang namanya Jagung, yang

namanya Kedelai tidak mendapatkan perhatian, akhirnya tidak berimbang disertifikasi tanaman kita.

Kemudian yang terakhir Pak, tadi disampaikan bahwa saya hektar itu mampu menghasilkan 12 ton. Ini saya pikir hasil demplot yang tidak bisa dibawah kemana-mana. 12 ton/hektar ini hasil demplot bukan hasil pada umumnya produksi tanaman pangan kita, karena tanah demplot ini ditarik kemana-mana, padahal demplot yang diukur cuma satu meter sekian dikalikan sekian, jadi sekian. Nah ini tidak bisa. Rata-rata dikita masih kisaran 7, maksimal 8 Insya Allah seperti itu. Maka kalau itu benarnya adanya, maka dikalikan hamparan dengan kebutuhan makan kita, kita benar-benar Swasembada pangan. Ini cuma sekedar.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

***Walaikumsalam.***

Sebelum yang terakhir.  
Pak Mindo.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Tentu banyak yang saya tidak dengar tadi. Mohon lupakan kalau sudah tadi disampaikan. Yang pertama Saudara Menteri, niat baik saudara untuk memulai dengan data yang valid, itu memang harus dilakukan. Lupakan dulu target-target, kalau tidak nanti saya sudah mengikuti beberapa kali Menteri Pertanian disini. Saya masuk awal, berakhir juga begitu lagi, karena tidak ada kebesaran hati kita, kerendahan hati kit untuk mengakui apa sebenarnya yang ada di lapangan itu. Jadi selain bicara dengan DPR, bicara juga dengan para pengamat, para doktor-doktor yang ada, asosiasinya. Saya sarankan untuk melakukan itu, bicara bersama. Sehingga persoalan pertanian ini, persoalan kita bersama, apalagi Bapak dari partai politik ya, nanti tidak tercapai untuk selanjutnya, dosa Bapak saya tanggung juga, orang-orang partai politik tanggung juga. Jadi tunjukkan bahwa orang partai politik itu paham, bagaimana membangun negeri ini. Kita mulai dari kesepakatan data itu.

Yang kedua, yang disebutkan pupuk organik granul itu, itu sekali lagi bukan hasil Kementerian Pertanian. Ada Saudara Gatot disana, yang masih Eselon II waktu itu. penggagas itu saya Pak, sampai ada itu, termasuk penggagas menggunakan pupuk

berimbang, almarhum atau Suprpto tidak mau waktu itu, dia rezim pupuk tunggal, sehingga saya dianggap dibiayai oleh Petrok Kimia Gresik, karena berjuang untuk pupuk tunggal. Nah persoalan kita adalah sudah disampaikan tadi, kadar C organik yang rendah, karena itu waktu kita usulkan ini, tidak pernah saya menyebutkan sebagai pupuk organik granul. Kalau dikatakan pupuk, itu harus bisa, arah apa dia, tidak ada itu. Pokoknya kompos begitu untuk memperbaiki C organik, buatlah syaratnya yang terbaik.

Yang terkait dengan hal ini Pak Menteri, ini distop dulu ya, ia kita berdebat lagi soal ini, jangan mengikuti kemauan petani. Maunya petani itu mau dihambur seperti menghambur Urea, itu maunya petani. Yang kita butuhkan itu adalah maunya tanah, maunya tanaman itu, itu yang harus kita ikuti. Sekali lagi maunya tanaman, maunya tanah itu yang kita ikuti, bukan kebiasaan petani, siapa bilang kebiasaan petani itu sudah pasti betul, dalam hal ini dia tidak betul. Itu yang terbaik dalam bentuk curah, diberikan pada saat ngelebek ya proses akhir. Yang tadinya 1 triliun dibuatkan untuk POG, disebutkan POG sekarang subsidi, dengan jumlah yang sama, itu nanti luas areanya akan jauh lebih besar. Jadi jumlah itunya tidak dikurangi subsidiya, tapi dengan cara dia kompos, curah, dia tidak perlu energy untuk membuat granul, dia tidak perlu energy untuk mengeringkan, dia tidak perlu energy untuk mengeringkan, sangat mudah membuat itu. Saya pikir tidak perlu seorang politisi harus menjelaskan secara teknis kepada saudara-saudara. Itu yang terkait dengan pupuk.

Kemudian Pak Menteri, buatlah saja target itu yang bisa terukur dan memungkinkan itu dicapai. Tadi banyak orang tidak menyadari bahwa Sapi itu bukan pemakan rumput, sapi itu pemakan serat. Jadi di kampungnya Pak Made ini, dulu ada ceritanya orang berkelahi, karena sarung sering hilang dari jemuran, karena itu dimakan oleh Sapi, dimakan oleh Sapi lho Pak Menteri, karena dia serat. Nah tadi terkait dengan Sawit, kita harus hitung, kita punya PTP. PTP ini dulu yang kita mainkan untuk uji coba bersama dengan adakah BUMN kita yang untuk peternakan untuk uji coba, apakah Berdikari masih dipakai untuk itu, buatlah percontohan yang kerja sama dengan PTP, terukur, kalau dua tahun sudah sangat terukur, itu masyarakat akan mengikuti dengan sendirinya. Itu pelepahnya itu satu. Kemudian juga tadi bicara Jagung dan sebagainya. Ini juga belum holistik. Sekali lagi belum holistik. Tongkol jagung yang di pusat-pusat produksi jagung, di NTB, di Sumatra Utara, itu masih dibakar Pak, padahal dengan teknologi sederhana, itu bagian untuk pakannya Sapi, pakannya ruminansia. Nah ini hal-hal seperti ini harus dibuat dalam demplot yang tidak kecil yang cukup besar. Negara harus hadir memberikan contoh untuk rakyat seperti itu ya Pak ya.

Terakhir, ini mungkin dalam minggu ini, saya dengar-dengar akan ada demo ketempat Bapak. Saya tidak tahu Pak Dirjen Peternakan, apakah demonya bisa ditahan, soal harga telur, soal harga Ayam ya, itu harusnya hari ya meraka akan

berbondong-bondong kesana ya. Karena apa, ini tidak hanya persoalan manajemen Pak, persoalan integrator itu satu persoalan sendiri, persoalan yang kedua itu harga pakan. Coba Pak Dirjen Peternakan pada rapat berikutnya, saya minta data 5 tahun terakhir, berapa yang kita impor protein, hewani dalam bentuk fise email atau MBM untuk kebutuhan unggas, bagaimana tingkat kenaikannya, begitu juga Kedelai. Jangan kita bangga mengatakan, unggas bisa kita supply, tapi waktu kita bisa supply secara nasional kebutuhan unggas kita, ternyata lebih dari 65% importasi itu. Saya kira belum boleh kita bangga selama masih bisa disubstitusi dari dalam. Saya kira banyak pikiran-pikiran nanti yang bisa kita bisa mensubstitusi itu. Jadi apakah daging sapi, maupun unggas, inti soalnya bagaimana harga pakannya lebih rendah, selama itu tidak tercapai, maka terpaksa peternak-peternak kita hanya jadi pelaksana-pelaksana dari pemain-pemain besar saja.

Nah terakhir Pak Menteri, ini koordinasi antar menteri, ya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN. Pastikan jumlah prosentase tertentu bungkin inti sawit, dijual di dalam negeri untuk perusahaan kecil, tidak dijual untuk perusahaan besar. Kargil itu perusahaan dalam negeri, perusahaan besar, caron popan itu perusahaan dalam negeri, perusahaan besar, bukan. Untuk pengusaha-pengusaha kecil, perusahaan-perusahaan mandiri itu baru ungu pungkun inti sawit begitu. Kemudian kerja sama Bapak dengan Menteri KKP nanti, memastikan seluruh industri pengola itu, itu limbahnya dalam jumlah tertentu juga harus dijual di dalam negeri untuk perusahaan-perusahaan kecil, untuk koperasi-koperasi. Koperasi itu amanat dari Undang-Undang Dasar.

Merdeka.

Terima kasih.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih.

**Bapak dan Ibu sekalian,**

Kita tawarkan, karena Insya Allah banyak yang belum Shola Ashar ini, termasuk Pak Menteri.

Kita skors.

Kalau urusan Sholat, nanti setelah Sholat kita mulai lagi. Ashar ini kurang 30 menit, terus Magrib, saya tidak ingin ikut dosa ini.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, ada berapa pertanyaan lagi Ketua.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Ada dua.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Selesaikan saja dulu itu Ketua.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Tapi harus komitmen 2 menit.

Pak Made banyak, tidak.

Kita sepakati dua selesai ya.

Silakan Pak Made Urif. Terakhir Pak Fadholi, dua menit dua menit Pak.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

la terima kasih Pak Ketua yang baik hati.

**Rekan-rekan yang saya hormati,**

**Bapak Menteri dan seluruh jajaran Eselon I Kementerian Pertanian yang saya banggakan.**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera buat kita semua.**

Om Swastiastu

Saya ingin hanya beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan masalah regulasi, Undang-Undang yang sudah kita hasilkan selama ini di Komisi IV bersama dengan Pemerintah, yaitu mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Nah ini banyak pemerintah daerah yang belum paham betul tentang Undang-Undang ini. Maka itu saya berharap kepada Menteri Pertanian, supaya secara terus-terus melakukan sosialisasi. Jadi karena dampaknya kalau Undang-Undang ini tidak di break down oleh pemerintah daerah ini akan mengrus, terutama lahan produktif kita, itu tidak dilakukan aturan main di lapangan, tidak lakukan proteksi. Nah saya rasa ini perlu ditegakan oleh teman-teman

di Kementerian Pertanian sosialisasi secara tersebut. Ada juga Undang-Undang tentang Sistem penyuluhan Pertanian. Diamanatkan disana itu di Provinsi harus dilakukan pembuat tentang institusi yang namanya BORKOLUH (Badan Koordinasi Penyuluh) dan di daerah di K2 itu BAPLU (Badana Pelaksanaan Penyulu). Ini banyak yang tidak melaksanakan itu amant Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian itu.

Nah barangkali ini perlu diakselerasi pembentukan institusi ini di daerah, karena pada sekarang ini penyuluh kita hanya tinggal sedikit, terutama yang PNS, itu hampir akan segera pensiun semuanya dan tidak dilanjutkan pengangkatan dengan penyuluh-penyuluh baru. Nah karena penyuluh itu sangat strategis di lapangan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi pertanian kita pada saat sekarang ini. Nah itu harapan saya dari sisi regulasi.

Yang kedua, mengenai petani kita.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Setengah menit lagi Pak Made.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Ia, hampir sebagian besar petani kita ini termasuk petani gurem, yang tingkat kepemilikannya 0,25. Mau diapakan ini sekarang ini, yang petani gula Pak Menteri. Jadi kalau yang ideal itu rata-rata harus 2 hektar paling tidak kalau ingin mendapatkan kesejahteraan dari pada petani kita. Nah saya rasa Pak Menteri harus punya konsep yang jelas, yang jatuh kemudian terukur, bagaimana mensejahterakan petani gurem ini.

Nah selanjutnya untuk mencapai swasembada daging kita, saya rasa konsep yang telah dilaksanakan selama ini mengenai Siwab, sampai indukan wajib bunting itu, perlu diteruskan dan juga penyelamatan Sapi betina produktif ini Pak dan juga diperluas kawasan-kawasan peternakan, terutama Sapi loka, Sapi Bali misalnya mempunyai ketahanan yang sangat bagus itu. Nah ini barangkali perlu dilindungi oleh Bapak Menteri. Jadi jangan tergantung kepada importasi yang terlalu berlebihan, apa lagi dari negara-negara yang tidak bebas dari PMK, Penyakit Mulut dan Pupuk. Itu. Jangan coba-coba misalnya dari India, belum tentu seluruh bagian itu bebas dari PMK. Jadi kalau ini sekali masuk ke Indonesia, ini akan dibayar mahal oleh negara ini untuk memberantas penyakit PMK itu.

Nah barangkali itu Pak.

Sebetulnya ada beberapa lagi kita, karena sinyalnya begitu tadi.

Pimpinan terima kasih.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terima kasih.  
Silakan Fadholi.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati**  
**Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Sangat menarik apa yang banyak sudah disampaikan oleh para senior para terlebih dahulu. Beberapa hal saya akan menyampaikan, yang pertama memberikan satu respon positif, terhadap rencana Pak Menteri untuk bisa memilih antara program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ini memberikan satu hal yang sangat bagus, karena ini akan menjadi tolak ukur, seberapa keberhasilan dari pada program-program pertanian kita itu. Sehingga itu akan menjadi satu hasil yang riil untuk bisa kita ketahui bersama. Nah berbicara persoalan pertanian, pertanian ini ada dua hal yang menjadi fokus objek kita, yang salah satunya adalah yang pertama para petani, yang kedua para peternak. Dari kedua hal inilah kita akan coba bisa melakukan peningkatan penghasilan pada mereka. Untuk bisa mendapatkan penghasilan kepada mereka, maka perlu kita memberikan pendampingan dan sekaligus program-program yang memang diperlukan oleh mereka. Ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk bisa kita lakukan.

Ketika kemudian dikaitkan dengan program rencana kedaulatan pangan kita, kita sepakat akan kita ketahui bahwa riilnya petani ini, jumlahnya banyak, tetapi mereka menggarap lahan yang sangat sempit. Ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita bisa sama-sama ketahui bersama. Nah oleh karena itu, dalam rangka untuk bisa mendukung ketahanan pangan yang lebih besar, maka perlu mengoptimalkan lahan-lahan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dan sudah banyak dibahas, terkait dengan masalah hasil-hasil seperti cetak sawah dan lain sebagainya. Kalau itu dioptimalkan, maka kita akan tahu bagaimana petani-petani yang dalam skala besar, itulah yang nanti yang bisa menjadi program-program besar. Karena untuk petani-petani kecil ini, maka itu akan menjadi serapan, mungkin pedagang-pedagang lokal, tapi kita perlu merumuskan bagaimana untuk bisa memproduksi padi dalam jumlah yang besar.

Dan yang kedua, kaitannya masalah Jagung.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Terakhir, terakhir Pak Fadholi. Ini Magrib kurang 20 menit.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Persoalan Jagung, ini juga sangat penting sekali. Kalau kita hanya mengandalkan dari petani-petani dengan lahan kita sendiri, ini saya pikir tidak akan mampu untuk bisa menutup kebutuhan jagung nasional. Maka ketika kemudian ada satu kerja sama dengan kehutanan, dan memanfaatkan lahan-lahan hutan itu menjadi satu bagian yang sangat penting. Tetapi sinergitas antara pertanian dan kehutanan ini tidak bisa dilupakan yang sangat penting sekali.

Yang terakhir. Sebenarnya banyak ini, tapi masalah Kedelai saja. Selama ini kita menjadi konsumen Kedelai dari sisi importnya. Realitasnya bahwa program Kedelai itu sebetulnya bisa ditanam dimana saja dan produksi riil yang bisa dihasilkan oleh kita itu sebetulnya ada berapa. Kalau dibandingkan dengan import Kedelai, dengan hasil dari pada produktivitas Kedelai, ini kan kita masih jauh sekali dan sampai sekarangpun kita belum bisa membuahkannya atau menanam Kedelai sebagaimana banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi baru bicara dari sisi Pajale, ini menjadi satu bagian yang sangat diperlukan sekali, termasuk yang terakhir ini adalah masalah perternak. Perternak ini pada umumnya mereka sekarang ini hanya masih setiap satu orang atau beberapa kelompok masih dikelola sangat-sangat tradisional sekali, tetapi justru mereka yang sudah mendapat yang memelihara dengan ternak yang kecil-kecil ini, ini sangat diperlukan untuk melakukan pendampingan. Nah peternak kita masih sangat perlu sekali untuk bisa diberikan satu pendampingan yang lebih bagus.

Saya pikir begitu Bapak Ketua, terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

***Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Bapak dan Ibu sekalian,**

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena ini menyangkut kewajiban urusan Syar' i, saya tidak akan memperpanjang dulu. Kita skors, dilanjut Jam Ba'ah Sholat Magrib, 18.30.

Cukup Pak Menteri.

Sholat Ashar ini, Ashar dan Magrib.



**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Sekalian saja Ketua, Jam 19.00 ijin.

**F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Nanti Mas Daniel setelah Magrib.

Terima kasih semuanya, saya skors dan kita buka Pukul 18.30

***Wallahul muwafiq Ila Aqwamith Thariq  
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya H. Hasan Aminudin ingin menyampaikan aspirasi.  
Silakan Pak.

**F-NASDEM (DRS. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Sebelum kesimpulan, saya ingin memberikan saran dan pendapat.

Para Pejabat Eselon I, II khususnya Bapak Menteri Pertanian. Semua pembicara dan pemberi saran para anggota yang terhormat tadi, semuanya bukan ingin menjatuhkan. Ini perlu digaris bawahi, bahwa ingin bagaimana Pak Menteri Pertanian 2019-2024 ini, bekerja sebagaimana keinginan rakyat dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama, saya ingin memberikan perhatian peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Berbicara petani ini, saya ingin mendekatkan kedua elemen, pemilik sawah dan penggarap sawah. Penggarap sawah ini bagaimana martabat dan kesejahteraannya meningkat, tentunya ini butuh kajian-kajian dari para Dirjen dan Direktur. Janga hanya dipaksa menanam Padi seperti angka luas tambah tanam, yang diburuh begitu hebat, tapi lupa dengan pengembangan komoditas yang mampu menghasilkan pendapatan lebih. pencapaian swasembada padi atau beras bukan gambaran kesejahteraan petani kita. Bidang peternakan ada kegiatan cluster yang berisikan penyediaan kadang besar serta ternaknya sebagaimana keinginan Pak Menteri saat ke Balai.

Kalau Sapi di Balai tentunya Sapi yang memang ketersediaan pakan kesehatan yang terpenuhilah semuanya, sehingga mengagumkan takkala kita tonton, tapi yang

diinginkan Pak Menteri tetangga, luar balai itu bagaimana ada cluster untuk menuju percepatan kesejahteraan petani contoh di Purbo Linggo, Purbo Linggo-Pasuruan yang secara kebetulan dapil Pak, dari geografis cocok, tinggal bagaimana keseriusan Kementerian ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih, karena butuh Nestle itu butuh, Sapi kurang, rakyat antusias, ketinggian cocok, tepatnya di kecamatan Krucil. Itu luar biasa sudah, pendapatan masyarakat dan seterusnya. Sekali lagi saran saya, bagaimana ada cluster Sapi Pera di Kabupaten Purbelinggo untuk menutupi kekurangan, kebutuhan Nestle, karena Nestle itu bukan hutang Pak, langsung bayar kontan.

Yang kedua, sarana dan prasarana bidang sarana dan prasarana. Pengembangan sentra atau zonasi komoditas unggulan, pada masing-masing provinsi setiap provinsi satu kabupaten, prioritas dapil ini akan lebih terukur dan pengawasannya langsung oleh anggota DPR RI, kalau dihitung tadi absen sebagaimana Pak Ketua menyampaikan ada 54 dapil seluruh RI. Pengembangan sentra ini para Bapak dan Ibu sekalian, didorong sampai mandiri target eksportlah.

Yang ketiga, bidang tanaman pangan. Permasalahannya semenjak dahulu hingga hari ini, benih yang selalu telat di lapangan. Yang kedua, terkait dengan penyediaan pupuk bersubsidi. Tolong dipertimbangkan yang jumlah 26 triliun lebih, dipertimbangkan ketertiban RDKK sebagai acuan pupuk bersubsidi kaitannya dengan adanya Peta yang menjadi acuan, karena disinyalir Peta Acuan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Subsidi pupuk sudah berjalan kurang lebih 25 tahun, namun setiap tahun selalu terjadi kurang bayar, padahal anggaran subsidi semangkin besar, kondisi ini menyulitkan bahwa.

- a. perencanaan operasional subsidi pupuk tidak baik,
- b. sistem administrasi pembayaran tidak efisien, lambat, sertifikasi manual.

Menghadapi masalah kurang bayar tidak ada upaya mengatasinya, setiap tahun terjadi sehingga total kurang bayar hingga membengkak 12 triliun lebih, yang mengherankan PT. Pupuk Indonesia tidak bangkrut dengan piutang yang sangat besar. Penyaluran pupuk melebihi anggaran tersedia sebenarnya adalah pelanggaran berat. Nah ini mohon ada perhatian khusus.

Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bagaimana Kementerian hari ini menutup lembaran lama yang saya tahu sendiri, sudah, hentikan sinetron pada masyarakat. Saya butuh bukti karya nyata besar, bagaimana Kementerian Pertanian ini melakukan sebuah gerakan cepat, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas di RI adalah petani.

Barangkali sedikit Ketua, mungkin akan diperjelas dan Insya Allah nanti kesimpulan oleh Ketua Komisi.

**KETUA RAPAT:**

Ia silakan Bu.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

**Pak Menteri yang saya hormati,**

Saya dengan teman-teman hari kemarin hari Minggu diskusi tentang WTO. Jadi saya memberikan masukan kepada Pak Menteri tentang apa yang harus dilakukan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1, 2, 3). Yang pernah saya kemukakan, tapi tidak ditulis dalam komentar buku ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Endang.

Jadi Pak Menteri beserta Eselon I, teman-teman anggota Komisi IV. Disini sudah hadir juga dari Holding Pupuk, ada juga dari Pertani, ada juga dari Berdikari, ada juga dari Sang Hyang Seri. Jadi selama ini mereka datang Pak Mindo, datang cuma duduk, diam, mendengarkan dan pulang. Betul tidak Pak Dirut, betul kan. Jadi hari ini saya kasih kesempatan kepada Dirut Pupuk, kita berbagi cerita untuk kesuksesan petani Indonesia.

Silakan.

**DIRUT PT PUPUK INDONESIA (AAS ASIKIN ISDAT):**

Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati.

**Pimpinan anggota DPR Komisi IV yang kami hormati**  
***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Terima kasih Pak kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal permasalahan yang mungkin perlu diketahui juga oleh kita semua.

Yang pertama, ini yang berkaitan dengan masalah piutang, betul Pak, bahwa kita itu menyalurkan, nah ini masih sengaja dengan adanya hutang, tapi kemarin Alhamdulillah, ini berkat juga dukungan dari Departemen Pertanian, sudah berapa yang dari 2014-2015 ini sudah cair, tapi sampai saat ini kita masih ada tagihan kurang lebih sekitar 12 triliun, tapi yang lama itu ada sekitar adalah 5,7 Pak, 5,7 ini belum terlunasi,

padahal semua uang itu sudah kita keluarkan membuat pupuk, untuk kepentingan subsidi. Ini yang berkaitan dengan masalah piutang. Dan ini mohon karena dengan tidak diterima piutang ini juga akan berdampak akan meningkatkan kepada subsidi, karena apapun kita harus untuk memproduksi untuk memproduksi, berarti harus minjam perbankan yang juga berdampak pada pinjaman bunga. Ini akan menambah subsidi.

Terus yang lain juga Pak, tadi juga dikatakan banyaknya pupuk yang keluar, yang subsidi masuk kepada perusahaan-perusahaan yang tidak berhak untuk mendapatkan ini. Nah kami mohon Pak, mungkin ini perlu mengoptimalkan kembali ini sangat penting, fungsi dari KP3 Pak, Komisi Pengawas, Pupuk dan Pestisida. Itu termasuk di kabupaten-kabupaten, sehingga pupuk ini juga banyak membantu dalam melakukan pengawasan-pengawasan.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Dirut, ini anggota banyak yang baru, jadi tolong dijelaskan KP3 itu apa dan oknumnya siapa saja, agar nanti anggota yang baru bisa bertanya apabila ada masalah.

#### **DIRUT PT PUPUK INDONESIA (AAS ASIKIN ISDAT):**

Maksud kami, bahwa KP3 itu adalah Komite Pengawas Pupuk dan Pestisida. Jadi komite yang mengawasi bagaimana aliran pupuk subsidi mulai dari produsen sampai kepada petani, sehingga dia tidak lari kemana-mana. Itu anggotanya itu ada Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pertanian di Kabupaten-kabupaten, Pak, terus di Provinsi. Nah ini mungkin lebih harus dioptimalkan lagi peran dan fungsinya, sehingga pupuk yang disalurkan oleh Pupuk Indonesia ini tidak lari kemana-mana. Tapi sekarang itu sudah kita dikasih warna Pak, dikasih warna kalau itupun ada misalnya ada pupuk yang berwarna itu lari ke besar, kalau itu berwarna Pink, itu harus segera ditindak dan laporkan kepada yang Berwajib, karena pupuk itu ada yang putih ada yang berwarna Pink. Ini Pink itu yang subsidi Pak. Ini mungkin bisa ditingkatkan lagi peran dan fungsi komite pengawas.

Terus yang lain Pak, tadi saya sependapat, tadi juga berbicara masalah organik yang harus ditingkatkan. Ini pengalaman dan statistic dari pupuk Indonesia, itu selalu dianggarkan kurang lebih 1 juta ton dalam satu tahun, tapi kenyataan di lapangan, ini rata-rata hanya 600 Pak, 600 ribu yang diserap oleh petani itu. Nah ini juga mungkin perlu adanya di dinas-dinas di daerah-daerah untuk mensosialisasikan kegunaan mengenai pupuk organik tadi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak, ini mempunyai fungsi yang sangat baik, terutama untuk pembenah tanah. Nah ini di

lapangan Pak, kita berusaha dibeli, mereka tidak rasa untuk membelinya itu tidak besa itu Pak, itu dari 1 juta hanya kurang lebih sekitar 600.

**KETUA RAPAT:**

Bukannya biasanya ada kewajiban kalau beli ini, beli ini begitu kan.

**DIRUT PT PUPUK INDONESIA (AAS ASIKIN ISDAT):**

Tidak Pak.

Tidak Pak, tidak melakukan seperti itu Pak. Jadi yang jelas RDKK sudah ada Pak, di kios-kios, tapi mereka tidak melakukan pembelian Pak, mereka itu selalu hanya membeli Urea dan NPK. Mungkin mereka itu belum menguasai atau mengetahui apa si kegunaan para petani itu dari oraganik sendiri. Jadi statisticnya statistic 600, mungkin fungsi penyuluh Pak yang harus yang harus lebih ditingkatkan. Itu yang menjadi permasalahan.

Yang lain Bapak Pimpinan. Nah kami juga meminta dukungan, ini kaitannya dengan harga Gas Pak. Jadi harga Gas itu hampir 70% dari total cost yang dikeluarkan untuk membuat pupuk 70% Pak. Nah, harga Gas di Indonesia, ini kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita, ini adalah harga yang sangat mahal sekali, sehingga ini juga berpengaruh pada subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirut, kalau bisa dipersingkat, karena nanti pada Tanggal 27, Pupuk Holding dan lainnya, akan ada RDP lagi.

Ya cukup ya.

**DIRUT PT PUPUK INDONESIA (AAS ASIKIN ISDAT):**

Baik. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Shang Hyang Seri ada yang mau disampaikan. Singkat, karena nanti nanti juga akan dipanggil lagi pada next pendalaman hanya sampaikan secara singkat saja.

**DIRUT PT SANG HYANG SERI (KARYAWAN GUNARSO):**

Baik, Pimpinan terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Kesempatan ini kami dari PT. Sang Hyang Seri hanya menyampaikan kaitannya dengan subsidi Pak. Kalau bisa subsidi itu diadakan kembali, karena memang keterkaitannya dengan subsidi ini, sangat-sangat membantu terkait dengan pengadaan untuk petani-petani bantuan benih tersebut.

Saya rasa demikian Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

PT Pertani.

**DIRUT PT PERTANI (FEBRIYANTO):**

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh.***

**Selamat malam salam sejahtera buat kita semua,**

**Yang saya hormati Ketua Komisi IV, anggota Dewan yang terhormat,  
Bapak Menteri Pertanian dan Dirjen dan jajarannya.**

Mungkin tambahan sedikit dari apa yang disampaikan SYS Pak. Bahwa sampai sekarang ini, penyaluran benih melalui ekatalog Pak, yang notabene adalah harga free market kita bersaing dengan semua Produsen, Swasta maupun BUMN. Nah kenyataan yang sekarang yang kami alami, bahwa harga benihnya, sepertinya tertekan sangat berat, sehingga kami hanya dapat margin tidak lebih dari 5% Pak. Tidak lebih dari 5%, lalu biaya distribusinya pun terbatas Pak, hanya 600 rupiah maksimal sementara ini Pak. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa terkoreksi, karena banyak daerah-daerah remot yang sumber benihnya tidak ada, terpaksa harus kami datangkan dari tempat yang agak jauh jaraknya Pak, misalkan dari Jawa.

Saya rasa mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan sedikit.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Waaalaikumsalam***

Demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR-RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri atau Eselon I untuk menjawab.  
Terima kasih.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

**Pimpinan dan segenap anggota Komisi IV yang sama saya hormati.  
Sekjen dan segenap Eselon I dan jajaran.**

Kami banyak ini mendengarkan dengan seksama semua yang menjadi harapan dan tanggapan, koreksi dan lain-lain. Saya memang berharap pimpinan dan segenap anggota Komisi IV. Saya punya staf ini tidak membuat saya malu ditempat ini, saya berharap hari ini dan besok dan itu saya yakinkan bahwa saya akan mencoba menangani secara serius segalanya dan tentu saya saya baru 25 hari, mungkin tidak semua yang saya bisa pahami, tetapi saya akan belajar dengan kuat untuk mengatakan ini boleh ini tidak dan saya pastikan itu Pak, Insya Allah.

Pimpinan dan seluruh Komisi IV kawal saya untuk membenahi semua aspek pertanian yang harus jalan sesuai dengan norma yang ada. Selanjutnya Sekjen dan Eselon lainnya kalau mau menambahkan, silakan.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Baik Pimpinan.

Ada beberapa yang terkait dengan Sekjen, yang pertama Pak Muhtarom, terkait dengan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Budi Daya Tananam. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 22. Jadi sudah direvisi Tahun 2019, tentang Sistem Pertanian Bekelanjutan.

Kemudian Pak Darori, yang 6 usulan terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, itu 60 usulan itu sudah dalam proses tindaklanjut dan kita sekarang langsung dikawal oleh PBK. Jadi BPK ada di Kementerian Pertanian Pak untuk mengawal semua tindaklanjut

yang terkait dengan temuan 5 point yang dijelaskan dan Insya Allah dalam minggu ini Pak Menteri dengan A4 juga dan Ketua BPK akan bertemu.

Ada pertanyaan terkait dengan Penyuluh. Mohon ijin Pak Pimpinan. Saat ini jumlah penyuluh PNS, itu adalah 32 ribu. Jadi kemarin Tahun 2017 dapat bantuan antara yang Pak Sudin dan teman-teman, kita bisa mengangkat menjadi CPNS hampir 6000 orang. Kemudian perjuangan teman-teman DPR juga ada 11 ribu kita yang lolos PPPK, tapi Perpresnya dalam proses. Sehingga total penyuluh saat ini ada 43 ribu. Desa potensi pertanian seluruhnya ada 72 ribu, sehingga kekurangan sehingga 29 ribu, Insya Allah besok surat mau ditandatangani oleh Pak Menteri akan diajukan ke Menpan. Jadi mohon tetap dikawal Pak, sehingga kekurangan penyuluh ini bisa dipenuhi. Baik, jadi untuk memenuhi tetapi tetap kita akan mengoptimalkan tadi peran penyuluh swadaya dengan terus menerus menumbuhkan pos penyuluhan desa. Jadi setiap POSLUHPDES, itu diharapkan ada penyuluh swadaya. Peningkatan kapasitas penyuluh tetap kita lakukan melalui pelatihan *on the job training* dan latihannya tidak perlu kebalai pelatihan, tapi bisa latihan dipilih BPP yang terbaik, sehingga bisa mengurangi ongkos trasprot, yang yang dilatih jauh lebih banyak.

Barangkali demikian. Kalau masalah data, rasanya kita sudah komitment, Insya Allah setelah tanggal 1 Desember mudah-mudahan setelah dapat diperoleh data, ini masalah data dan sebagainya mungkin akan ada penyesuaian Pak.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Yang lain tadi ada pertanyaan tentang Peternakan, Perkebunan, Hortikultura. Silakan dijawab dengan singkat dan jelas.

#### **PRIHASTO SETYANTO (DIRJEN HORTIKULTURA):**

Terima kasih Pimpinan.

Mohon ijin Pak Menteri.

Jadi ada beberapa terkait dengan Hortikultura yang ditanyakan, pertama terkait dengan *good agricultural practices* Jadi ini ketentuan *good agricultural practices* ini, wajib untuk seluruh importir yang akan memasukan barangnya ke Indonesia, karena ini menjamin mutu dari barang-barang yang akan dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Jadi ini sertifikasi *good agricultural practices* ini wajib untuk seluruh importir Pak, ada dua *good agricultural practices and good handling practices*



**KETUA RAPAT:**

Itu tidak perlu pakai penterjemah atau sumpah, tidak perlu. Tadi ka ada, keduanya harus pakai penterjemah sumpah.

**PRIHASTO SETYANTO (DIRJEN HORTIKULTURA):**

Betul, begini Pak, karena di dalam sertifikasi *good agricultural practices* ada yang berbahasa China Pak. Ada yang berbahasa China yang kita tidak memahami itu, tapi ada tulisan sertifikat *good agricultural practices* Jadi kami untuk memahami itu semua kami minta ada penterjemahnya di dalam.

**KETUA RAPAT:**

Kalaupun terjemah, tidak perlu pakai penterjemah atau sumpah Pak Dirjen, saya rasa bilang saya sama pihak importir, anda buat dalam dua bahasa, Indonesia dan bahasa anda.

**PRIHASTO SETYANTO (DIRJEN HORTIKULTURA):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT:**

Itu lebih fraktis lagi. Jadi jangan merepotkan lagi.

**PRIHASTO SETYANTO (DIRJEN HORTIKULTURA):**

Baik Pak.

Terus yang kedua, terkait dengan tadi ada pertanyaan mengenai Permentan 39, dimana kewajiban tanam ini tetap tidak dihilangkan, tapi dilaksanakan *after* RIPH diterima, bukan impor. Ini revisi ini dilakukan karena ada berbagai masukan Pak, terutama dari importir-importir kecil yang merasa belum mereka punya modal untuk kegiatan penanaman,akhirnya terus dengan dinamika yang ada kita revisi. Jadi yang 5% itu tetap ada, tapi di dilaksanakan *after* RIPH terbit. Jadi itu mungkin poin-point terkait dengan RIPH.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, belum barang masuk saja disebut tanam, ada yang tidak tanam. Bagaimana kalau sudah dikasih ijin impor mau tanam. Itu yang pertama.

Yang kedua, ditempat ini saya pernah mengatakan juga, kementerian merilis 2021 swasembada bawang putih ditempat ini juga. Karena setahu saya benihnyapun sekarang mana ada. Sekarang saya tanya Pak Dirjen, jawab langsung. Satu ton ditempat kita menghasilkan berapa kg, berapa ton?

**PRIHASTO SETYANTO (DIRJEN HORTIKULTURA):**

Satu ton rata-rata 8 satu ton bawang putih itu rata-rata menghasilkan sekitar 8,3 ton Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bapak tunjukan nama saya. Kalau bicara 8,3 ton Bapak tunjukan, kalau satu hektar bisa menghasilkan 8,3 juta ton, Indonesia sudah swasembada. Tunjukan tempatnya dimana.

**PRIHASTO SETYANTO (DIRJEN HORTIKULTURA):**

Itu data BPS Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bukan data BPS, anda cek, ayo kita sidak ke Jawa Tengah. Saya sudah telepon Kepala Dinas di Temanggung. Bisa tidak 2 ton, bisa Pak Sudin asal sama traktor sama orangnya ditimbang. Jadi kalau 8,3 ton itu mustahil. Sudahlah Pak. Yang sudah lalu jangan diulang-ulang lagi. Pak hari ini data ini dari anak buah Bapak, 69 importir wajib tanam, sudah tanam, RIPH tidak keluar. Kalau saya buka lebih lanjut, Bapak akan tidak enak, jujur saya bicara. Sudahlah, stop sudah. Sudah saya katakan 2021 tidak mungkin swasembada bawang putih. Terus yang 69 ini sudah tanam apa RIPH. Pengusaha ini tidak sedikit keluar duit. Waktu itu saya kumpulkan kesini semua, di ruang ini dipimpin oleh Pak Edhy Prabowo. Mereka bilang, Pak kami kesulitan Pak, kami mau tidak mau harus berbohong Pak. Jadi bohongnya ini berjamaah. Kalau jaman dulu Pak Momon harus tahu, kalau kita mau import beras ketan, wajib menyerap beras ketan lokal, beras lokal itu cuma surat keterangan dari Gapoktan, umumnya dari mana, dari Lumajang.

Sudah Pak, jangan diulang lagi. Kalau Bapak mau coba-coba sama saya, ia kita mengecek kelapangan. Kalau 8,3 ton, tidak mungkin.

Di Lampung ada yang tanam, saya telepon Bupati, saya cek Soni Kepala Dinas, hanya dapat 400 kg, berapa tinggi permukaan kamu, 1100 DPR, itu cuma dapat 400 kg. taruhan sama saya. Bapak harus pikirkan juga 69 pengusaha yang sudah tanam RIPH. Dan saya tidak yakin, setelah RIPH keluar, suruh tanam, saya tidak yakin tanam. Jujur tidak yakin saya bisa tanam. Jadi kalau mengeluarkan kebijakan, Pak Menteri mohon maaf, tolong digodok dulu matang-matang, jangan coba ini, oh salah, coba ini salah, janganlah. Jadi dipikirkan matang-matang, bahwa saya memberikan kebijakan ini dampaknya negatifnya, positifnya yang mana, yang penting dampak positifnya untuk pemerintah dan untuk rakyat. Itu yang paling utama. Sekretariat nanti jadwalkan panggilan Asosiasi Bawang Putih, biar kita RDPU lagi seperti yang dulu.

Saya lihat nampaknya Dirjen Hortikultura itu hanya mengurus, impor bawang putih, ini, ini, tidak dipikirkan pengembangan lain, duren, mangga diekspor, manggis diekspor. Pak Menteri saya sampai pergi ke Beijing dengan Ibu Banun itu dibelakang, hanya untuk meloloskan ekspor manggis, karena di kampung saya manggis banyak. Saya sudah berjanji sama petani saya, Insya Allah kalau nanti ada eksportir yang membeli, harga kamu lebih bagus dibandingkan kamu jual kelokal. Sekarang Thailand pun sudah mulai marah dengan kita. Kebetulan Sekretaris Sekjen Kementerian Pertanian Thailand teman saya, dia bilang, kenapa tidak Klengkeng tidak boleh masuk, oh jangan tanya saya, bukan urusan saya, you tanya sama Kementerian Pertanian. Kalau begitu sudah, manggis kamu juga saya. Jadi kalau balas dendam, balas dendam, tidak selesai-selesai ini Pak Menteri.

Satu hal lagi tadi teman-teman bertanya, berunding dengan saya, ada Pak Darori, ada Pak Mindo, ada Pak Made. Kok kebijakan import hortikultura harus ke Surabaya. Pak Made tadi mengatakan, gara-gara masuk Surabaya, akibatnya apa, buahnya lebih cepat datang ke Bali. Kan begitu Pak Made. Kenapa tidak wilayah yang jauh dari tempatnya penghasil hortikultura, semua tahu Jawa Timur penghasil hortikultura yang sangat bagus, penghasil sayur yang sangat bagus. Ini lho. Jadi kalau membuat kebijakan, tolong dipikirkan lagi ya, ya Pak Dirjen ya. Ini pesan saya.

Selanjutnya.

#### **F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Pak Ketua.

Pak Menteri ini sudah berlarut-larut, mungkin ditingkat apakah itu rapat terbatas itu dengan Presiden yang antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan itu kan

sering tidak sepaham menjalankan sesuatu dengan tujuan yang sama, ambil contoh misalnya yang bawang putih tadi, ada RIPH, rencana import, produk hortikultura rekomendasi ada 69. Katakanlah ke 69 ini diberikan A misalnya 1 ton 69, berarti 69 ton. Tapi yang lalu-lalu, itu Menteri Perdagangan itu bisa memberikan satu perusahaan itu 17 ton begitu, tidak terkait sama rekomendasi. Nah kalau seperti ini terus, kan Presidennya pusing ya. Bagaimana ini kita atasi bersama ini supaya kedepan seperti itu. Nanti akan ada produk-produk lain lagi nanti itu ya, gula nanti akan kena lagi seperti itu, sapi juga akan kena seperti itu. Jadi neraca pangan ini bagaimana sebenarnya dalam hal mengambil keputusan, neraca pangan ada di siapa, ada Menteri Perdagangankah, atau ada di Menteri Pertaniankah, atau koordinasinya di dalam Menteri Perekonomian. Itu mohon jadi perhatian, nanti akan banyak silang sengketa soal ini.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Mindo.  
Dilanjutkan.

#### **DIRJEN PERKEBUNAN (KASDI SUBAGYONO):**

Baik terima kasih Pak Pimpinan.  
Ijin Pak Menteri.

#### ***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Menanggapi pertanyaan Pak Pangga, ada beberapa hal tadi yang berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat.

Kami mendapatkan data dari BPDPKS mengenai sampai sekarang berapa transfernya. Jadi perhari ini Pak Pimpinan dan para anggota, tercatat di BPDPKS 1,7 triliun Bapak yang sudah ditransfer ke para rekening petani, rekening kelompok. Dengan rincian itu dari 3 tahun dari 2017, 2018 dan 2019. 2017, 73 miliar, kemudian 2018, 315 miliar, dan 2019, 1,3 triliun.

Yang kedua, tadi saran dari Pak Pangga, saya kira kami akan mencermati kembali pertimbangan di dalam Undang-Undang Perkebunan tiga tahun itu, karena memang bervariasi. Kalau itu perkebunan semusim, untuk tebu kemungkinan bisa dilaksanakan, tetapi untuk perkebunan tanaman-tanaman lainnya, yang membutuhkan waktu lama kami akan pertimbangkan tidak semata-mata 3 tahun.

Kemudian yang berkaitan dengan penurunan produktifitas Kopi dan Kakao, kami sampaikan tindakan konkrit di dalam program kami, kami akan memperkenalkan di dalam penggantian melalui replanting untuk produktifitas yang lebih tinggi, katakanlah kalau sekarang 0,7 untuk produktifitas untuk Kopi Pak Pimpinan dan para anggota. Itu kami akan mengganti melalui peremajaan dengan produktifitas yang kita pilih 2 ton atau dua setengah ton perhektar dan itu sumber benihnya kami peroleh dari Badan Riset, Lembaga Riset baik itu di Badan Bank Pertanian, maupun dari Perguruan Tinggi.

Kemudian yang menjadi poin juga adalah bahwa kita mendekati kepada lokasi atau cluster pengembangan dari pada komoditas tersebut, sehingga harga benihnya lebih murah. Jadi tidak membeli di Jember misalnya ditanam di Papua, tapi kita akan membuat kebun sumber benih dan juga Nersery di Papua di mana cluster itu berada. Seperti itu.

Kemudian dari Ibu Rizki tadi sangat baik. Kami akan mencermati kembali berkaitan dengan Karet. Seperti juga Pimpinan pernah sampaikan kepada kami, mengenai Karet misalnya. Apakah kita masih terus mendorong peningkatan dari pada Karet, sementara harganya itu rendah sekarang. Menurut hemat kami, Pak ada dua, dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita memang pada posisi diplomasi untuk bisa meningkatkan harga Karet ini. Tapi ini yang belum konkrit, konkritnya tadi adalah bahwa kami memperkenalkan yang kami usulkan adalah membentuk kelembagaan UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) dan disitu kita akan bantu dengan program-program kita, peningkatan kualitas melalui bantuan-bantuan alat mesin untuk meningkatkan kualitas karet. Yang sudah terjadi misalnya di Sumatera Selatan maupun di Kalimantan Selatan, itu harga karet yang di UPPB yang dihargai 9 ribu sampai 10 ribu. Nah ini yang kalau ditempat biasa, hanya 6 ribu.

Kemudian yang berkaitan dengan Sawit Bu Rizki. Saya kira betul sekali. Untuk target kita di dalam konteks replanting Ibu, tidak hanya sekedar usianya yang 25 tahun, Ibu benar sekali. Tetapi walaupun belum 25 tahun, itu produktifitasnya rendah, itu sebagai target untuk kita remajakan bu. Nah sehingga tadi tidak ada lagi Sawit yang kualitas rendah yang masih dibiarkan...(suara terputus) kemudian ditanyakan juga oleh Pak Abdullah berkaitan dengan Cengkeh, kenapa Cengkeh tidak dimasukan, kami laporkan masuk Pak Abdullah, tetapi memang bukan menjadi prioritas nasional, tapi kita programkan seperti kita akan upayakan untuk mengembalikan kejaan rempa ini kami fokus ditiga komoditas rempa, Lada, Pala dan Cengkeh, baik itu di dalam program perbenihan kami maupun di dalam pengembangan kawasan yang dalam hal ini adalah peremajaan dan juga rehabilitasi.

### **F-PDIP (Ir. MINDO SIANIFAR):**

Interupsi Pak Ketua.

Pak Ketua, Pak Dirjen, saya ingin bertanya, kenapa Cengkeh jadi salah satu yang utama untuk rempa. Cengkeh, pengguna Cengkeh terbesar itu Indonesia, dunia ini paling besar itu Indonesia dan itu pula untuk rokok, kenapa itupula kita pusing kita mengeluarkan uang untuk itu pembenihan itu, Pala oke, Pala itu bahwa 80% dunia dari Indonesia. Kalau dikatakan misalnya panili, masih karena kebutuhan dunia. Tetapi kalau Cengkeh, menurut saya keliru itu.

Terima kasih.

### **DIRJEN PERKEBUNAN (KASDI SUBAGYONO):**

Terima kasih Pak Mindo.

Secaranya kami catat dan waktu itu memang konsidran memang Pak, kita menyediakan industry rokok yang cukainya cukup besar, tetapi itu saya kira jutapertimbangan untuk kekomoditas lain, kami akan juga tambahkan setelah yang fokus tiga ini kami selesaikan Pak Mindo. Jadi kita diskusi kemarin juga ada yang menanyakan soal Kayu Manis Pak Mindo, itu juga sekarang masih produktifitasnya rendah dan kita mengarah.

Terima kasih Pak.

Kemudian Ibu Alien terkait dengan harga Kopra dan juga kami berikan alternaniti untuk PCO dan Nata de coco. Ini konkritnya nanti ada bantuan untuk pengolahan PCO maupun juga Nata de coco. Sehingga bisa berjalan sehingga harganya bisa ditingkatkan kalau ada dari Kopra menjadi itu, bahkan juga minyak goreng.

Kemudian yang Cengkeh, memang saran kami dan juga dibebberapa sudah kita lakukan, itu adalah kemitraan dengan pengusaha, tentunya dalam hal ini adalah Cengkeh dengan Perusahaan Rokok yang untuk bermitra untuk itu. Dan tentu tadi dikatakan oleh Ibu mengenai fasilitasi. Kami memfasilitasi baik yang berhubungan komitmen antar dua belah pihak maupun fasilitas-fasilitas yang sifatnya teknis bu, kita akan juga memfasilitasi di dalam kerangka untuk menjalin kemitraan antara petani dan Pengusaha Rokok.

Itu saya kira yang kami catat tadi berbagai pertanyaan dari kami. Tadi ada Pak Kristiantus yang mengenai harga TPS yang sudah kami sampaikan. Sebenarnya sudah diatur dalam Permentan Nomor 1. Nah itu tentu perlu ada satu penekanan kepada para pelaku usaha, supaya mentaati itu, memang banyak sekali dilanggar, saat ini ada yang banyak yang harganya di bawah 1000. Itu sangat tidak adil. Tapi misalnya di Riau, juga

ada 1300 dibeli, di Kalimantan Selatan juga dibeli, tetapi harganya kurang dari ini. Kalau kita mengikuti dari pada Permentan itu, tentu akan bisa pers, karena perhitungannya menjadi sama.

Kemudian juga yang berkaitan dengan Pak Efendi Sianifar tadi menanyakan Replanting. Pak kami laporkan, untuk Pak Pimpinan dan anggota, kami melakukan terobosan untuk memangkas persyaratan yang satu, yang semula 14, kami pangkas hanya menjadi 8 persyaratan. Kemudian yang kedua, adalah mensinkronisasi prosedur diantaranya adalah verifikasi usulannya kelompok tani atau koperasi. Yang tadinya disetiap state kabupaten diperivikasi provinsi pusat, kami hanya melakukan satu tetapkan kami SK kan tim terintegrasi kabupaten, provinsi dan pusat. Itu yang kami lakukan. Dan berdampak Pak Pimpinan kami laporkan, dari target 180 ribu hektar, memang belum sampai pada posisi target itu, hanya pada posisi 6 bulan kita bisa memperoleh 68 ribu. Sementara di 2018 kemarin, dari 185 kita baru menyelesaikan merealisasikan sekitar 34 ribu. Jadi ada percepatan karena kita mempermudah.

Demikian Pak Pimpinan dan anggota.

Terima kasih.

***Assalamualaikum WArrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dirjen.

Selanjutnya, ia Pak Made silakan.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Sedikit Pak Ketua.

Ia terima kasih Pak Ketua.

Subsector perkebunan ini cukup menarik, jadi kalau kita melihat perjalanan Negara kita, ketika mengalami krisis Tahun 1998, subsector perkebunan ini masih tetap eksis, ini membuktikan kontribusi ekonomi yang cukup bagus. Nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, komoditas yang sampai saat sekarang, misalnya seperti Coklat. Nah jadi Coklat jadi harganya stabil terus, tidak pernah mengalami turunan. Kita punya program dulu yang namanya akselerasi peningkatan produktifitas coklat kita. Nah barangkali ini perlu dihidupkan kembali melalui stek samping ini, kita sudah tinjau kelampahan terutama penghasil Coklat cukup banyak Sulawesi, hampir seluruh Sulawesi itu adalah penghasil Coklat cukup bagus itu. Nah barangkali ini perlu dihidupkan Pak Dirjen.

Yang kedua, di Tebu. Nah di Tebu ini dulu kita punya program yang namanya program bongkar ratun itu. Jadi revitalisasi ini yang sudah sampai 7 kali harus lakukan peremajaan melalui bongkar ratun ini. Cukup bagus itu kalau pelaksanaan di Jawa Timur itu. Nah barangkali ini perlu diadopsi kembali Pak Dirjen. Untuk kedepan jangan sia-siakan program-program yang sudah lama itu yang mampu memberikan kontribusi dicampakan begitu saja. Jadi perlu dihidupkan kembali itu.

Nah selanjutnya, Kopi juga. Kopi kita terus mengalami penurunan Pak Dirjen. Perlu dilakukan revitalisasi, penambahan kawasan-kawasan baru perkebunan Kopi ini. Dulu Peta dengan kita di Jember, sekarang kita kalah jauh itu, kita sempat melakukan di peninjauan di Vietnam, di daerah itu, wah, Kopinya lewat betul, merah semua sampai ketanah itu. Nah bagaimana kita mengembalikan ini, ini bahwa produksi kita tidak kalah disubsektor perkebunan ini.

Barangkali itu Pak Dirjen, Pak Menteri yang saya sampaikan.  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Made Urip, Pak Dirjen. Disini ada masukan, saya lihat disini di Tahun 2020 ada pengadaan 5 juta 270 ribu bibit Karet, kenapa ini tidak dialihkan saja. Toh juga kalau kita lihat, komoditi Karet ini akan datang, mungkin 4-5 tahun akan datang, ia harganya tidak mungkin bisa bagus, selama minyak dunia harganya jatuh.

Yang kedua, masalah BPDPKS tadi, itu koordinasinya bagaimana dengan Pak Dirjen, pengawasannya bagaimana.

#### **KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

Ijin Pak Pimpinan.

Dalam konteks peremajaan, itu kita membuat BPDPKS membuat online sistem. Nah kami di Kementerian Pertanian ini, berkewenangan dan berkewajiban untuk rekomendasi teknisnya Pak. Setelah rekomendasi teknis, kami sampaikan ke BPDPKS, kemudian itu mereka atas dasar itu mentransfer dari pada usulan itu kepada petani.

#### **KETUA RAPAT:**

Pengawasannya?



**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

Pengawasan kita punya ada Dewan Pengawas disitu. Itu Dewan Pengawas itu di bawah BPD PKS. Kemudian selalu dievaluasi setiap bulan Bapak. Dievaluasi setiap bulan dan juga ada nanti ditingkat menteri di Komisi Pengarah. Disitu akan ada arahan baru atau arahan lain untuk bisa menyempurnakan pelaksanaan peremajaan itu.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen punya datanya?  
Berapa banyak wilayah yang ditransfer?

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

Data detailnya belum punya saya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tolong nanti carikan datanya. Karena kalau bilang transfer, transfer, transfer siapa yang tahu. Karena ini kalau saya bilang badan ini badan tidak jelas, terima duit, pengembangannya apa, yang saya tahu ini banyak mensubsidi masalah Bio Diesel kepada pabrik-pabrik besar. Nanti Pak Dirjen pasti punya datanya, perusahaan A sekian ratus miliar disubsidi untuk pengembangan Bio Solar, Bio Diesel perusahaan ini. Ya Pak ya tolong, karena ini sangat penting sekali data. Selanjutnya silakan.

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

**Baik, yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IV**  
***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Pak Menteri mohon ijin Pak, sedikit saya sampaikan yang terkait dengan pertanyaan Pak Fachri tadi, mengenai NTT Pak. Kami Insya Allah 2020 kita intensifkan kegiatan kami untuk pengentasan tentang rawan pangan Pak. Kami sudah lakukan identifikasi ada sekitar 785 kecamatan di Indonesia yang harus kita intervensi untuk kita tingkatkan, termasuk NTT Pak.

Nah terkait juga kaitannya dengan program pasca bencana Pak, kami juga akan intensifkan untuk Tahun 2020, kami akan lakukan intervensi tentu kami tidak bisa memberi bantuan dalam bentuk natura, kecuali kami bekerja sama dengan Bulog

misalnya atau kawan-kawan dari menggunakan CSR nya kawan-kawan di BUMN, tetapi dari kementerian Pertanian, intervensi kita adalah program paska bencana. Itu yang akan kami lakukan.

Demikian terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Dirjen Peternakan.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Terima kasih Pak Ketua.

Mohon ijin Pak Menteri, kami menyampaikan data.

Pertama, kami sampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Pak Dr. Pak Hermanto, terkait dengan pengadaan Sapi yang banyak sakit dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kami sudah melakukan terhadap dinas itu, karena kami biayai dinas masing-masing dinas provinsi yang mengadakan masing-masing dinas provinsi. Jadi pengawasannya 100% ada disitu, tapi kami monitoring pusat, kemudian kita cek mana yang pengadaannya tiak baik kami kontrol, terus kami tegur kalau memang sudah tidak. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik Pak.

Selanjutnya Nomor 2, pertanyaan dari Pak Nana. Pak Nana, itu terkait dengan pesan dari Gapuspindo ya, bahwa ada 5% terkait dengan Permentan 41, itu sebenarnya esensinya itu adalah bagaimana kita menambah jumlah indukan itu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya para itu ada terhadap pemanfaatan petani-petani kita disekitar *feedloter* itu. Sebenarnya kita yang inginkan bukan dikandungnya, tetapi bagaimana mereka bisa mengajak petani disekitarnya untuk ikut sebagai partnernya sebenarnya. Nah untuk itu walaupun sebenarnya kecil kemarin masuknya Pak, sekitar 10% itu sudah menambah hampir 38 ribu indukan dari *feedloter* saja untuk Tahun 2017 sampai 2018 akhir. Artinya kalau pemerintah yang mengadakan itu lumayan dananya itu 38 ribu Pak. Nah itu sebenarnya keuntungan kita untuk pemerintah.

Nah untuk selanjutnya terkait dengan pengadaan Sapi ini harus dicarikan Sapi-sapi yang manut-manut begitu ya Pak ya, ya namanya dari Sapi yang kita impor itu adalah Sapi BX, Brahman Cross, dari Australia. Dia memang liar disana, dibiarkan. Nah terus kita disini di Indonsia tidak mempunyai padang penggembala seperti Australia. Kita sebenarnya sudah bagi Pak, mohon ijin. Sebenarnya untuk petani-petani kita sudah

mempunyai masing-masing, misalnya kalau di Bali, itu sukanya Sapi Bali, bukan Sapi Brahman Cross. Kalau di Jawa Timur, lebih suka dia Brahman Cross atau PO. Jadi semua kalau di Aceh, dia lebih suka Sapi Aceh itu. Artinya untuk masing-masing geografi daerah dan masyarakatnya kita sesuaikan dengan keinginan mereka. Karena apa bila itu dia kita tidak sesuaikan, biasanya gagalnya lebih tinggi, kalau orang itu suka pelihara Domba, terus dikasih Sapi, ia Sapinya dijual dibelikan Domba Pak. Nah itu alasan kami.

Kemudian Pak Bambang, terima kasih Pak, ini terkait dengan Sapi-Sawit ini. Sapi-Sawit, kami memang mengarah kesana, karena seperti tadi kami uraikan bahwa sebenarnya potensi existing, lahan kita lahan sawit kita itu ada 13,7 juta hektar. Dari 13,7 juta hektar itu, terisi baru 0,9% Sapi-Sawit. Sapi-Sawit 0,9% kalau saya hitung Sapinya sekitar 66 ribu. Nah ketika ini kita maksimalkan 20% saja dari 0,9%, mungkin 50% kita bisa tekan impor daging. Nah ini kami mohon dukungan dari Komisi IV, karena kami juga sudah ijin juga dengan Pak Menteri dan Beliau sangat setuju itu, mudah-mudahan ini bisa berjalan Tahun 2020.

Nah untuk Pak Made. Terima kasih Pak Made Urip. Bahkan Siwab kami memang secara statistic, data sutas, mengakui jumlah sapi kita saja sudah meningkat sekarang ini 18.120 ribu. Itu angka sutas Pak. Artinya dari 14 juta kita Tahun 2014, sekarang populasi kita 18 juta 120, kami boleh di cek, karena ada angka sutasnya. Artinya Siwab ini memang perlu Tahun 2020 kami rencana lipatgandakan, karena target akseptor kami Tahun 2019, 3 juta, nanti akan kami lipatgandakan menjadi 5 juta. Kenapa tidak bisa 6 juta, karena akseptor kami cuma segitu adanya, karena beberapa akseptor kami gunakan untuk memacu pertambahan populasi Sapi Blue.

#### **KETUA RAPAT:**

Agak singkat sedikit Pak Ketut, karena.

#### **DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Selanjutnya untuk Pak Mindo.

Terima kasih Pak. Kemarin itu ternak itu sebenarnya bukan ingin demo, mereka sebenarnya ingin aksi damai, agar Dirjen Peternakan jangan sampai jatuh katanya Bulan Desember. Tadi suratnya setelah saya cek benaran itu memang mereka ingin aksi damai. Jadi besok kami terima di Gedung C lantai 6, dengan segala hormat kami mengundang Pak Mindo, untuk bisa memberikan arahan disitu. Mohon ijin Pak Menteri. Kalau bisa sekiranya Bapak hadir, kami sangat berterima kasih.

Mohon ijin beserta Bapak-bapak, beserta Ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, Ketua DPR.

Kami mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Ichsan, yang terkait dengan ASF, yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina. Saya sebenarnya Dirjen Peternakan, tapi karena saya dokter hewan, jadi saya paham benar tentang penyakit ini. Jadi penyakit ini sebenarnya adalah penyakit eksotik, artinya penyakit yang belum ada di Indonesia. Nah kemudian penyakit ini sebenarnya sudah kita waspadai dari tahun lalu. Langkah-langkah preventif sudah kita lakukan, tapi kita sebenarnya sudah terkurung oleh penyakit ini, mulai dari Eropa, kemudian lahir di Cina Tahun 2018, Bulan Maret, kemudian melebar ke Mongolia, kemudian Vietnam, Kamboja, kemudian Korea Utara Pak, setelah itu Laos, kemudian Filipina, terakhir Timor Leste. Artinya kita di tengah-tengah sudah dikurung.

Saya sebenarnya yang paling curigai kemarin itu meledaknya di Kupang. Dari 10 titik sentra-sentra babi kita, itu ternyata meledaknya di Sumatera Utara. Kami setelah kami analisa, kenapa disana, padahal disana tidak ada penerbangan langsung dari Cina ke Medan, yang ada justru dari Cina ke Sulawesi Utara dan dari Cina ke Bali. Nah kami menganalisa karena itu mungkin adanya jadi penyelundupan lebih banyak di Medan. Sehingga dengan demikian kasus, kasus Kolera, kasus ASF itu semua meletusnya di Medan awalnya. Itu barangkali langkah-langka yang telah kami lakukan. Mohon maaf Pak Menteri. Pak Menteri sudah mengirim surat ke Gubernur Sumut, untuk segera melaporkan segera hasilnya dan tadi baru kami dikirimi Via WA Pak, jawaban dari Pak Gubernur, dengan jawaban itu kami akan tindaklanjuti segera untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan.

Nah untuk langkah-langkah di Sumut, kami sebenarnya sudah membuat posko-posko. Posko-posko diseluruh kabupaten, agar Babi itu tidak dibuang sembarangan seperti kesugai, sekarang yang membuat kesugai sudah ditangkap oleh Polisi. Kami sudah koordinasi, tim kami sudah datang kesana, tim kita bentuk ada yang dari PU, ada yang dari Kesehatan, ada dari kita, Babinsa dan Kepolisian.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.  
Terima kasih.

***Wassalamualaikum.***

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Interupsi Ketua, sedikit tadi mengenai masalah penempatan Sapi di Sulawesi Barat itu, khususnya untuk Sapi Impor.

Saya ingin sampaikan bahwa ini perlu dievaluasi, karena rencana lokasinya itu bersamalah, bersamalah dengan rakyat. Bisa saja dilanjutkan, tapi lokasinya diganti, supaya tidak berhadapan dengan masyarakat. Tadi saya sepat juga ditelepon oleh mereka, tolong Pak jangan ditempatkan disitu, karena mereka punya tanaman dan lokasi disitu.

Itu Pak Dirjen.  
Terima kasih.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Baik Pak terima kasih Pak.

Kami akan evaluasi, karena terus terang kami kemarin bertemu juga dengan Gubernur Sulawesi Barat, terkait dengan langkah-langkah itu mudah-mudahan semuanya bertemu dengan baik, karena intinya kami sebenarnya bagaimana Sulawesi Barat ini juga merupakan sentra Sapi kita di Indonesia, salah satu sentra.

Mungkin itu, terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, jadi Pak Dirjen jangan menyalahkan tadi, oh itu virus karena ada Babi selundupan, jangan menyalahkanlah, bilang saja itu kelalaian kita bersama. Titik. Saya rasa lebih terhormat kalau anda bicara begitu. Kalau anda bilang tadi, seolah-olah oh ini ada penyelundupan begini, begini, begini kan itu tidak benar. Penerbangan dari Cina ke Medan itu ada transit, transit Kuala Lumpur ada, bukannya tidak ada, ada Pak. Ia jadi bisa saja kelalaian karantina disana. Ini juga saya ingatkan Kepala Badan Karantina, BKIPM juga banyak masalah Pak karantina disana dan saya sangat tahu sekali mainan mereka bagaimana itu.

Selanjutnya, masih ada.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Pak Ketua, lanjut sedikit Pak.

**KETUA RAPATA:**

Ia Pak Made.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Nah tadi Pak Dirjen menyinggung masalah penyakit ASF itu ya yang di oleh Babi. Itu kemarin saya bertemu dengan Asosiasi Peternak di Bali itu, menyampaikan keluhan tentang pelarangan mencari makanan Babi dari sisa-sisa Hotel dan Restoran itu. Nah itu karena katanya itu adalah salah satu penyebaran juga. Hampir seluruh peternak di Bali itu mengeluh, karena cukup mengandalkan dari makanan sisa-sisa makanan dari Hotel dan Restoran itu, itu kan higienis sebetulnya itu dari roti dalin sebagainya, cukup bersih itu dan cukup bagus kualitas daging itu jadinya. Nah barangkali ini bagaimana solusinya Pak Dirjen itu, tentang larangan atau himbauan dari pemerintah daerah untuk sisa makanan untuk Babi yang dari Hotel dan Restoran itu, apakah itu salah media penyebaran penyakit ASF itu atau bagaimana.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Mohon ijin Pak Ketua, kami jawab.  
Terima kasih Pak Made.

Terkait dengan pelarangan itu sebenarnya saya belum dapat tembusannya, tetapi sebenarnya yang dilarang adalah, artinya penerbangan yang langsung. Jadi misalnya Cina-Bali, itu adalah tersebarnya Virus ASF ini. Virus ASF ini adalah virus yang sangat unik merupakan DNA virus, artinya sampai hari ini belum ditemukan vaksinnnya oleh dunia. Nah untuk itu straight atau maksimum security itu sangat penting. Namun demikian, kalau tidak berasal dari daerah-daerah yang tertular, saya kira tidak bermasalah. Yang kita khawatirkan dari Cina langsung ke Denpasar, dari Cina langsung ke Manado dan itu kami sudah koordinasi kan dengan Kepala Badan Karantina dengan seluruh kawan-kawan karantina agar memperketat memang itu, karena sosis pembawah sosis, sisa-sisa sosis, sisa makanan dan lain sebagainya dari Pesawat berasal dari Cina, itu sangat berbahaya.

Terima kasih Pak.

Nanti mungkin setelah surat itu akan kami telusuri, nanti akan kami luruskan agar peternak Babi di Bali tidak teriak, karena ada 10 titik yang harus kami waspadai itu ada di Manado, ada di Medan, ada di Sukalsel, kemudian ada di Papua, kemudian NTT. Jadi daerah-daerah yang mayoritas non Muslim, tetapi ada juga di Jawa beberapa titik seperti di Jawa Tengah yang perlu kita waspadai Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen terakhir pertanyaan dari saya.

Setahu saya India itu adalah PMK masalah Sapi dan Kerbau. Dulu setahu saya itu masuknya Country, tiba-tiba dirubah menjadi zona. Ya Pak ya, betulkan. Apa sebabnya bisa begitu. Itu pertanyaannya. Karena kalau nanti Bapak bicara oh, yang PMK itu wilayah provinsi ini, yang ini tidak, siapa yang menjamin, dan ingat Pak ya. Perlu Bapak ketahui dan Bapak juga pasti tahu, disana dimonopoli oleh satu, pengusaha yang mengumpulkan Kerbau dari beberapa daerah. Bapak tidak perlu jawab, asal Bapak resapi pertanyaan saya ya. Bahwa itu dari Country menjadi zona, itu menjadi pertanyaan besar, belum timbul korban. Jadi kalau belum timbul korban, kita diam saja tidak apa-apa nanti kalau sudah timbul korban, kita mulai sibuk, wah ini kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini dan saya tahu kok, yang pergi bukan Bapak kesana waktu itu negonya ya. Bapak tidak pergi kan Pak, tidak kan, ia. Ia jelaskan pakai Mic, biar direkam.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Mohon ijin Pak Menteri, kami jelaskan.

Terkait dengan APMK ini, India itu, India itu memang tidak termasuk zona Country, tapi dia, namun OIE, memberikan dia sertifikat pada seluruh RPH yang ada disitu pada titik-titik RPHnya, telah mengikuti zona dan ada pernyataan OIE. OIE itu adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia. Jadi itulah yang menjadi pijakan kami, karena kenapa kami masih yakin bahwa PMK tidak akan masuk ke Indonesia. Dua, PKM tidak masuk ke Indonesia ada ilmunya, satu, dia tidak mengandung..., dua, tidak mengandung pecahan sum-sum tulang, tiga, dilayukan pada PH basah. Artinya yang ketiga ini dilakukan dengan disiplin, kami yakinkan itu.

**KETUA RAPAT:**

Bapak yakin disana disiplin, apa jaminannya.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Kami di sana itu, Tim dari Karantina sudah kesana, mengecek semua.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang Karantina memang setiap bulan kesana, tidak semua wilayah India itu bebas PMK.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Mohon maaf Pak, saya jelaskan dari segi ilmu pengetahuan saja.

**KETUA RAPAT:**

Ia silakan.

**DIRJEN PETERNAKAN (I KETUT DIARMITA):**

Untuk PMK, untuk PMK Penyakit Mulut dan Kuku, penularan lewat daging sepanjang dilakukan pelayuan, dilakukan pembekuan tanpa sum-sum tulang, tanpa.....dari segi ilmu pengetahuan.

**KETUA RAPAT:**

Ia kita lihat saja Pak.

Jadi begini contohnya, saya kasih tahu Bapak. 15 tahun lalu, Teluk Buyat tercemar mercury, seluruh Jepang tidak menerima Ikan dari Indonesia, dianggapnya apa, seluruh Indonesia tercemar. Saya ingat Bapak, kalau belum timbul korban, anda boleh bicara begitu ya. Saya ingatkan. Tapi nanti kalau sudah timbul korban, Bapak baru berfikir.

Yang kedua, daging Kerbau itu masuk ke Indonesia dengan harga tidak terlalu mahal. Mematikan petani tidak, peternak tidak. Ia kita pasti bicara juga secara jujur. Ini lho Pak yang terjadi Pak. Pak Sekjen masih ada?

Oh ia silakan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.  
Pak Menteri ijin,

Yang pertama, kaitan dengan dari NTT, Pak Anies, kaitan dengan membangun pola pertanian dahan kering. Jadi kami ada kegiatan sumur dangkal Pak. Jadi



kedalamannya 50 meter, karena kalau di atas 50 meter itu namanya sumur dalam wewenang PU. Kemudian juga ada Embung, ada Pipanisasi, nanti bisa dikonek, kemudian baru disalurkan kesawah-sawah atau ke komoditas pertanian yang diusahakan oleh para petani.

Kemudian yang kedua kaitannya dengan Excavator, itu sudah dikirim Tahun 2018,10 unit ke NTT, hampir disetiap kabupaten ada, nanti kalau memang tepatnya Bapak perlu, itu bisa ditarik dan dialihkan ke lahan-lahan yang memang memerlukan Excavator itu Pak ya.

Kemudian yang kedua Bapak Pimpinan, kami jelaskan juga kaitan dengan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa ada potensi kerugian Negara 200 miliar. Dapat kami sampaikan bahwa pertama, kami sudah melakukan komunikasi dengan LKPP, minta kejelasan, karena itu catalog, ternyata ada surat dari LKPP, bahwa yang dimaksud ongkos angkut tersebut dsari pabrik ke gudang, bukan dari gudang ke titik bagi.

Kemudian yang kedua juga, ada hasil review dari BPKP, yang menyatakan bahwa tidak ada duplikasi ongkos angkut.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, maksudnya dari Pabrik ke Gudang siapa ini.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Kegudangnya perusahaan Pak, tempatnya terpisah.

**KETUA RAPAT:**

Jadi diproduksi oleh perusahaan, diangkut ke gudangnya, dibebankan ke Negara begitu?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Tidak Pak, itu dibebankan kemereka.

**KETUA RAPAT:**

Yang tadi 200 miliar?

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Yang 200 miliar itu dari gudang ketitik bagi. Dari gudang diangkut ketitik bagi itu, kontrak sendiri. Ini pada Tahun 2016 ini kejadiannya. Jadi sudah direview oleh BPKP, kemudian ada surat pernyataan.

**KETUA RAPAT:**

Karena dua minggu yang lalu, saya masih ke BPK, mereka masih mempertanyakan masalah ini lho Pak, dua minggu lalu, supaya clear.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Siap-siap.

**KETUA RAPAT:**

Supaya jangan nanti Pak Menteri yang baru menjadi masalah.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Siap Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (SARWO EDHY):**

Siap.

Kemudian dari Irjen juga sudah melakukan pemeriksaan dan memang sudah dihitung juga, tidak ada dupliksai, namun demikian nanti untuk menyakinkan kami akan konsultasi lagi dengan BPK yang mempunyai temuan Pak.

Kemudian yang ketiga, kaitan dengan pertanyaan Ibu Endang. Ibu Endang kami mempunyai lembaga keuangan mikro di agribisnis dipedesaan, itulah yang akan kita konekan ke bank-bank pemerintah, karena memang untuk membuat atau membangun atau membuat bank pertanian itu, pengalaman dari bank agro, itu dibangun 1997-1998, kemudian dalam perjalanannay tidak bisa bersaing, karena memang mereka focus untuk komoditas perkebunan dan pertanian lainnya, akhirnya pada Tahun 2010, diakui

oleh sisi BRI dengan nama BRI Agro. Jadi memang kita harus mengkaji lebih dalam untuk membangun Bank Pertanian, tapi kedepan itu cita-cita kami dan sementara sesesuai saran Ibu, bahwa kita membuktikan bahwa lembaga-lembaga yang ada di desa, LKM-LKM itu ke bank-bank pemerintah.

Kemudian yang terakhir, kaitan dengan kurang bayar Pak Pimpinan, kami juga ingin mencoba ingin mengambil langkah-langkah karena memang kurang bayar ini dari tahun ketahun, semeningkat dari 15,5 triliun, 2018 sudah kita bayar 9,7 triliun, sehingga saat ini hutang pemerintah kepada Pupuk Holding 5,7 triliun. Kami akan mengambil langkah bahwa untuk 2019 ini, distribusi pupuk akan distop per 31 Desember, walaupun ada aturan Kementerian Keuangan, kaitan dengan bisa sampai dengan akhir Februari. Ia mungkin dari Januari sampai Februari itulah yang menyebabkan kurang bayar, karena setiap selesai distribusi sesuai Undang-Undang diaudit oleh BPK. Jadi kami akan mencoba sampai dengan 31 Desember sesuai dengan Undang-Undang APBN kita stop penyalurannya.

Mungkin itu salah satu cara akan kami coba disamping ada cara lain yaitu menaikkan harga eceran tertinggi. Kalau saja kita menaikkan 200 rupiah saja, kita akan dapat hampir 2 triliun rupiah Negara diuntungkan. Tapi untuk menaikkan, kami khawatir ada gejala ditingkat petani.

Mungkin itu Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak-Ibu, Pak Dirjen menjelaskan, tadi mengatakan, kalau nanti di kabupaten Bapak, butuh Excavator, kami kirim, jelaskan. Yang bayar BBMnya siapa, yang bawah angkut dari titik ke titik itu siapa. Dijelaskan. Jangan nanti Bapak ini anggota baru pulang kekampungnya, sedangkan itu ada di Brigade, dijelaskan, atau saya yang menjelaskan. Saya jelaskan Bapak-Ibu. Jadi kalau pinjam alat milik Kementerian Pertanian, yang disimpan di brigade, baik di provinsi maupun di kabupaten, ongkos angkot kita yang bayar, anggota yang bayar, BBM juga kita yang membayar, bukan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi. Sekarang permasalahannya Pak Dirjen, tolong dicek berapa banyak bantuan Excavator yang, berapa banyak yang layak jalan, berapa banyak yang tidak, karena setahu saya perawatannya sangat minim sekali. Ini lho Pak Menteri belum tahu Pak Menteri. Jadi kalau saya pinjam, saya membayar ongkos angkot, bolak-balik, kalau dekat dua setengah juta, bolak-balik 5 juta, BBM selama operasional, kemarin ada Pak Irjen, ada Pak Dadi itu melihat di Lampung mendalami Embung 3 bulan Pak, selama 3 bulan saya yang membayar BBM nya. Jadi perlu jelas

ini. Teman-teman tidak tahu ini Pak Dirjen ya. Ini sekarang tadi ada Pak Febri, mau bicara atau nanti tanggal 27, tanggal 27 ya.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Sedikit Ketua,

Tadi berjalan sampai PK. Sebelum Pak, itu ada petugas dari BPK di Kabupaten Jembrana itu membagi-bagi traktor itu hampir 40 kelompok, sampai sekarang belum keluar itu dan mengajak Komisi XI. Kira-kira apa hubungannya itu. Jadi BPK membagi traktor, kemudian komisi yang lain misalnya. Nah itu.

Coba jelaskan di Komisi IV Pak.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Pak Ketua, sebelum ke yang lain, mungkin saya menyambung sedikit soal lahan kering tadi. Pak, soal Excavator itu, itu hanya derivasi turunannya. Saya ingin bicara dalam skala grand desain konsep yang besar, karena itu makanya saya katakann tadi. Perlu perubahan paradigma yang diterjemahkan menjadi regulasi dan kebijakan, kemudian diterjemahkan lagi menjadi aksi inflementasi. Tadi Bapak bilang 10 Excavator, NTT 22 kabupaten/kota, kemiskinan sampai hari ini masih 22 sekian persen, 1,3 juta lahan, itu kita serius tidak Pak. Kalau kita bicara misalnya di lahan basah, itu ada kredit buat para petani, di lahan kering itu tidak ada Pak, tidak ada bank yang mau mengasih. Nah saya itu mau mendengar konsep yang komprehensif Pak. Itu maksud saya. Jadi bukan sekedar saya hanya pinjam terus pinjam dua setengah juta, bukan itu Pak.

Saya ingin dengar, 2020 misalnya Pak, untuk lahan di NTT 1,3 juta, itu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, itu mau apa saja. Itu yang mau saya dengar Pak, bukan sekedar 10 Excavator itu, itu terlalu kecil Pak. Nah jadi dibangun sebuah konsep yang komprehensif, karena terkesan mindset kita terlalu happy ke lahan basah, untuk konteks NTT Pak. Sementara lahan kering itu kurang mendapatkan perhatian yang setara dan adil, itu tesi saya Pak. Nah karena itu, bagaimana supaya agar ada proporsionalitas selain membangun lahan basah yang 214 ribu ini, yang satu 1,3 juta ini, ini bagaimana Pak, itu maksud saya. Setiap tahun di NTT itu orang lari pergi luar negeri Pak, jadi TKI, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Dan Bapak tahu 2018 itu 105 orang keranda mati sampai ke NTT, perbukitan ini sudah 104 Pak. Nah tolong. Saya minta tolong betul ini harus diperhatikan Pak.

Terima kasih.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Baik Pak, nanti kita pelajari dengan Direktorat Teknik, sehingga nanti akan merupakan pertanyaan terpadu.

Terima kasih.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Pak mohon maaf Pak, sebentar lagi Pak ya.

Saya itu ingin mendapatkan satu konsep yang jelas data, *step and timing*, serta targetnya itu terukur Pak. Saya bisa tunjukkan misalnya di Perkabupaten satu kabupaten mari kita kerja disini, di kabupaten ini kita pindah kerja disini, kita hitung secara bersama Pak, sehingga targetnya itu jelas Pak. Kalau Bapak bicara perencanaan lagi, begini, begitu itu, susah dipegang Pak, mohon maaf Pak. Pak Menteri saya harus bicara seperti ini, karena memang hal ini kurang diperhatikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi nanti kita ada pembahasan lebih detail lagi, dengan Eselon I ya. Nanti ini hanya secara besar, nanti kita akan membahas secara detail sama Eselon I, kalau perlu tiga hari tiga malam tidak masalah.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Pak Ketua sedikit.

Tadi sudah soal THL itu belum dijelaskan, karena anggaran daerahnya sudah disediakan Pak, tapi tidak bisa dibayar karena tidak ada payung hukum dari pemerintah pusat. Jadi bagaimana persoalan ini. Hari ini mereka sedang menunggu Pak, status mereka ini risau, galau begitu Pak, karena tidak jelas sampai sekarang statusnya. Dianggarkan oleh daerah, tapi tidak bisa diuangkan, karena tidak ada payung hukum dari Pemerintah Pusat. Tolong apakah ini bentuk Kepres atau Permen atau apalah dikeluarkan.

Terima kasih Pak Ketua.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Insya Allah Bapak, selama PPPK, ASN nya belum selesai, Jakarta masih mempersiapkan uang, karena itu komitmen kami ke Bapak dulu. Artinya yang 11 ribu yang sudah lolos hasil *passing grade* tapi karena Perpresnya belum keluar, Kementerian Pertanian Tahun 2020 masih membayar. Jadi uang masih dibayar oleh Kementerian Pertanian.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Ini uangnya sudah disiapkan oleh daerah, sudah ada di APBD.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Kami nanti berkoordinasi dengan.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Tapi tidak dibayar karena tidak ada Kepres.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Kami nanti berkoordinasi dengan Permen PAN, agar supaya ini kasusnya bukan hanya Penyuluh, tapi Bidan dan Guru Bapak. Jadi kasusnya kasus nasional. Tapi Kementerian Pertanian sudah mengantisipasi termasuk yang Pak Hermanto yang SMD, tapi untuk istilah SMD nya saya ganti Pak, karena kalau tetap SMD tidak akan bisa terproses, payung hukumnya tidak ada. Jadi kami sesuaikan dengan rumput yang ada di pertanian. Jadi Insya Allah tetap kami bayar, begitu ada Perpresnya keluar, memang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/kota.

Barangkali demikian Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Johan sedikit menjelaskan.

Jadi ini bukan hanya petani, tapi satu kesatuan Guru dan Bidan kalau tidak salah. Ini kami membahas mungkin lebih dari 9 kali, 10 kali melibatkan Kementerian Keuangan, Menpan, Mentan, Mendiknas, Menkes itu sampai mungkin 3, 4 Tahun Pak,

termasuk Kementerian Keuangan juga. Sabar sedikit, pasti pemerintah bertanggung jawablah.

Terima kasih kepada Pak Menteri dan Eselon I yang sudah menyampaikan jawabannya.

### **Bapak-Ibu yang saya hormati.**

Dari dialog, diskusi saran dan masukan anggota Komisi IV DPR-RI, sebelum acara ini kita akhiri, kami bicarakan, Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja hari ini. Tampilkan. Cukup banyak Pak Menteri dan Pak Menteri juga cukup lelah sepertinya.

### **Kesimpulan/Keputusan:**

1. Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh Peraturan Perundangan di Bidang Pertanian dan Pelaksanaan Kebijakan Pertanian antara lain mengenai Kebijakan Cetak Sawah, Subsidi Pupuk, Importasi Bawang Putih, Pengembangan Komoditas, Perkebunan, Tata kelola dan Pengembangan Peternakan dan Kebijakan Integrasi Sapi-Sawit. Disamping itu, Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan road map kebijakan pengembangan seluruh subsector pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI bersama Eselon I Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat.

Anggota?

Pertanyaan itu sudah menyangkut Pangan. Oke, masukan. Kebijakan pertanian antarlain. Mengenai pangan atau lain mengenai kebijakan pangan.

Pak Menteri setuju?

### **(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan verifikasi seluruh data pertanian dalam rangka pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Jadi ini visinya Presiden, maju, mandiri dan modern. Kalau sudah mandiri, otomatis berdaulat. Ya jelas ya. Oke, ini sudah malam. Bukan masalah alergi, tadikan pembangunan pertanian yang maju, mandiri, mandiri itu sudah berdaulat.

Pak Mido perlu tambahkan kata-katanya.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Kalau pada definisi di Undang-Undang Pangan, kita bedakan antarakan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Mungkin maksudnya Ibu Lulu, supaya konsisten dengan kata-kata pada Undang-Undang.

..... :

Saya si mandiri sudah mengcover arti Undang-Undang itu, takutnya kita over life ada mandiri berdaulat lagi seperti itu, jadi fiksinya jadi over life. Tapi kembali kepada foreman.

**KETUA RAPAT:**

Tapi ini visinya Presiden RI lho, maju, mandiri dan modern. Pemerintah.

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR-RI menerima usulan atas perubahan komposisi pagu anggaran Tahun 2020, lingkup Kementerian Pertanian. Komisi IV DPR-RI bersama Eselon I Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman terkait dengan perubahan komposisi pagu anggaran Tahun 2020 lebih detail sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, saya minta penjelasan dulu Ketua poin tiga ini. Boleh ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bolehlah, masa tidak boleh, Bapakan anggota Komisi IV Pak.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Oh saya pikir tidak boleh, mentang-mentang sudah ulang tahun. Jadi Pak Ketua, poin tiga ini, kita menerima usulan perubahan. Ini ada kaitannya dengan poin dua terkait dengan verifikasi data pertanian. Sekali lagi ketika terjadi perubahan data pertanian, maka salah satu konsekuensinya adalah komposisi pagu anggaran. Tadi kita sudah diskusi terkait dengan misalnya luas lahan, nanti di point 4 saya juga lihat.



Artinya begini, kalau dipoin 3 ini kita menerima usulan, saya setuju kita menerima dulu usulan dari Kementerian. Tetapi nanti pada saat pendalaman, saya meminta kepada Kementerian Pertanian untuk kemudian menyampaikan data satu data, data BPS, lalu kemudian turunannya apa, misalnya saja tentang bantuan benih misalnya. Ya nanti kita bisa usulkan apakah kemudian bisa jadi subsidi apa tidak, tadi kan sudah kita sampaikan. Artinya data pertanian yang sudah terverifikasi, itu nanti kemudian diurangkan pereselon I, lalu kemudian berapa sesungguhnya pagu anggaran yang tepatnya. Nanti kita lihat apakah bisa direalokasi atau tidak, kita lihat dulu. Nah nanti tanggal berapa Pak Ketua pendalamannya, rencananya.

**KETUA RAPAT:**

Saran saya pendalamannya setelah data per 1 Desember.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Itu poinnya maksud saya.

**KETUA RAPAT:**

Ia setelah 1 Desember data valid, baru kita lakukan, nah berapa Pak Ichsan, tenang saja. Soalnya Bapak pasti masuk DPP Pak, karena Bapak gengnya siapa saya tahu Pak.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Pendalaman itu poinnya adalah bagaimana kemudian data verifikasi per 1 Desember itu sudah di verifikasi, sudah diclearkan, baru kemudian turunannya seperti apa. Saya hanya memberikan catatan itu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Ichsan, Pak Menteri saya jelaskan. Kita reses mundur jadi mulai Tanggal 18 mulainya, tadinya 12. Jadi mungkin setelah Tanggal 1 diterima datanya, serahkan kekami, baru kami beri kesempatan sebelum reses kita bahas.

Pemerintah setuju?

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Tapi datanya 1 Desember, oke clear Pak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7.909.303 ton atau setara dengan 26 triliun 627 miliar 384 juta 695 ribu 943. (Rp26.627.384.695.943,00) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Urea sebanyak 3 juta dua ratus tujuh puluh empat tiga kosong tiga ton atau setara dengan Rp11.340.344.555.943,00.
  - b. SP36 sebanyak 500 ribu ton atau setara Rp1.658.239.500.000,00.
  - c. ZA sebanyak 750 ton atau setara dengan Rp1.349.169.000.000,00.
  - d. NPK sebanyak 2 juta 705 ton atau setara dengan Rp11.128.911.000.000,00 dan,
  - e. Pupuk organic atau kompos dengan kualitas tertentu setara dengan Rp1.142.720.640.000,00.

Anggota?

Ia Pak Mindo silakan.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Supaya pemahamannya sama saja, supaya merata pemahamannya. Itu di 4e, itu jumlah nilainya tidak berubah. Tetapi perlu pupuk dan kementerian membicarakan duduk kembali, mau kita teruskan anta berantani ini membuang uang untuk membakar atau sungguh-sungguh mau kita berikan penambahan C organic kedalam tanah. Silakan itu dibicarakan nanti setelah RDP Pak Ketua, tetapi nilai rupiahnya kita tidak ganggu.

Terima kasih.

Itu, supaya kita pahami sama.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Anggota bagaimana setuju?

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Pimpinan.

Terima kasih.

Untuk mengingatkan saja kepada kita semua Pak Menteri terutama. Dari fostur anggaran ini kita tidak melihat semangat bahwa kita akan mendorong organic lebih besar.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Saya sebenarnya menahan diri untuk bicara pada terakhir kalau diberi kesempatan sebentar oleh Ketua dan para Pimpinan anggota Komisi IV.

Tapi khusus poin 4 ini, sebenarnya ada yang menggajal dalam pikiran saya. Ini kan dipertanggung jawabkan oleh Kementerian Pertanian. Dana 26 triliun lebih, tetapi sebenarnya kami cuma Pos yang dilewati itu. Kami hanya Pos yang dilewati itu. Kami hanya Pos yang dilewati, anggaran ini di keuangan dan kemudian kalau terjadi nanti salah, kurang seperti apa yang menjadi evaluasi selama ini, Kementerian Pertanian yang kena dampaknya. Saya pikir-pikir Ketua dan para pimpinan Komisi IV, ini harus kita bicarakan lebih clear, supaya benar-benar ini kalau memang tanggung jawab kami, kami pertanggung jawabkan dan ada cara kami mempertanggung jawabkan ini. Pupuk organic sedang kompos dengan tidak menentukan volume kita cuma sahkan seperti ini, menjadi bias untuk saya dan saya tidak biasa untuk bermain-main. Saya ingatkan pada, kita ini bekerja untuk rakyat, kita kerja untuk bangsa ini kan. Oleh karena itu berapa pun pupuk itu, subsidi yang harus dilakukan, mohon maaf Pimpinan dan segenap Anggota Dewan. Saya akan ukur semua anggaran yang Eselon I yang saya dapat ini, saya akan ukur kok dapat uang begini, berapa peningkatan pertanianmu. Itu Pak, minta maaf, minta maaf. Saya sebenarnya menahan diri. Saya komplain sebenarnya.

Ada anggaran begitu besar di pertanian seperti ini, tapi selama ini kita cuma menyerahkan itu anggaran dan ukurannya apa, meningkat atau tidakah. Itu yang saya pikir Pak. Jadi ini memang masih perlu pendalaman, walaupun ini saya kita setuju saja Pimpinan, tapi saya ingin bicara lebih tertutup dengan Bapak sekalian, supaya kita clear. Kalau kita subsidi, berapa pertumbuhannya, NTT berapa, yang kita toleransi berapa hektar, berapa ton/hektar. Kalau cuma 4 ton kebawah, buat apa subsidi. Maafkan saya. Saya pikiran seperti ini, ini harus diclear baik sama kita. Mungkin ini saya perlu bicara dengan Menteri Keuangan dan lain-lain, seperti apa Pos ini, kalau toh

tidak bisa kita rubah sekarang, tentu tahun depan kita berharap ini kita mampu clear. Minta maaf saya, intervensi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri tidak perlu minta maaf, ini kan diskusi untuk kebaikan-kebaikan kebersamaan. Jadi kalau yang poin E ini tidak dimasukkan, berarti tidak ada pupuk organic. Tadi saya sudah tanya Pak Mindo, kira-kira berapa harganya, baru bisa diketahui tonasenya. Ya Pak Mindo bukan begitu.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Ia untuk itulah pupuk dan kementerian harus membicarakannya.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Menteri kalau ada. Bicara saja sebebas-bebasnya Pak Menteri tidak ada masalah kok.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Minta maaf, minta maaf.

Kalau pengalaman membuat pupuk organic, hampir dari 24 kabupaten itu, ada 7 prioritas saya membuat pupuk organic dan semua mati. Kenapa, kita sudah ajarkan pupuk dan lain-lain, tetapi kemudian pembeliannya tidak kita siapkan begitu. Seharusnya semua masyarakat bisa diajarkan membuat pupuk itu, tetapi siapa yang membeli. Nah oleh karena itu memang, pencantuman angka ini perlu, tetapi siapa yang bertanggung jawab dengan dana yang seperti ini, pada Dirjen mana kita letakan, sehingga betul-betul kita kembangkan pupuk organic, tetapi ada ujungnya yang akan membeli untuk disalurkan kembali kepada subsidi masyarakat kita dan harus terukur.

Membuat kompos dan lain-lain tidak cukup, dia harus ada pencampuran tertentu, agar katakanlah minimal kita bisa melakukan pembusukan pada sisa-sisa geram yang ada, kalau tidak, ini akan menjadi masalah itu. Oleh karena itu mungkin, ini perlu dicantumkan memang Pimpinan, tetapi sekaligus nanti kita bicarakan nanti, seperti apa persiapan anggaran ini, dikeluarkan kepada siapa, dirjen mana yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan. Kalau ini terjadi, maka saya berpikir rakyat sendiri yang

mau, satu kecamatan melalui Kostratani itu, ia mau lakukan pupuk sendiri. Penduduk sendiri membuat diajarkan cara membuat pupuk, kemudian kita beli, sesudah dibeli, sehingga dia bergairah, dipakai sendiri pada pupuk yang lahan sudah tersedia termasuk NTT.

Ya seperti itu Pak Pimpinan. Maaf.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Pak Ketua, mungkin mekanismenya ini yang belum sepenuhnya yang dipahami oleh Saudara Menteri. Anggaran ini tidak ada kaitannya sama Kementerian Pertanian ini. Ini *direct* ini ke pabrik pupuk ini.

Yang kedua, biar kita tahu juga, jumlah anggaran subsidi pupuk ini, itu tidak bisa juga ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Dalam anggaran Negara yang menetapkan ini adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu membuatkan Pos anggaran, subsidi energy, subsidi pangan, subsidi transportasi. Inilah nanti yang akan dibicarakan dengan Badan Anggaran, kemudian ditetapkan angka-angkanya itu. Nah, nanti Kementerian Pertanian, yang mem break down ini kepihak provinsi dengan catatan seharusnya atas luas lahan RDKK. Jadi akan keliru sekali kalau kita katakan sepenuhnya atas RDKK.

Kalau dikumpulkan RDKK mulai dari kelompok kedistributor, kecamatan, kabupaten, provinsi nasional dengan jumlah yang diberikan pasti tidak sama, pasti antara kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh rakyat itu, selamanya lebih tinggi dari kemampuan Negara untuk mensubsidi. Jadi ini juga sebenarnya kekeliruan banyak orang, bahwa uang ini habis dimakan pabrik pupuk, bukan disitu soalnya, soalnya adalah kuasa membagi-bagikan itu ada di Menteri Keuangan. Itu memang Menteri Keuangan jauh lebih Super Power dari Menteri-menteri lain Pak. Jadi Bapak juga haru melobbynya kira-kira begitu.

Terima kasih.

Jadi kembali kesini tadi, supaya yang 1142 ini dimanfaatkan lebih efektif, silakan dibicara antara PSP, Tanaman Pangan dan teman-teman dari pupuk, mau dicoba berapa dulu ini, mau langsung semuakah atau sebagian dulukah, nah itu silakan. Kalau anggaknya itu tidak kita persoalkan. Mekanismenya mau terbuang banyakah ini untuk bahan bakar untuk dibakar atau tidak, itu yang saya tawarkan tadi.

Saya kira begitu.

Terima kasih.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Bisa sedikit Ketua.

Saya sependapat Pak Mindo. Saya berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang ada. Pikiran saya saja Pimpinan dan para anggota. Kalau kita subsidi, kita harus jelas berapa peningkatan dari subsidi itu, kalau tidak, kita sedekah namanya itu.

**KETUA RAPAT:**

Bukan sedekah Pak Menteri, menggarami laut.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Artinya saya harus lihat bahwa ini uang tidak main-main Pak, 26 triliun, disaya ada tanggung jawab, berapa persen naiknya. Kalau pertanian ini hanya 2% lebih pertumbuhannya, kita tidak kejar 5 tahun kedepan, pertumbuhan penduduk 1,9, 1,6, 3 juta orang bertambah dan ini harus kita hitung semua. Saya tidak persoalkan Pak. Cuma saya butuh sedikit spirit moral dari Komisi IV untuk saya hadapi ini Pak. Saya yakin saja dengan teman-teman. Kepada saya selau dipertanyakan, ada pupuk yang mau menyebrang perkebunan, ada pupuk yang menyebrang ke Malaysia. Siapa yang ditanya itu, Menteri Keuangankah, kami Pak. Nah ini semua dan ini pertanggung jawaban kita di Komisi IV.

Dengan teman-teman ini juga, berapa kamu punya uang, berapa peningkatannya dari kami. Kalau tidak meningkat tentu apa itu uang. Saya akan tanya seperti itu Pak, dan saya minta dikawal itu. Kita coba, mungkin tidak sekarang teman-teman, tidak bermaksud mau mengecilkan, tapi ini soal pertanggung jawaban bersama. Saya yakin, ini uang tidak boleh sia-sia, ini uang besar Pak. 26 triliun saya di kementerian cuma 20 triliun, ini lebih besar. Kalau ini tergarap dengan baik, termasuk yang mana yang cocok pupuk untuk lahan kering, yang mana yang cocok lahan basah, kita maaping betul dan penurunan pupuknya benar, pasti kita dapatkan pertumbuhannya, kita bisa hitung. Saya harus belajar banyak Pak, mungkin karena saya baru 25 hari, saya tidak paham ini, masalah begitu.

Terima kasih Pak Piminan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Menteri, redaksinya harus baca dari atas. Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2020. Jadi

kalau Pak Menteri bilang tadi ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan diusulkan kalau perlu kami hilangkan, kami hilangkan.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Barangkali dalam pembahasan berikutnya, kita akan coba lihat seperti apa, untuk sementara tidak ada masalah.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Menteri pembahasannya nanti akan dibahas antara Eselon I dengan Pupuk Pak.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Dan pasti saya ajak penerapan pupuk itu Pak Sekjen dan semua Dirjen-dirjen saya itu akan dipantau melalui *artificial intelligence* dengan Big data. Kita sebenarnya sudah selesai dalam panggung yang kecil, berapa sebenarnya turun pupuk itu di NTT, Bapak pegang, saya pegang, kita kontrol sama-sama, tidak boleh ada yang miss. Bahkan ada pikiran saya, Pimpinan minta maaf, boleh tidak. Subsidi itu terakhir, hanya yang di atas 7 ton, yang 4 ton bagaimana. Kalau 8 ton wajiblah disubsidi, dia harus menerima penghargaan Negara, dia harus dapat insentif, tapi ini terlalu ideal barangkali. Saya Pak Mindo saya akan belajar banyak dan saya coba untuk sabar untuk mau melihat ini, tapi hasilnya saya punya staf ini harus tanggung jawab memang sama saya.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri ini pada rapat kerja terakhir dengan menteri yang lalu, Tanggal 16 September 2019, sudah dijelaskan disini. Komisi IV yang lalu ini Pak, bukan saya Pak. Komisi IV DPR-RI menyetujui alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2020 sebanyak 7 juta 909,303 ton atau setara dengan Rp.26.627.384.695.943. Ini rapat kerja terakhir dengan Menteri Pertanian. Ditandatangani oleh Ir. Andi Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo. Jadi nanti patokannya ini Pak Menteri, Pak Menteri boleh bawah, kalau masalah teknisnya nanti biar Eselon I dengan Pupuk yang membahas.

Setuju Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah, Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp.5.757.944.662.521.
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp.45.080.939.470.
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp.5.712.863.723.051.

Anggota?

Ini kurang bayar.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Hanya soal redaksi saya Ketua.

Mungkin perlu ditambahkan disana, Komisi IV DPR-RI mendesak pemerintah c.q. Menteri Keuangan melalui Badan Anggaran. Jadi kita libatkan Badan Anggaran untuk bicarakan itu.

Kira-kira begitu.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ketua.

Saya kira kita Komisi IV tidak perlu masuk sebagai kesimpulan ini, ini adalah urusannya Menteri Keuangan dengan Perusahaan Pupuk. Saya kira kita tidak perlu di dalamnya, jangan sampai ada pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap Komisi IV. Dengan demikian dan ini juga adalah kepentingan mereka kepentingan Pemerintah dengan BUMN, bukan kepentingan rakyat.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Mindo ada saran?



**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Ini kepentingan rakyat Pak. Kita selaku wakil rakyat, wajib mengingatkan pemerintah, ya. Kalau terus tiba-tiba tutuplah pabrik pupuk ini, karena tidak bisa membayar bunga dan sebagainya, rakyat terlayani, kan hubar habir semua termasuk Komisi IV. Jadi tetaplah dilakukan seperti itu.

Terima kasih. Jadi kita mendorong.

**KETUA RAPAT:**

Jadi setiap ada kekurangan pembayaran pupuk, selalu dimasukkan kesimpulan rapat seperti ini. Tadi dijelaskan juga melalui Badan Anggaran. Ya setuju.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

la pandangan saya hanya itu Pak Ketua tadi, jangan sampai ada pandangan negative terhadap Komisi IV.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Biar Badan Anggaran yang mengurus Pak.  
Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

6. Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan benih dalam rangka mendorong pemberlakuan kembali kebijakan subsidi benih guna memenuhi ketersediaan benih unggul.

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

7. Komisi IV DPR-RI meminta pemerintah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Penyuluh Pertanian dalam rangka pengembangan Suber Daya Manusia dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan peningkatan produktifitas komoditi pertanian.

Sepertinya ada yang janggal. Tolong diperhatikan dong.

Saya ulang nomor 7.

Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Penyuluh Pertanian dalam rangka pengembangan Suber Daya Manusia dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan peningkatan produktifitas komododitas pertanian.

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

8. Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP dan Asurani Usaha Ternah Sapi atau AUTS atau Kerbau AUTK.

Anggota?

Pemerintah?

**(RAPAT: SETUJU)**

9. Komisi IV DPR-RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Komisi IV DPR-RI akan melakukan rapat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog untuk membahas Pembentukan Badan Pangan Nasional.

Karena ini Pak Menteri sudah 7 tahun tidak jadi-jadi, tidak lama lagi 2020 jadi 8 tahun.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Boleh tidak berpedapat sedikit?

**KETUA RAPAT:**

Boleh, banyak juga boleh.

## **MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Karena saya baru 25 hari, saya berharap bisa mempelajari dulu Undang-Undang yang harus kita lakukan ini. Begini, Pimpinan dan para anggota Komisi IV. Selalu saja pertanian itu didorong untuk melakukan peningkatan produktifitas dan kemudian pasarnya tidak pernah dalam *great* yang utuh, sehingga kadang-kadang kalau kemudian sebuah komoditi berlimpah, pasarnya diantisipasi atau ada di Kementerian lain, maka ini akan menjadi persoalan, harga akan turun dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kasih saya kesempatan untuk mengevaluasi ini sedikit, mempersiapkan dengan baik Undang-Undang ini, sambil melihat sebenarnya ada kesulitan-kesulitan kementerian itu untuk mengembangkan komoditi sesuai dengan pasar. Seharusnya pasar terantisipasi apa, komoditi apa, mappingnya apa, bahkan ada pemewilayahan dari komoditas apa per provinsi per kabupaten unggulannya dari sana kita berangkat dari perencanaan pasar yang ada.

Saya khawatir, kalau besok ada badan sendiri yang mengatur lagi, maka kemudian saya kehilangan *great* untuk mempersiapkan itu dengan baik. Saya tanggung jawab Pak. Tapi ijin kalau mungkin ini perintah Undang-Undang saya tentu akan melaksanakan. Tapi kalau bisa saya dikasih waktu dulu melakukan setting, barangkali satu, dua bulan, tiga bulan mempersiapkan ini lebih baik. Badan mana yang harus didorong, karena seperti itu. Kadang-kadang kita punya komoditas langsung besar, tetapi penyerapannya orang lain yang harus menyerap. Kami tidak bisa melakukan setting di lapagannya begitu Pak. Jadi seperti itu. Kalau toh poin ini harus masuk, bukan bentuknya mendesak, tapi mendorong. Mendorong agar ini bisa menjadi sesuatu yang yang kami persiapkan. Saya sudah dapat konsepnya, tapi saya melihat rasa-rasanya saya tumpul untuk bisa bergerak untuk menyatakan pangan kita yang 267 juta orang itu saya siap, saya ambilnya dari mana. Saya akan lihat dari provinsi mana yang akan panen dua bulan kedepan, tiga bulan kedepan, berapa stoknya yang harus saya persiapkan, berapa anggaran yang harus siap. Demikian orientasi yang harus dipersiapkan seperti itu.

Besok kami melakukan ekspor yang banyak di Hortikultura. Saya akan fokusnya seperti itu. Tapi *great* pasarnya harus dipersiapkan. Selama ini selalu kita andalkan anggaran dari APBN, APBD, padahal saya berharap kita menggunakan pendekatan dengan piramida terbalik, pengusaha dulu, masyarakat main, kemudian bank dan BUMN akan memberikan dorongan yang kedua, yang ketiga, baru APBN, APBD, terlalu sedikit APBN, APBD, untuk bisa menggerakkan. Di Pertanian kurang lebih 2 ribu triliun terputar untuk itu dan mungkin resonansinya tidak kurang dari 50 juta orang di bawah kita akan bergerak, oleh karena ini akan masuk dalam sebuah konsepsi yang tertata oleh pertanian, kalau tidak, kapan Cabe naik melimpah, harganya pasti jatuh Pak dan tidak ada penyangga kita, baberstok kita tidak persiapkan, orang lain yang

mempersiapkan. Jadi kalau kami menumbuhkan, kemudian tidak ada diujungnya, maka ini jadi persoalan.

Mohon pertimbangan Pimpinan. Barang kali sekesar sebuah pikiran, tapi saya dikasih waktu minimal beberapa bulan ini untuk mempersiapkannya lebih baik.

Terima kasih Pak.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Pimpinan, sebelah kiri.

**Pak Menteri yang saya hormati.**

Terkait dengan Badan Pangan ini sebenarnya sudah hampir 5 tahun ini terkait dengan itu dan itu sudah final sebenarnya dalam Undang-Undang Pangan. Saya berharap betul bahwa Badan Pangan ini memang sudah terbentuk. Ini sebenarnya sudah terlambat, karena amanah Undang-Undang itu 2 tahun setelah Undang-Undang itu terbentuk, itu Tahun 2012. Semestinya Tahun 2014, selambat-lambatnya Tahun 2015 sudah terbentuk. Sekarang sudah 2019. Kalau memang Pak Menteri meminta untuk ada waktu untuk mempelajari, kita tidak ada masalah sebenarnya, tapi kita kasih batas waktu 2 bulan saja Pak Menteri. Jadi dua bulan kita lihat, karena begini, sepengetahuan saya, Badan Pangan ini sudah didiskusikan, sudah didesain bersama-sama para stakeholder yang ada, rumusnya sudah ada waktu itu. Tinggal kemudian kita entah next nya ada dimana.

Waktu kita sudah berdiskusi dengan Menteri Pertanian yang lama dan itu kemudian sudah didiskusikan konon kabarnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan RB dan itu tinggal diproses saja. Nah maksudnya kalau memang Pak Menteri mempelajari dulu, 2 bulan saja, menurut saya itu sudah cukup, tetapi saya cuma mengingatkan bahwa, amanat Undang-Undang 18 itu, maksimal 2 tahun Pak, di dalam Undang-Undang 18 Tahun 2012 itu. Saya mengingatkan itu saja, karena khawatir ini pelanggaran Undang-Undang, khawatirnya. Nah makanya kalau butuh waktu 2 bulan saya setuju, tapi jangan terlalu lama lebih dari 2 bulan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri.

Atau saya yang usulkan. Komisi IV DPR-RI mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012, tentang Pangan, selambat-lambatnya 3 bulan. Tadi kalau 2 bulan takut tidak cukup waktunya, usulan saya jadi 3 bulan. Jangan interupsi lagi sudah ya.

Komisi IV akan melakukan rapat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog untuk membahas Pembentukan Badan Pangan Nasional. Tadi sudah disuruh.

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

Ijin Pak Pimpinan.  
Pak Menteri.

Terkait stakeholder yang akan membahas disana Pak. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog jangan ikut, karena memang Perum Bulog sebetulnya kalau mau dimasukan Kementerian BUMN Pak. Saya usul juga disini, kami usul, Kementerian Perekonomian Pak, koordinator bidang perekonomian. Itu masuk Pak, Bulog tidak masuk Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Kementerian BUMN dan Kementerian Menko Ekuin ya.

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (AGUNG HENDRIADI):**

Ya perekonomian. Jadi Perum Bulog tidak usah masuk Pak disana.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Sebentar Pak Ketua.

Perum Bulog menurut saya tidak ada masalah, ini kan bukan soal kesetaraan, tetapi bahwa Perum Bulog ini merupakan satu bagian yang pada saat pembentukan Undang-Undang Pangan itu. Saya mohon koreksi Pak.

**KETUA RAPAT:**

Disertakan.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Disertakan. Ini bukan kesetaraan bahwa satu menteri, menteri itu bukan persoalan level penjabat Negara atau apa, tetapi kita lihat urgensinya, pentingnya Perum Bulog itu dilibatkan. Karena bagaimanapun semangat Badan Pangan itu adalah salah satunya bagaimana mengembangkan Bulog, yang selama ini kemudian Bulog ini hanya pada level operasional BUMN pada saat itu. Tetapi semangat dari Undang-Undang 18 Tahun 2012, saya mohon koreksi Pak Mindo kalau salah. Bahwa Badan Pangan itu adalah bagaimana mengembangkan Bulog yang sekarang ini terjadi pasca reformasi kemudian kita memperkuat lagi posisi itu. Itu kenapa harus dilibatkan Perum Bulog itu.

Terima kasih.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Pak Ketua, kedudukan Perum Bulog, kedudukan Pupuk Indonesia, kedudukan Petani, kedudukan Sang Hyang Seri dalam kaitannya dengan Badan Pangan Nasional ini sama. Jadi memang tidak perlu dilibatkan Bulgo dan tidak perlu dilibatkan BUMN, Kementerian BUMN pun tidak perlu dilibatkan. Soal kebijakan-kebijakannya sudah tadi itu, termasuk Menko Perekonomian masuk.

**KETUA RAPAT:**

Masuk.

Ia dimasukan Menko Perekonomian, Perum Bulognya dihapus.

Saya ulangi lagi Nomor 9.

Komisi IV DPR-RI mendorong Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan rapat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk pembahasan pembentukan Badan Pangan Nasional.

Pemerintah bagaimana?

Tidak apa Pak, ada apa bicara kita lagi diskusi ini, supaya Bapak nyaman, semuanya nyaman.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Sedikit Pimpinan.

Pikiran saya begini. Badan POM itu dibawah Kementerian Kesehatan Pak. Untuk bisa melakukan semacam kontrol dan melakukan apa-apa yang harus dilakukan Badan POM. Saya tadinya berpikir, Bulog bukan di BUMN, Bulog ada di Kementerian Pertanian. Sehingga operasional dari hulu ke hilirnya jelas. Ini kalau kita lepas lagi kesitu, artinya sebagian badan ketahanan pangan saya akan masuk kesana Pak. Berarti kaki ini semakin kecil, sementara kami mempertanggung jawabkan 267 juta Pak dan pertanian itu sangat rentang dengan cuaca, dengan bencana alam, dengan hamah yang harus terprediksi dari awal, seperti apa stok yang ada. Maaf, akhir November ini kami minus, pangan kita minus Pak, akhir Januari kita minus, akhir Desember kita minus, baru terimbangi itu setelah Februari. Ini kan semua harus terprediksi, mana yang harus dibeli dulu, mana yang harus dipersiapkan dan kita pakai pendekatan IT untuk menghitung dan melakukan analisa itu. Jadi minta maaf.

Ini sekedar pemikiran saya, kalau ini kemudian menggruss sebuah badan yang bertanggung jawab selama ini merencanakan. Badan Ketahanan saya Pak, kemerin saya intruksikan, bahwa 88 kabupaten, 22 juta orang itu per Desember ini dilakukan asistensi dan intervensi, harus selesai Pak. Maafkan saya. Saya baru terima Bapak tadi menyagkut masalah bencana, saya bilang Desember selesai, saya mau dengar itu. Itu Pak. Supaya saya dikasih power yang cukup untuk kita sama-sama bersama Komisi IV. Jadi kalau ini dilepas lagi satu badan besar disaya, di kementerian, ini tentu saja harus berproses. Tapi kembali bahwa ini perintah Undang-Undang, saya akan tentu akan kembali dan akan bicarakan. Yang saya pikir adalah kok Badan POM, misal tetap masuk di Kementerian Kesehatan, tetap masuk di Kementerian Kesehatan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi usulan Pak Menteri, Bulog tetap dicantumkan.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Tidak, tidak. Tidak dicantumkan, karena kan sudah ada kementerian yang menangani itu Pak. Kalau tidak dicantumkan juga semua yang ada disini. Itu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kenapa itu dihitamkan. Jangan dihitamkan dulu dong.

Jadi ini dirubah lagi Pak Menteri, supaya sama-sama merasa nyaman. Komisi IV DPR-RI mendorong Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Untuk itu Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian mengkaji konsep mengenai Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan.

Cocok?

Anggota?

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Belum-belum, keliru malah.

Kalau disebutkan mengkaji, itu bisa Undang-Undang itu yang diragukan. Ini sudah amanat Undang-Undang. Saya bisa pahami, info tentang Badan Pangan ini belum unth diterima, dipahami oleh menteri. Silakan kasih waktu untuk memahami. Badan Pangan ini Pak Menteri, itu bukan Badan Ketahanan Pangan itu, beda ya toh. Jadi belum, jadi mungkin kita kasih waktu untuk memahami Undang-Undang dululah.

**KETUA RAPAT:**

Kalau begitu kita drof.

Anggota setuju?

Nah kalau begitu.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Dikasih untuk memahamilah, harus ada juga waktu untuk memahami dari menteri.

**KETUA RAPAT:**

Tapi nanti Pak Menteri setelah 3 bulan, ini kami masukan 30 hari. Setuju ya Pak Menteri ya.



**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Sebentar dulu Pak Ketua.

Kita minta komitmen Pak Menteri dulu, bahwa ini amanah Undang-Undang seperti Pak Mindo sampaikan, jangan terlalu lama juga. Kalau memang kita draf, tapi kita minta komitmen saja, bahwa 3 bulan dari sekarang kita bahas lagi terkait dengan badan pangan itu, dengan desain yang sudah disampaikan itu. Begitu ya.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tidak dimasukan gentlemen, agreement saja sudah cukup sama Pak Menteri.

Jadi 9 dihapus, 10 jadi 9. Benar Pak Menteri angka 9 lebih bagus dari pada angka 10.

Komisi IV DPR-RI meminta setiap Eselon I Kementerian Pertanian, melakukan pengembangan sentra atau zonasi komoditas pertanian unggulan di setiap provinsi, untuk mencapai kemandirian pangan dan pertanian serta peningkatan komoditas ekspor.

Anggota?

Pak Menteri?

Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Jadi yang poin 9 ini intinya begini Pak Menteri. Karena kalau kita perhatikan, di Indonesia selalu acak-acakan, jadi kita maunya fokus. Kabupaten ini, provinsi ini menghasilkan buah yang baik seperti ini.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Ketua ijin ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ia Kanjeng.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Kita hari ini RDP atau rapat dengan Menteri juga menindaklanjuti ketemuan BPK. Sampai hari laporan kementerian masih ada 60 temuan yang belum ditindaklanjuti. Apakah rekomendasi kita, apa kita biarkan biar Menteri, Dirjennya masuk penjara, saya kira tidak.

**KETUA RAPAT:**

Kalau menterinya janganlah Pak.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Bukan menteri ini Pak, menteri sebelumnya. Ini kan setahun yang lalu. Ini perlu kita bantu, mendorong agar ini segera selesaikan Pak. Masuk tidak, kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi ini resikonya ya seolah-olah ini sudah selesai.

**KETUA RAPAT:**

Coba Pak Sekjen dulu.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Mohon izin.

Tadi sudah dijelaskan, sebetulnya 60 itu usulan tindaklanjut dalam proses BPK. Kami dengan BPK ada di Kantor Pertanian, semuanya dalam proses. Jadi sudah clear. Pengertian sudah celar, sudah diproses tindaklanjutnya dalam proses pemeriksaan BPK.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Tapi anda ini disini masukan, seharusnya clear.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Bahasanya memang usulan tindaklanjut, usulan tindaklanjut itu ada 60.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Berarti belum setuju BPK secara resmi.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Dalam proses.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Oh dalam proses.

**SEKJEN KEMANTAN (MOMON RUSMONO):**

Tapi sudah diusulkan.

Terima kasih.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Satu lagi Ketua.

Bahwa baru-baru ini kunker soal kebakaran. Ternyata di Sumatra Selatan 100% itu kebakaran kebun. Nah selama ini yang menangani itu siapa. Sampai Polisi/Tentara 74 Tahun, baru inilah ada Tentara/Polisi turun memadam. Saran saya, apakah tidak ada rekomendasi untuk membentuk Undang-Undang mengenai kebakaran hutan dan lahan itu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada di Proleknas 2020-2024 ada.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Tidak perlu dimasukkan disini.

**KETUA RAPAT:**

Tidak perlu.

**F F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Ya sudah.

Terima kasih.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Pimpinan.

Kita kan sudah sampaikan tadi, tentang beberapa hal yang dianggap penting dari fungsi pengawasan DPR. Apa mungkin kita membuat Panja terhadap isu-isu seperti cetak sawah, yang kami sampaikan, pupuk, alsintan. Mana yang kira-kira kita dipandang penting untuk memfungsikan pengawasan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Usulan Pak Haerudin sangat baik sekali, nanti segera kita bentuk Panja ya, tidak sampai Pansuslah ya.

Cukup, ada interupsi lagi.

Saya rasa tidak perlulah, nanti waktu RDP kita masukan, kita ada RPD dengan Eselon I, yakinlah.

Pak Menteri Tahun 2019 ada dana pupuk yang masih dibintangi 2 triliun lebih oleh Dirjen Anggaran apabila Menteri setuju ajukan prosesnya. Kami Komisi IV mendukung.

Terima kasih atas tanggapannya.

Apakah draf Rancangan ini sudah setuju semuanya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**Saudara Menteri Pertanian yang kami hormati.**

Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini, kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

**Pimpinan dan segenap anggota Komisi IV yang kami muliakan.**

Saya dan segenap staf menyampaikan terima kasih, saya kira forum ini banyak membekali kami untuk berhadapan dengan fungsi peranan dan tanggungjawab kami kedepan. Kami merasa banyak hal yang harus dan seperti biasa Pak, pulang dari sini, biasanya saya langsung berkumpul di rumah jabatan, di Jakarta dan kemudian

membahasnya langsung. Saya akan tindaklanjuti semua masukan ini pada Hari Rabu Pak, Insya Allah Pak Sekjen. Hari Rabu untuk secara konkrit apa langkah, jadi saya tidak akan membiarkan. Oleh karena itu kalau masih ada masukan Pimpinan dan anggota, yang perlu menjadi pembahasan, saya akan coba lakukan.

Yang kedua, khusus untuk WTO, minta maaf Ibu Lulu dan semuanya. Saya perlu lebih banyak dibekali seperti apa kita cari jalan keluar, karena WTO itu juga kita salah satu adalah bagian pendirinya, sehingga berbagai aturan ini, tidak boleh kita juga ikut melanggarnya. Oleh karena itu mungkin dipikiran saya, diplomasi pertanian di lembaga interanasional tidak hanya di WTO, perlu kita tingkatkan bersama. Saya masih butuh masukan hal ini kepada para politisi yang disini. Diplomasi pertanian secara internal kementerian juga masih perlu Pak, karena seperti tadi, anggaran kami bertanggung jawabkan, tapi Posnya tidak sama kita. Ini juga seperti itu.

Yang ketiga masalah Pak Sekjen juga kita dikeluhkan masalah seakan akan dicurigai sekali tentang impor itu. Padahal untuk saya Insya Allah Pak Pimpinan. Kalau memang itu tidak bisa dihindari, baru ia Pak, tetapi Menteri Pertanian tidak bisa sendiri, yang mengeluarkan bukan kita. Ini juga harus dipahami oleh Komisi IV. Oleh karena itu mari, hitung-hitungan dan ini perlu tekanan yang sama-sama. Oleh karena itu dan memang public juga harus dipahami, bahwa kalau kita mau banyak ekspor, ia kita harus terima dengan Negara lain masuk juga import, karena ini sesuatu yang dalam perdagangan dunia terjadi. Kami mohon dipahami dalam posisi seperti ini.

Yang coba akan kami lakukan adalah menyeimbangi impor itu, sehingga impor itu tidak lebih besar dari ekspor kita.

Pimpinan dan segenap anggota Komisi IV. Kalau kami berada di lapangan, kami mohon pimpinan bisa menugaskan sesuai dapilnya untuk mendampingi kami, besok itu kami ke Semarang untuk melepaskan ekspor dan lain-lain sebagainya. Yang lain seperti itu. Seperti itu pimpinan. Sehingga lihat kerja kami seperti apa di lapangan itu.

Kurang lebih dari apa yang anda saya merasa sangat terbekali dan tentu saya tidak semua di forum ini, ada prioritas-prioritas utama yang akan kami lakukan dalam pemewilayaan komoditas yang harus dilakukan, ada super prioritas dan ada pengembangan-pengembangan, dimana tentu saja kita cek sama-sama Pak.

Yang terakhir sekali, Pemantauan dan lain-lain kita lakukan sama-sama Pak, termasuk semua yang bersubsidi itu kita pantau, sehingga baik cluster, baik daerah, wilayah kita jangan bicara nasional, saya kita ingin bicara mana kabupatennya, dikecamatan mana berkasus, karena pasti tidak seluruhnya. Dan dengan demikian, Insya Allah mudah-mudahan Sekjen akan segera siapkan sistem pengendalian By IT, yang ada sehingga semua yang berjalan, termasuk penyuluh-penyuluh itu akan

terdeteksi Pak, dia kerja atau tidak. Mereka kan sudah punya andoroid semua. Pengendaliannya bisa kita lakukan.

Yang saya merasa sekarang ini, minta maaf. Kita memang kekurangan penyuluh yang memiliki kemampuan teknologi dan bisa beradaptasi dengan industri . Oleh karena itu dalam waktu singkat kami akan mengajukan tambahan, selain kewajiban-kewajiban yang ada untuk kita temukan, kalau tidak harus ada solusi-solusi yang harus dikembangkan.

Dan menutup ini, NTT misalnya kalau memang tidak bisa padi disitu, kenapa tidak kita konsentrasi dengan komoditas lain, kenapa kita tidak konsentrasi saja sama Sapi peternakan misalnya, atautkah kita konsentrasi dengan jagung. Saya pernah alami ini Pak. Yang tidak bisa ditanam jagung itu cuma aspal dan kuburan. Oleh karena itu kalau ini dikonsentrasikan ini lebih besar dari Padi Pak, dan tanaman-tanaman kurang lebih kurang airnya dan lain-lain, tapi menghasilkan banyak. Kalau kita kembangkan, katakanlah ternaknya, otomatis pakannya harus tersiapkan disitu, otomatis industrinya harus kita dorong disitu. Itu yang ada dipikiran saya Pimpinan dan para anggota Komisi. Saya terima kasih, saya masih banyak perlu belajar dengan Komisi IV. Kurang lebih dari apa yang kami tampilkan saya minta maaf kalau ada jawaban yang belum berkenan dari Pimpinan dan segenap anggota.

Ridha Allah, terima kasih, semoga jadi Ibadah.  
Sekian.

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri pada Hari Jumat akan datang, saya minta dua Eselon mendampingi ke Sumatera Utara yakni, masalah Virus colera tadi. Nanti yang memimpin Pak Daniel dengan Pak Mindo.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan dan sedikit marah, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Rapat Kerja hari ini kami tutup.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**RAPAT DITUTUP PUKUL. 21.00 WIB.**

Jakarta, 18 November 2019

a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat

Ttd

**Drs. Budi Kuntaryo**  
**NIP. 196301221991031001**